



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan ,
Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif
Kolaboratif

POHON KINERJA 2026

KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG



#Tuba

Transparan , Ulet , Bersahaja , Akseleratif



TRANSPARAN



ULET



BERSAHAJA



AKSELERATIF



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1184 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025-2029**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Tahun 2025-2029, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar Pengukuran capaian kinerja Kejaksaan Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
10. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 779)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas:

- a. indikator tujuan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. indikator kinerja sasaran strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. indikator kinerja program Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. indikator kinerja kegiatan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; dan

e. penjenjangan kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan evaluasi capaian kinerja.
- KETIGA : Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keputusan ini merujuk pada Pedoman tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

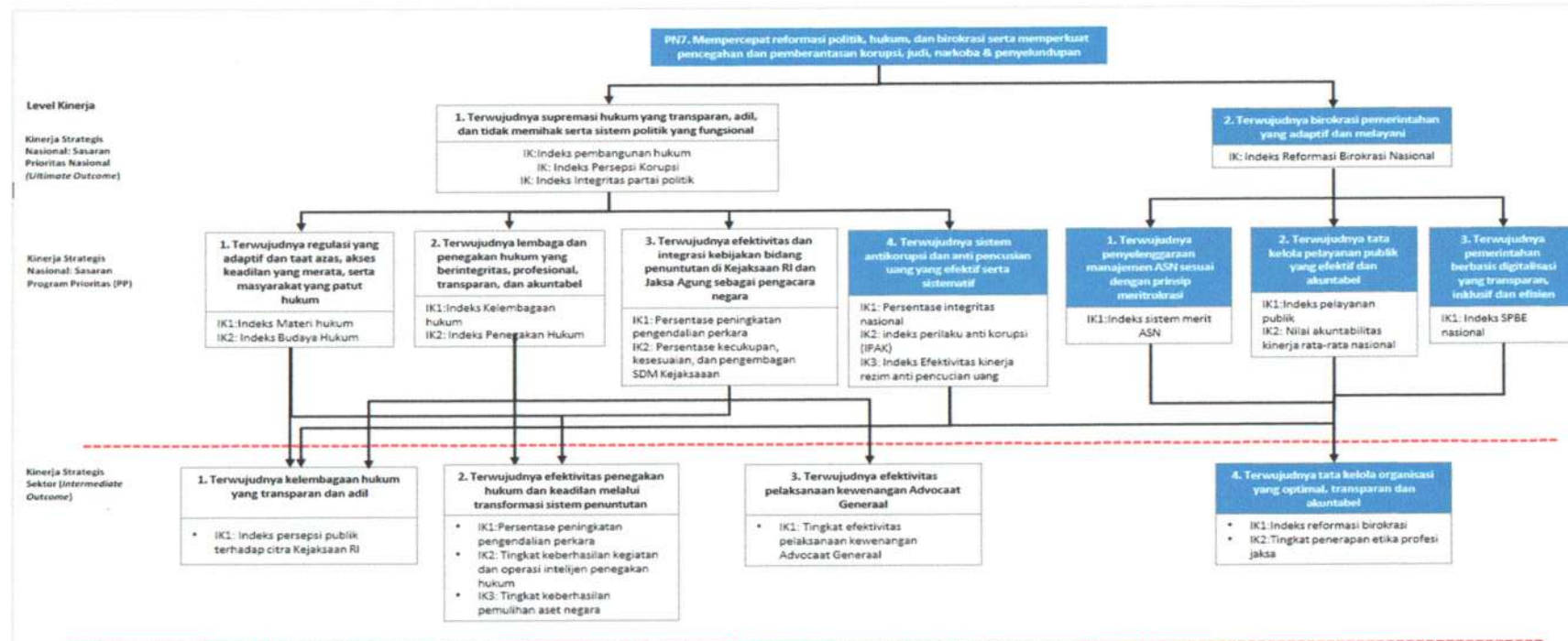
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

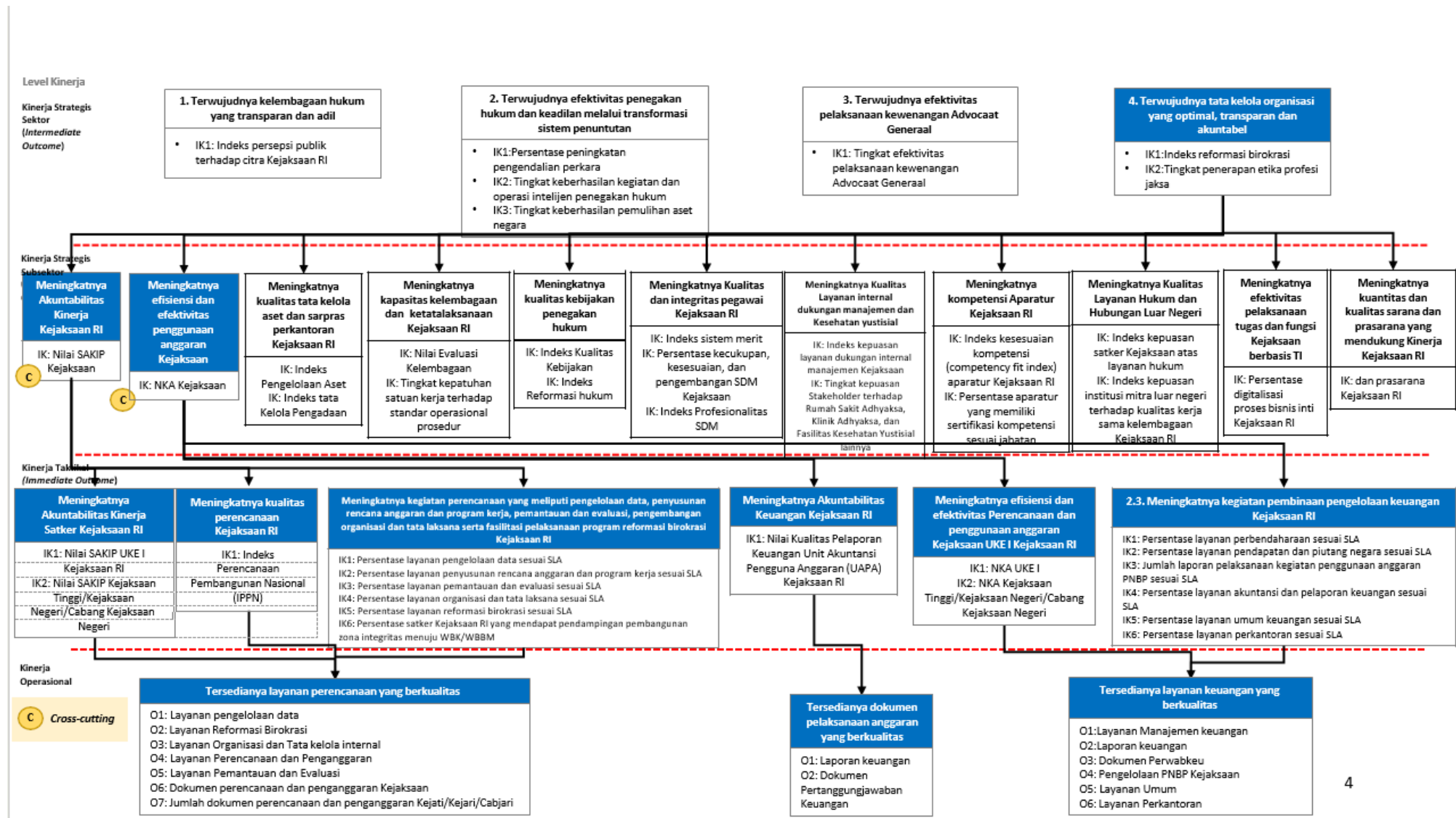


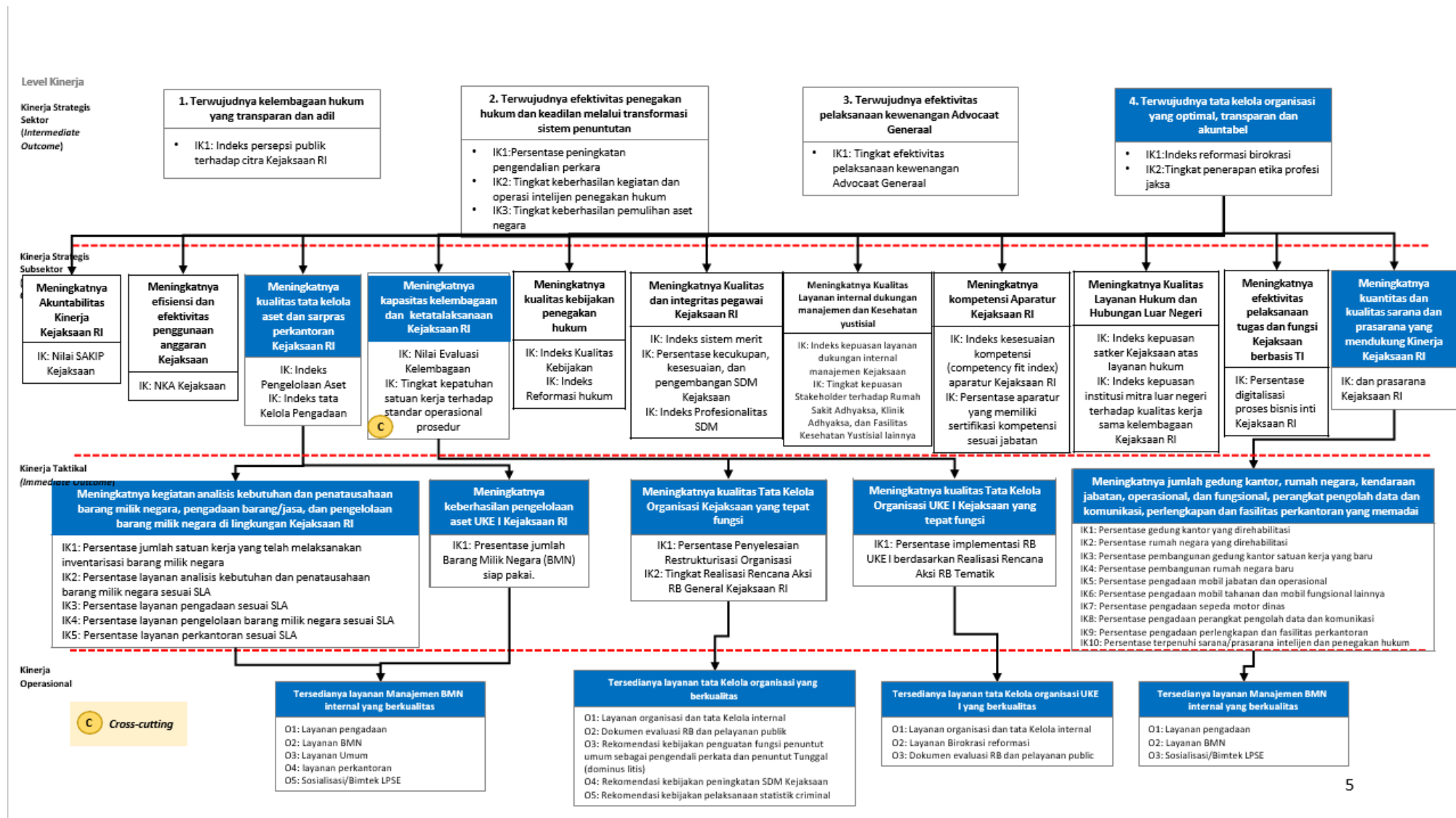
BURHANUDDIN

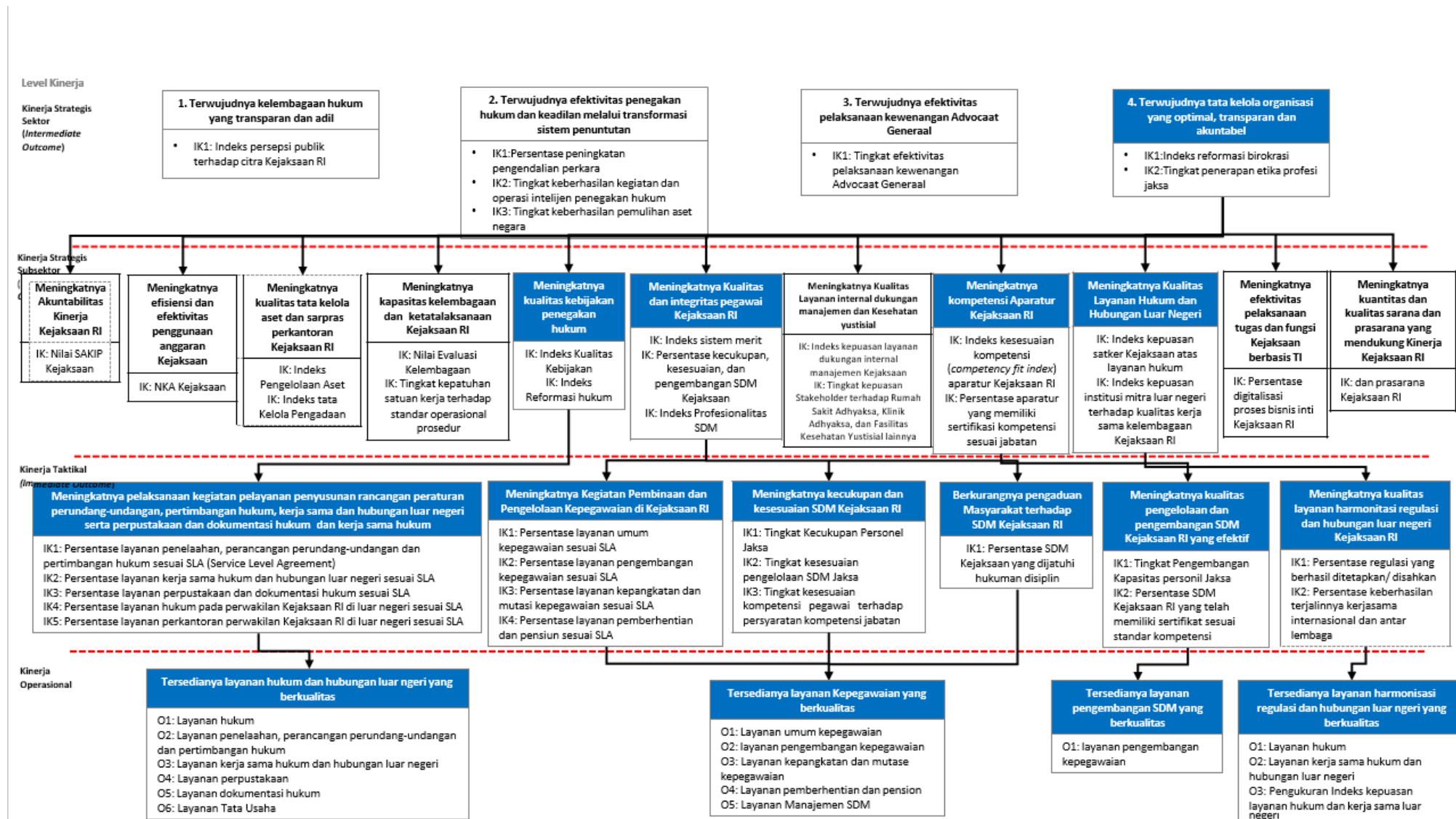
LAMPIRAN V
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1184 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2025-2029

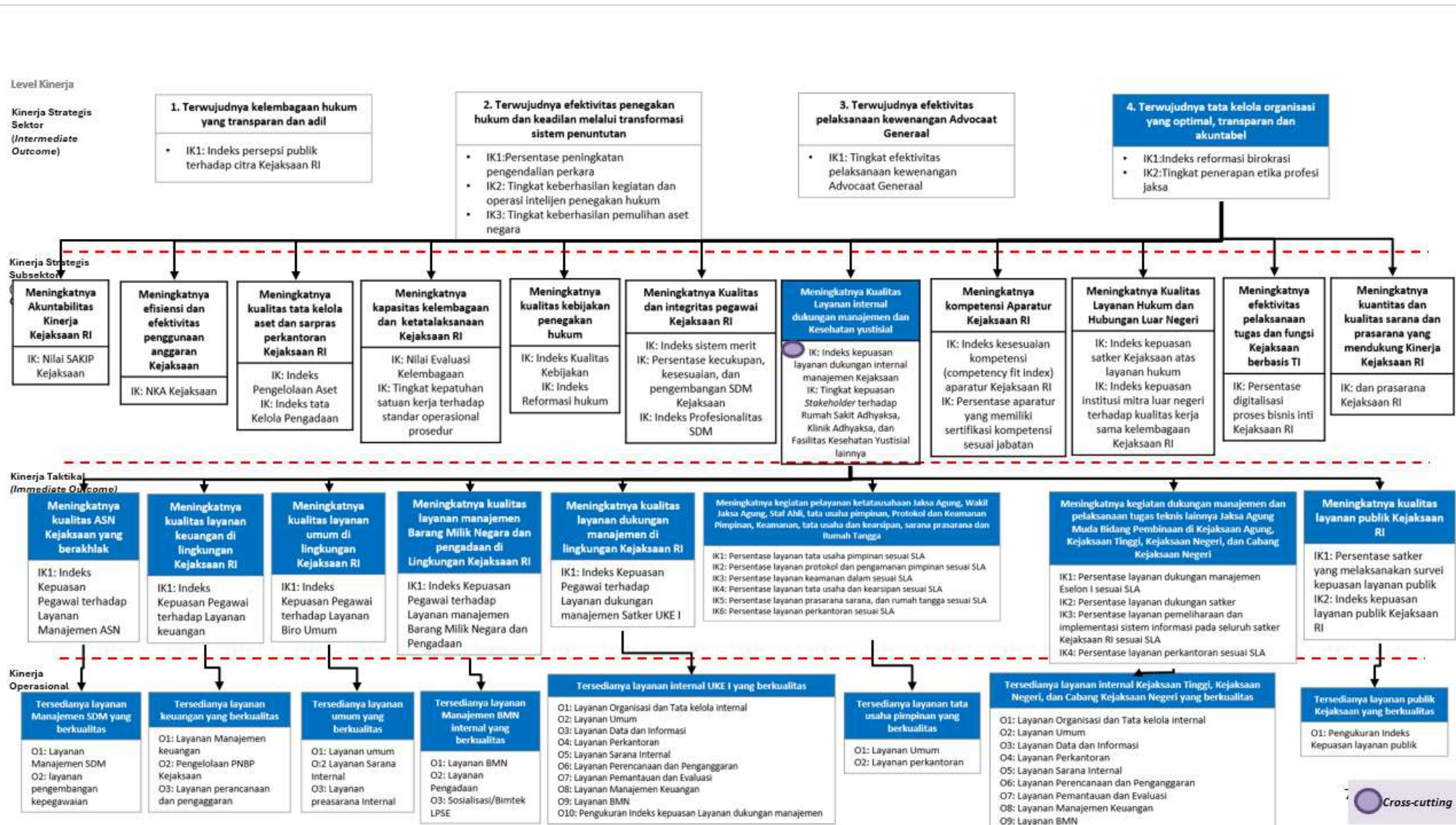
POHON KINERJA KEJAKSAAN RI – DUKUNGAN MANAJEMEN

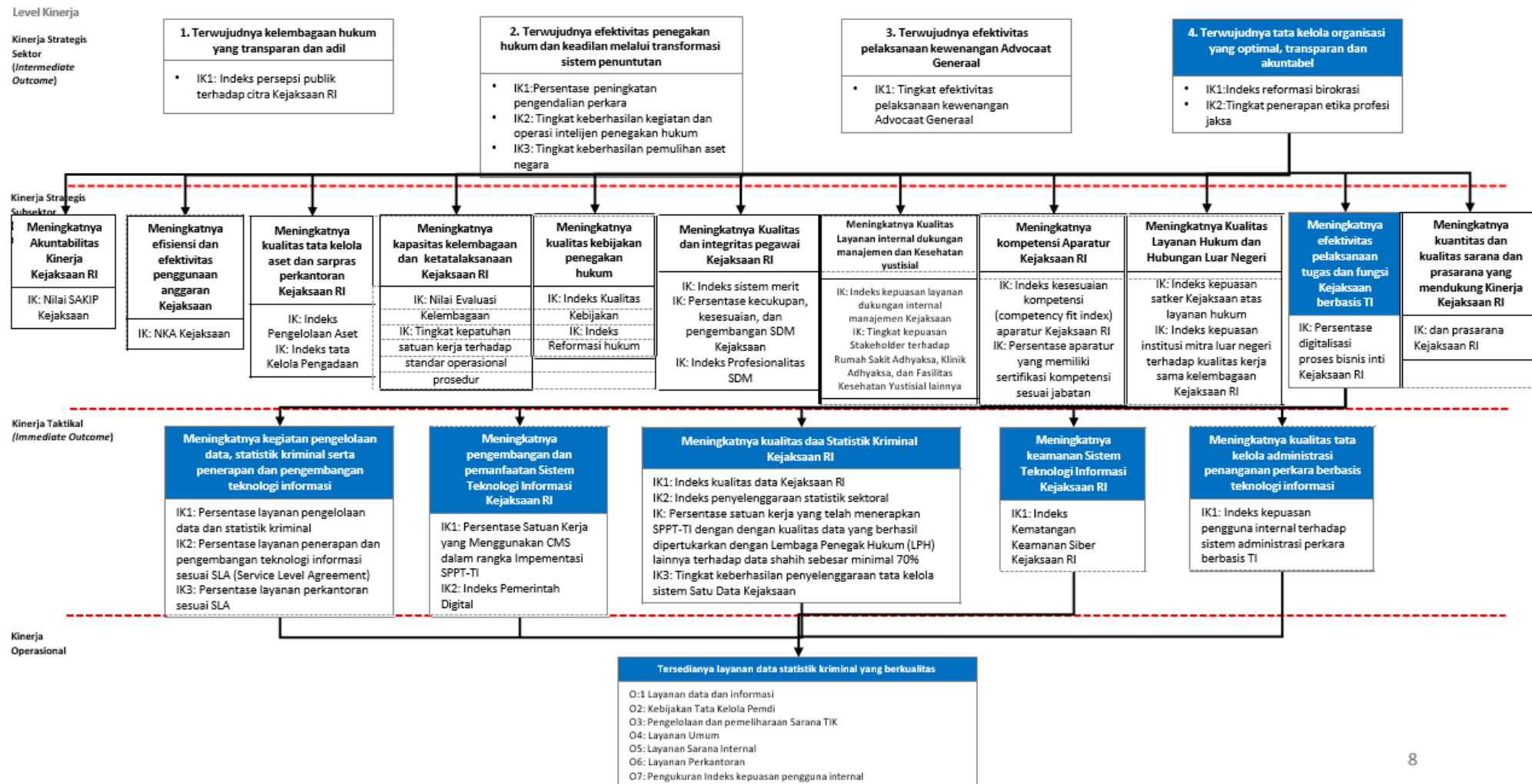


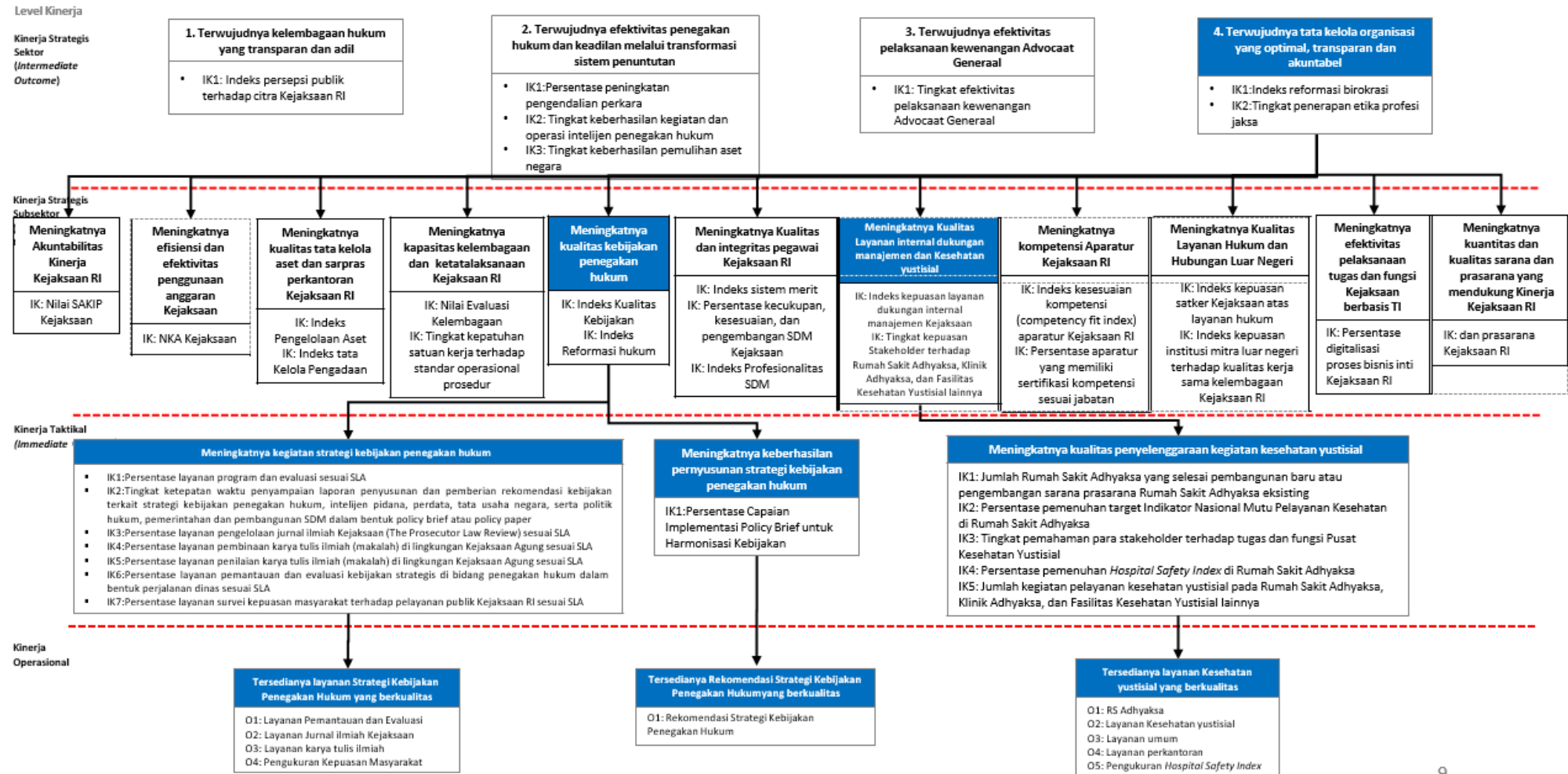


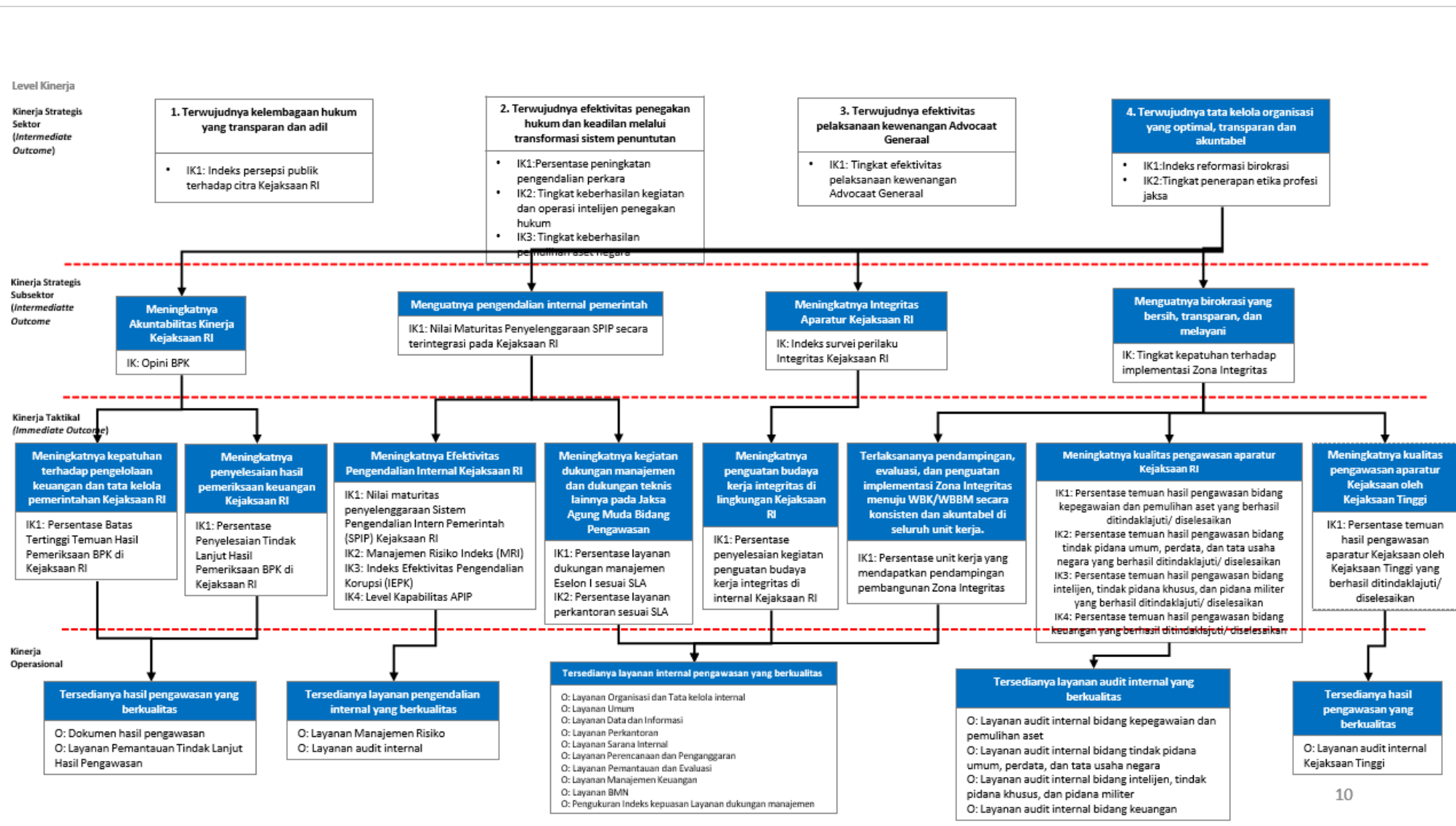




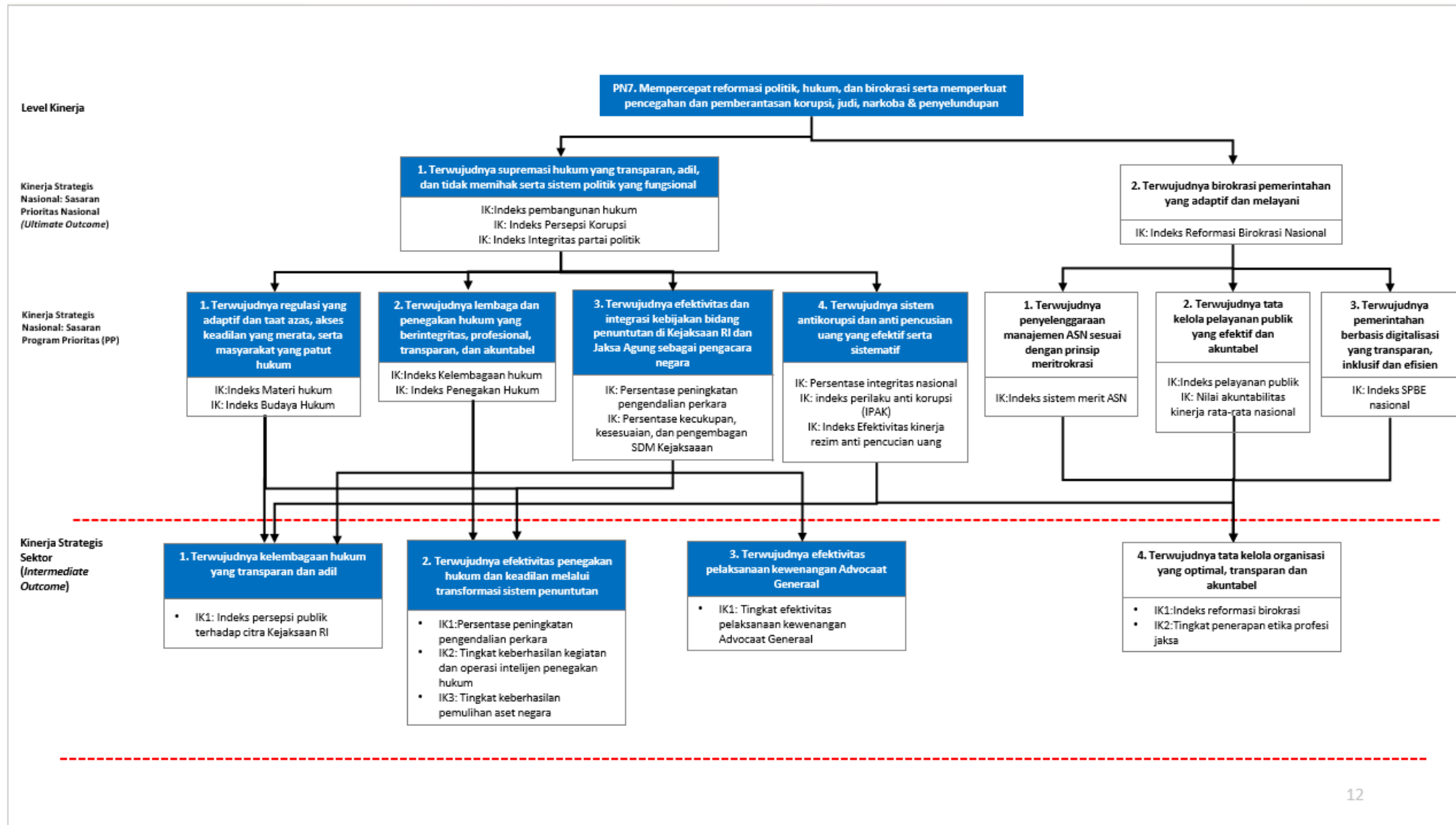


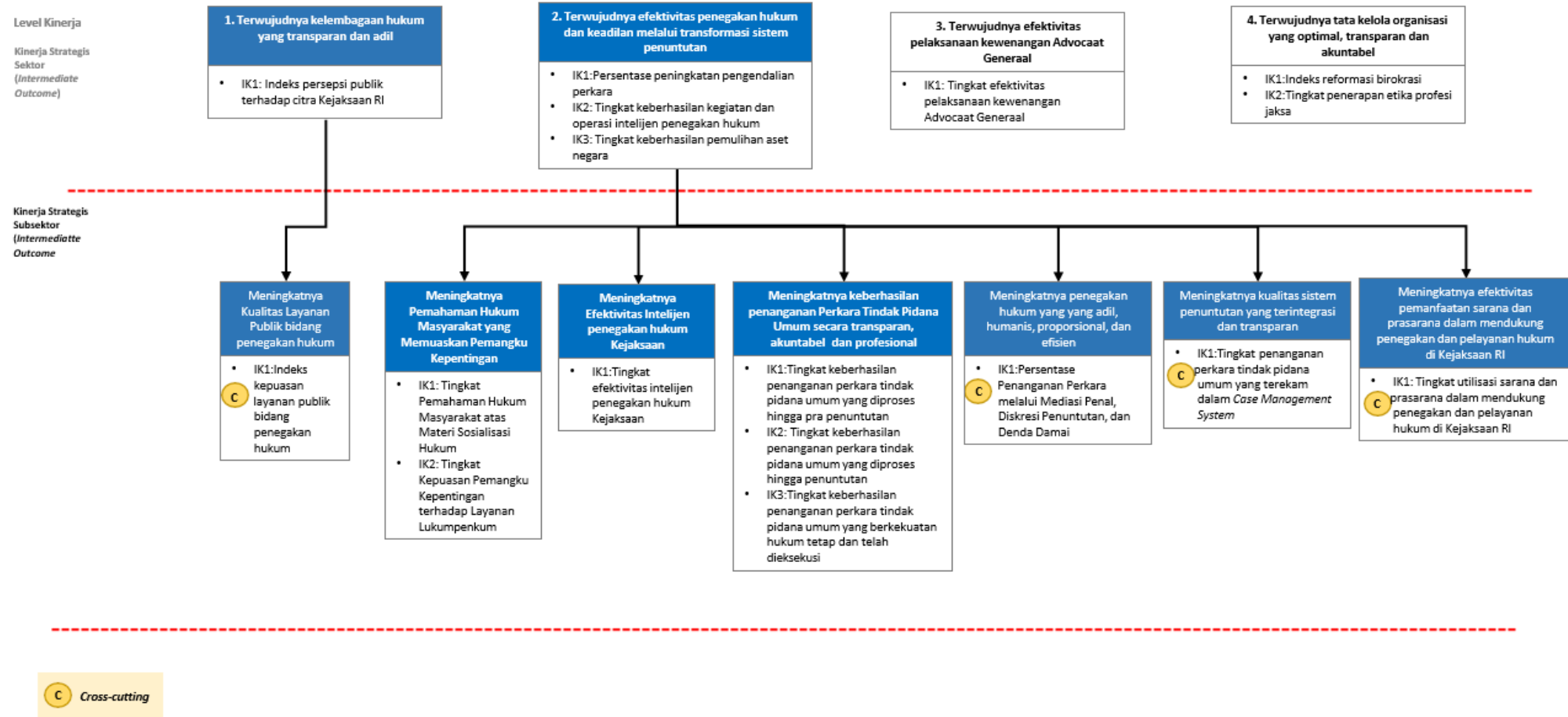






POHON KINERJA KEJAKSAAN RI – PENEGAKAN HUKUM DAN PELAYANAN HUKUM





Level Kinerja

Kinerja Strategis
Sektor
(Intermediate
Outcome)

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil
IK1: Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI

2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan
- IK1: Persentase peningkatan pengendalian perkara - IK2: Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum - IK3: Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara

3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal
IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal

4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel
- IK1: Indeks reformasi birokrasi - IK2: Tingkat penerapan etika profesi jaksa

Kinerja Strategis
Subsektor
(Intermediate
Outcome)

Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana cukai, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional
- IK1: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU - IK2: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU - IK3: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU - IK4: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU - IK5: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU - IK6: Tingkat keberhasilan penanganan perkara pelanggaran HAM Berat - IK7: Tingkat keberhasilan pengendalian operasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus

Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara serta pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus
- IK1: Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU - IK2: Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan, Perpajakan, Cukai, tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara)

Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata
- IK1: Tingkat keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata - IK2: Tingkat keberhasilan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata

Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara transparan, akuntabel dan profesional
- IK1: Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi - IK2: Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi - IK3: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi

Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain
- IK1: Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan - IK2: Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan - IK3: Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan - IK4: Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi - IK5: Tingkat keberhasilan pengembalian Kerugian Negara Perkara Koneksitas yang dilimpahkan ke peradilan umum

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat militer
- IK1: Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan) Tahap Penindakan - IK2: Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan) Tahap Penuntutan - IK3: Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan) Tahap Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi

Level Kinerja

Kinerja Strategis
Sektor
(Intermediate
Outcome)

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil
IK1: Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI

2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan
- IK1: Persentase peningkatan pengendalian perkara - IK2: Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum - IK3: Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara

3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal
IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal

4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel
- IK1: Indeks reformasi birokrasi - IK2: Tingkat penerapan etika profesi jaksa

Kinerja Strategis
Subsektor
(Intermediate
Outcome)

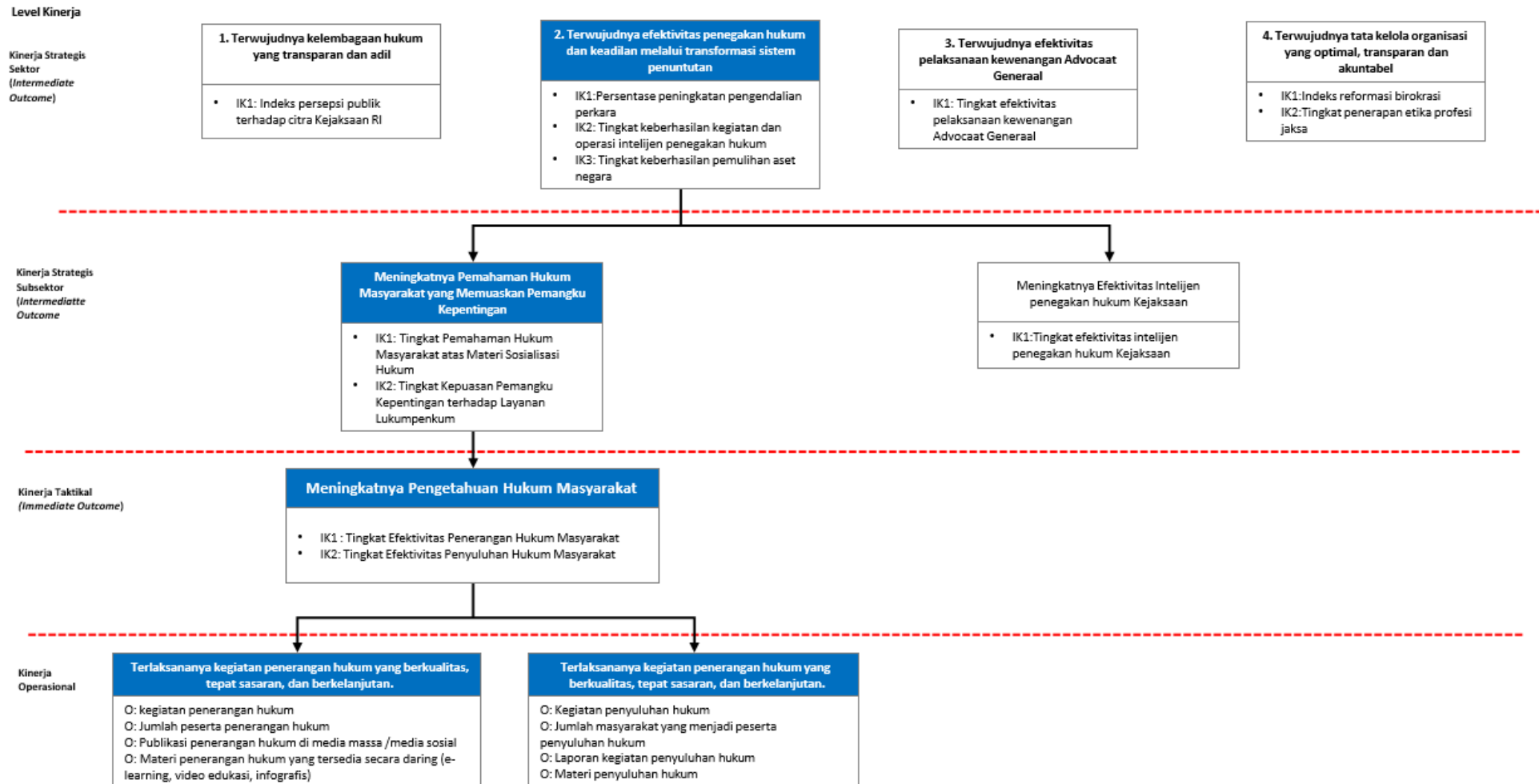
Terselenggaranya pemulihan aset yang terintegrasi
- IK1: Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset - IK2: Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana - IK3: Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana

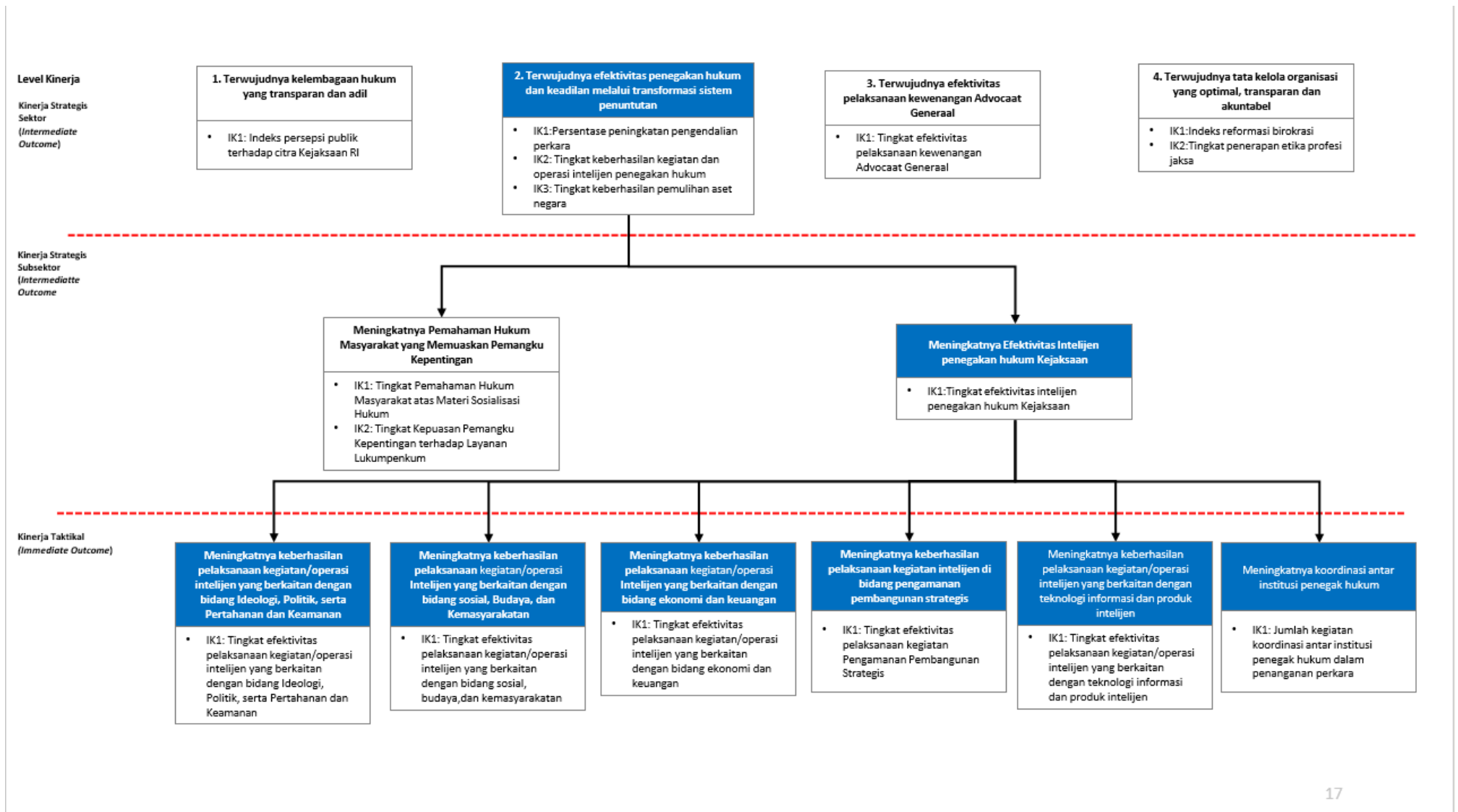
Terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang transparan, akuntabel, dan modern
- K1: Tingkat efektivitas pengelolaan Rupbasan - IK2: Tingkat efektivitas penyelesaian penyelamatan aset negara - IK3: Tingkat efektivitas pengelolaan data aset negara berbasis teknologi

Meningkatnya kualitas pelaksanaan Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara Negara
IK1: Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer

Meningkatnya keberhasilan pelayanan hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara
IK1: Indeks Persepsi atas pelayanan hukum

Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang hukum
IK1: Indeks kepuasan layanan Publik bidang hukum (Layanan hukum gratis, konsultasi hukum, bantuan hukum, pendampingan hukum, dan penyuluhan hukum)





Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽¹⁶⁾

Level Kinerja

Kinerja Strategis
Subsektor
(Intermediate
Outcome)

Meningkatnya Pemahaman Hukum Masyarakat yang Memuaskan Pemangku Kepentingan

- IK1: Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat atas Materi Sosialisasi Hukum
- IK2: Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Layanan Lukumpenkum

Meningkatnya Efektivitas Intelijen penegakan hukum Kejaksaan

- IK1: Tingkat efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan

Kinerja Taktikal
(Immediate Outcome)

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, serta Pertahanan dan Keamanan

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, serta Pertahanan dan Keamanan

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan intelijen di bidang pengamanan pembangunan strategis

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produk intelijen

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produk intelijen

Meningkatnya koordinasi antar institusi penegak hukum

- IK1: Jumlah kegiatan koordinasi antar institusi penegak hukum dalam penanganan perkara

Kinerja Operasional

Tersedianya informasi intelijen yang akurat, tepat waktu, dan relevan terkait isu ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan

O: Laporan intelijen terkait isu ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan yang disampaikan tepat waktu

Terlaksananya operasi intelijen khusus sesuai kebutuhan dan perintah operasi.

O: Kegiatan/Operasi intelijen terkait isu Ideologi, Politik, serta Keamanan yang berhasil dilaksanakan sesuai rencana.

Tersedianya laporan hasil operasi intelijen yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan strategis.

O: Laporan intelijen yang dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan oleh pimpinan/lembaga terkait.
O: Rekomendasi intelijen yang ditindaklanjuti oleh instansi/lembaga pengguna.

Terselenggaranya koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaan operasi intelijen di bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan.

O: Koordinasi/kerjasama intelijen lintas lembaga yang dilaksanakan untuk isu ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan.

Tersedianya informasi intelijen yang akurat, tepat waktu, dan relevan terkait isu sosial, budaya, dan kemasyarakatan

O: Laporan intelijen terkait isu sosial, budaya, dan kemasyarakatan yang disampaikan tepat waktu

Terlaksananya operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan sesuai kebutuhan dan perintah operasi.

O: Kegiatan/Operasi intelijen terkait isu sosial, budaya, dan kemasyarakatan yang berhasil dilaksanakan sesuai rencana.

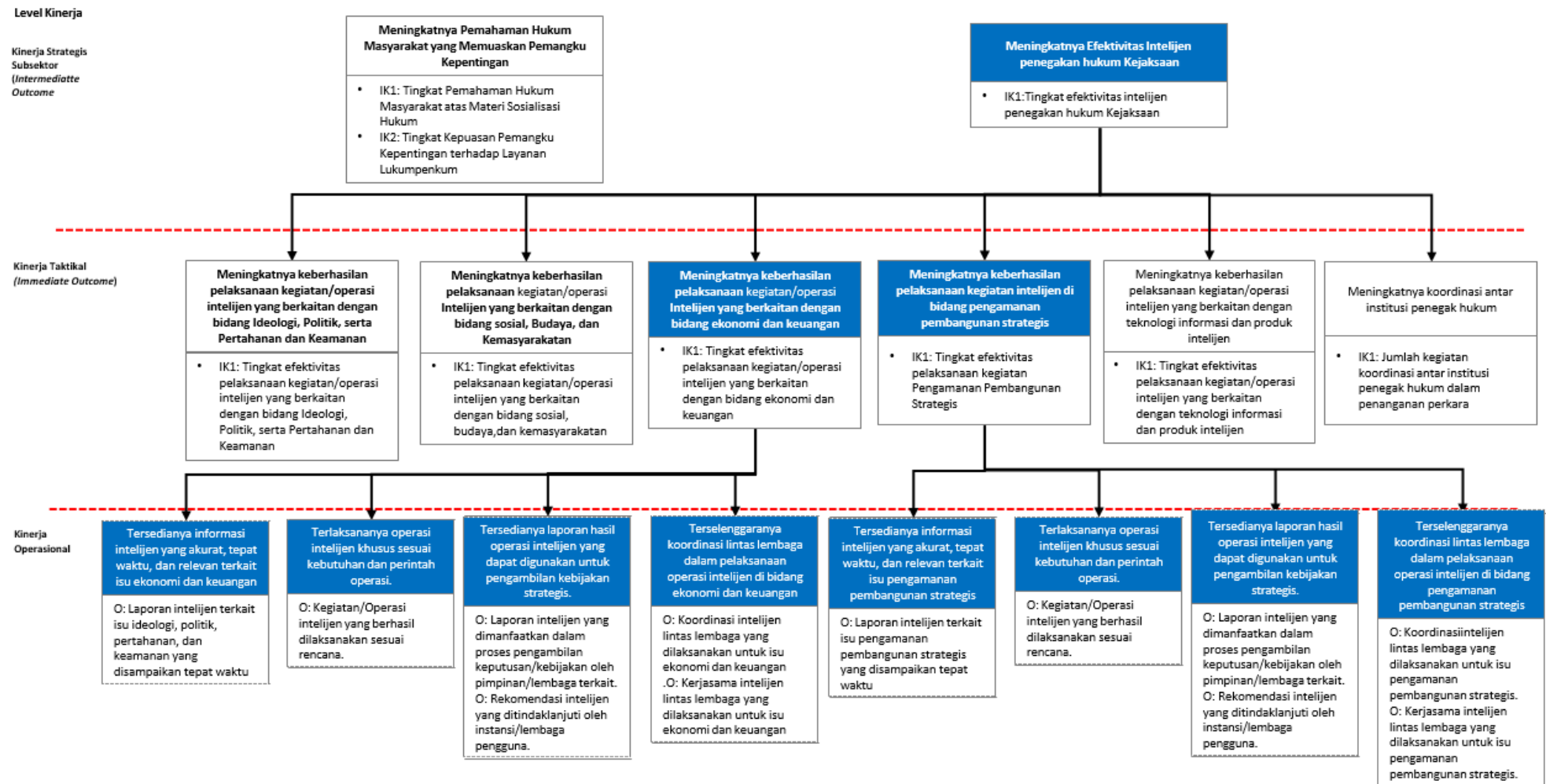
Tersedianya laporan hasil operasi intelijen yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan strategis.

O: Laporan intelijen yang dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan oleh pimpinan/lembaga terkait.
O: Rekomendasi intelijen yang ditindaklanjuti oleh instansi/lembaga pengguna.

Terselenggaranya koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaan operasi intelijen di bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan

O: Koordinasi intelijen lintas lembaga yang dilaksanakan untuk isu sosial, budaya, dan kemasyarakatan
O: Kerjasama intelijen lintas lembaga yang dilaksanakan untuk isu sosial, budaya, dan kemasyarakatan

Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽¹⁷⁾



Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽¹⁸⁾

Level Kinerja

Kinerja Strategis
Subsektor
(Intermediate
Outcome)

Meningkatnya Pemahaman Hukum Masyarakat yang Memuaskan Pemangku Kepentingan

- IK1: Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat atas Materi Sosialisasi Hukum
- IK2: Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Layanan Lukumpenkum

Meningkatnya Efektivitas Intelijen penegakan hukum Kejaksaan

- IK1: Tingkat efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan

Kinerja Taktikal
(Immediate Outcome)

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, serta Pertahanan dan Keamanan

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, serta Pertahanan dan Keamanan

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan intelijen di bidang pengamanan pembangunan strategis

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produk intelijen

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produk intelijen

Meningkatnya koordinasi antar institusi penegak hukum

- IK1: Jumlah kegiatan koordinasi antar institusi penegak hukum dalam penanganan perkara

Kinerja Operasional

Tersedianya sistem dan aplikasi teknologi informasi pendukung operasi intelijen.

O: Sistem/aplikasi TI intelijen yang dipelihara/dikembangkan/dioperasionalkan

Tersedianya produk intelijen berbasis teknologi informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu.

O: Produk intelijen berbasis TI (laporan, analisis, rekomendasi) yang dihasilkan.
O: Laporan intelijen berbasis TI yang disampaikan tepat waktu.

Terlaksananya operasi intelijen yang memanfaatkan teknologi informasi

O: Produk intelijen berbasis TI yang dimanfaatkan oleh pimpinan/instansi pengguna.
O: Kegiatan/ operasi intelijen berbasis TI yang berhasil dilaksanakan sesuai rencana.

Terselenggaranya penguatan kapasitas SDM intelijen dalam pemanfaatan teknologi informasi.

O: SDM intelijen yang dilatih/tersertifikasi dalam pemanfaatan TI untuk operasi intelijen.

Terwujudnya mekanisme pengamanan data, jaringan, dan produk intelijen berbasis TI.

O: Insiden keamanan informasi intelijen yang dapat ditangani dalam periode tertentu.

Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽¹⁹⁾

Level Kinerja

Kinerja Strategis
Subsektor
(Intermediate
Outcome)

Meningkatnya Pemahaman Hukum Masyarakat yang Memuaskan Pemangku Kepentingan

- IK1: Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat atas Materi Sosialisasi Hukum
- IK2: Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Layanan Lukumpenkum

Meningkatnya Efektivitas Intelijen penegakan hukum Kejaksaan

- IK1: Tingkat efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan

Kinerja Taktikal
(Immediate Outcome)

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, serta Pertahanan dan Keamanan

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, serta Pertahanan dan Keamanan

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan intelijen di bidang pengamanan pembangunan strategis

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produk intelijen

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produk intelijen

Meningkatnya koordinasi antar institusi penegak hukum

- IK1: Jumlah kegiatan koordinasi antar institusi penegak hukum dalam penanganan perkara

Kinerja Operasional

Terselenggaranya forum koordinasi rutin antar institusi penegak hukum.

O: Rapat/ pertemuan koordinasi antar institusi penegak hukum yang dilaksanakan.
O: Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti oleh masing-masing institusi.

Terbentuknya mekanisme/protokol kerja sama lintas institusi penegak hukum.

O: Dokumen mekanisme/protokol kerja sama lintas institusi yang ditetapkan dan dijalankan.

Tersusunnya kesepakatan/nota kesepahaman (MoU) dalam rangka peningkatan koordinasi.

O: Kesepakatan/nota kesepahaman yang ditandatangani/ditindaklanjuti

Tersedianya sistem pertukaran data dan informasi antar institusi penegak hukum.

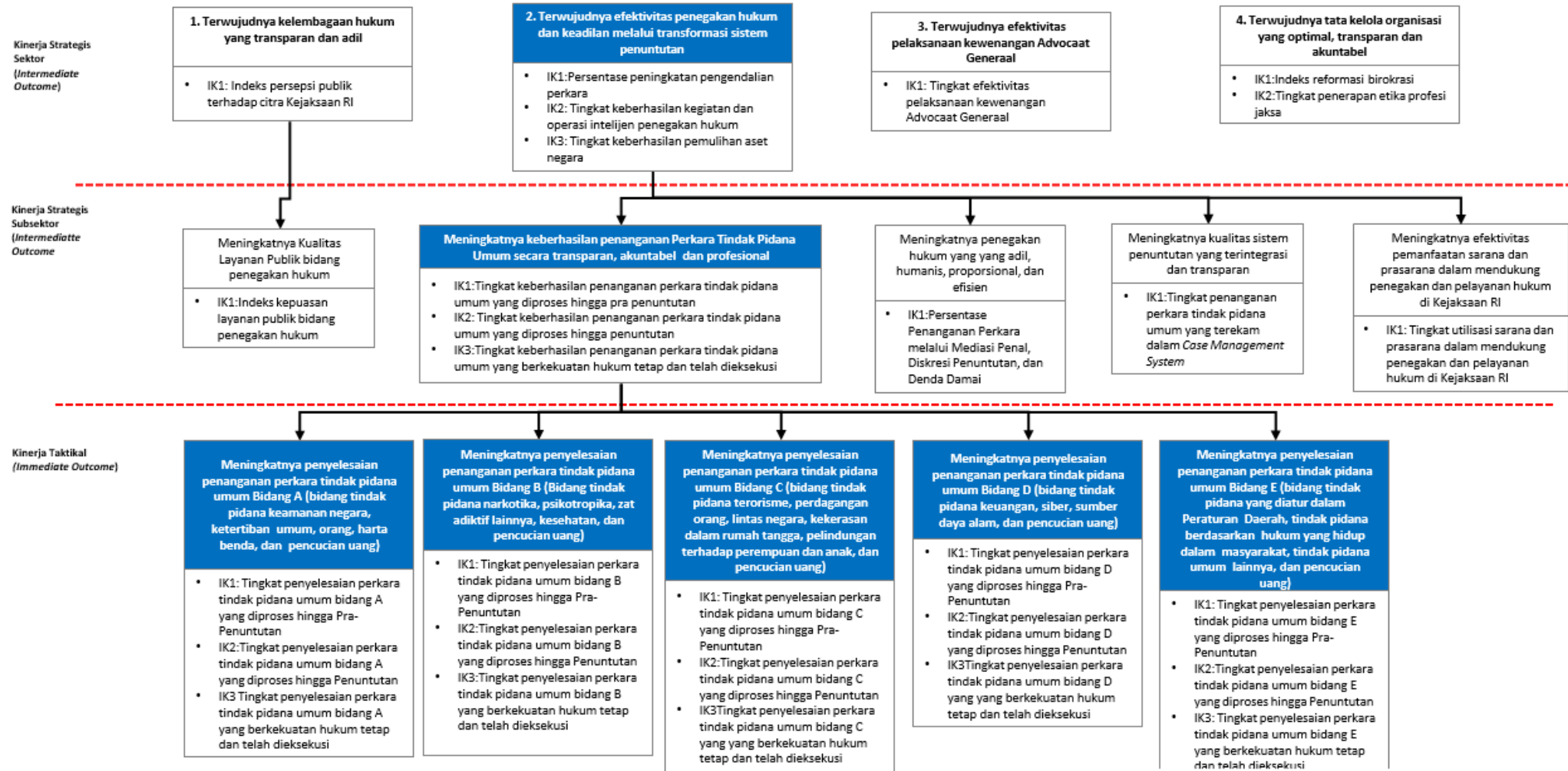
O: Frekuensi pertukaran data/informasi hukum antar institusi penegak hukum.
O: Institusi penegak hukum yang terhubung dalam sistem pertukaran data dan informasi
O: Modul/fungsi sistem pertukaran data yang sudah berfungsi sesuai desain

Terlaksananya operasi gabungan atau penanganan kasus secara kolaboratif.

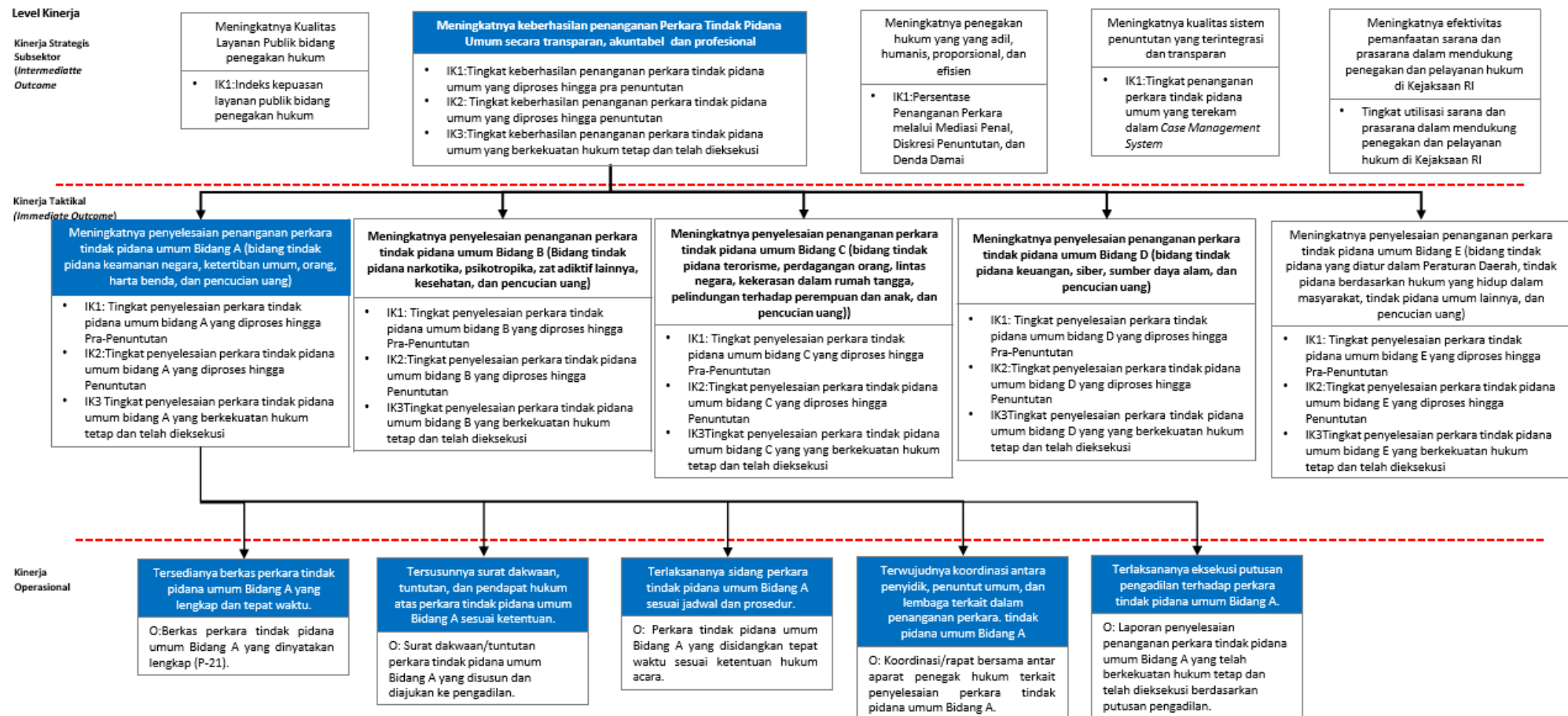
O: Laporan pelaksanaan operasi gabungan/penanganan kasus bersama yang dilaksanakan.

Pohon Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (20)

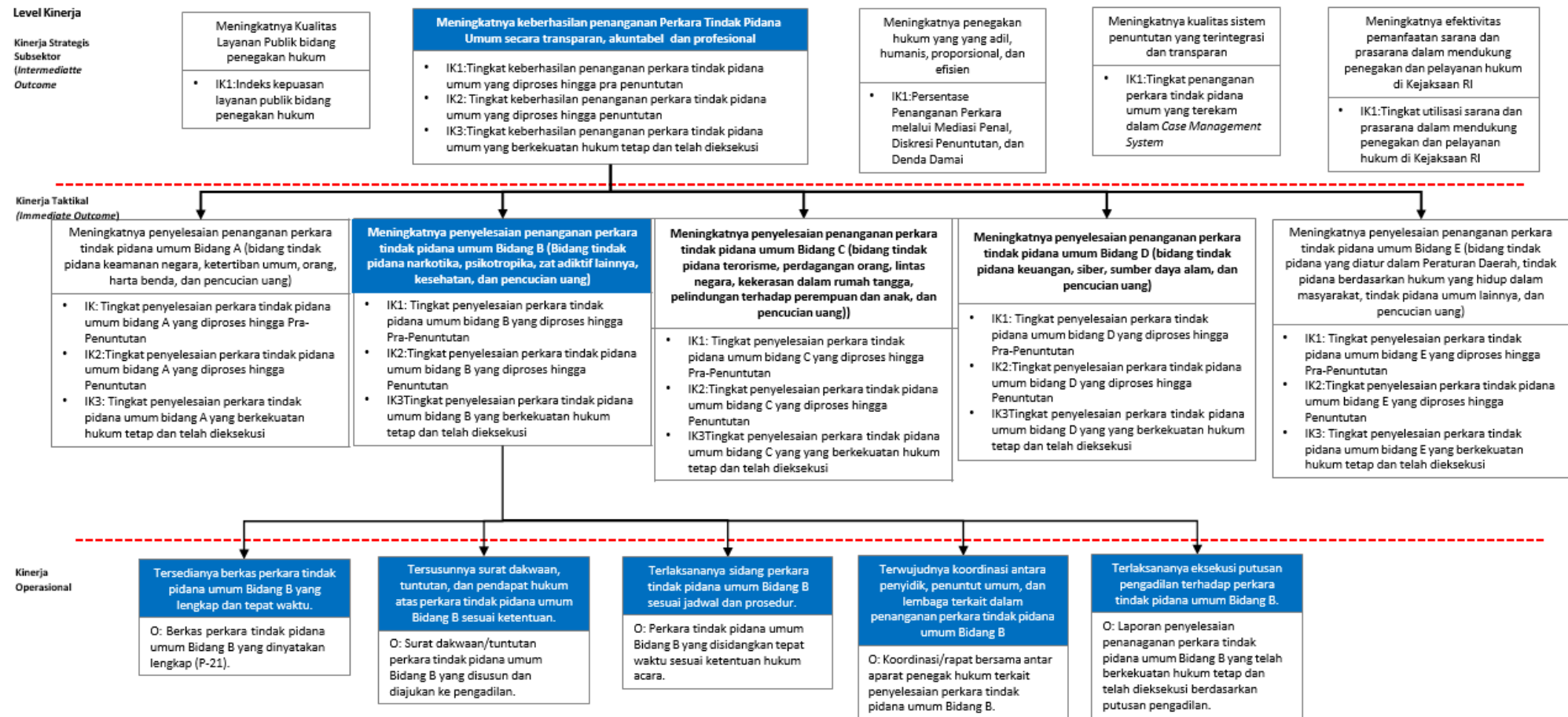
Level Kinerja



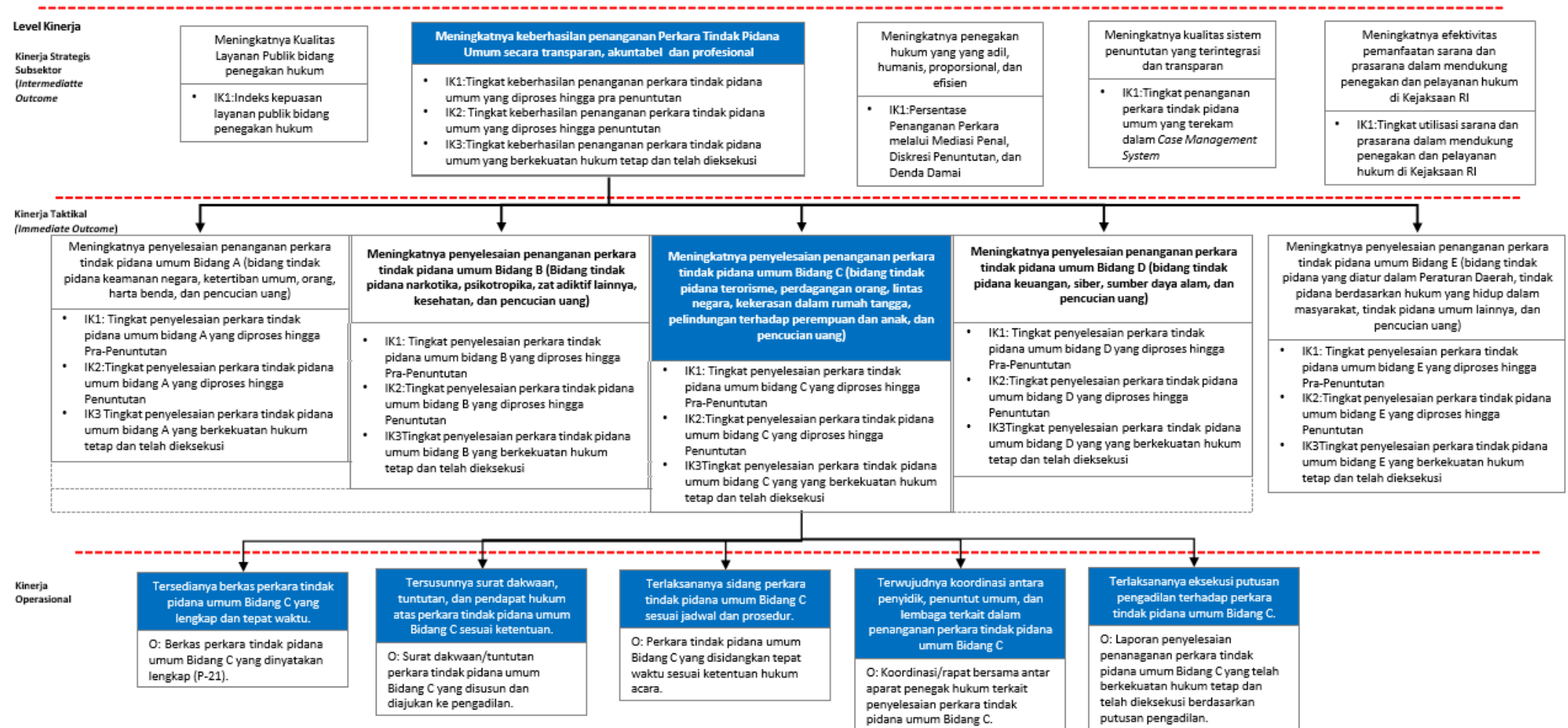
Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽²¹⁾



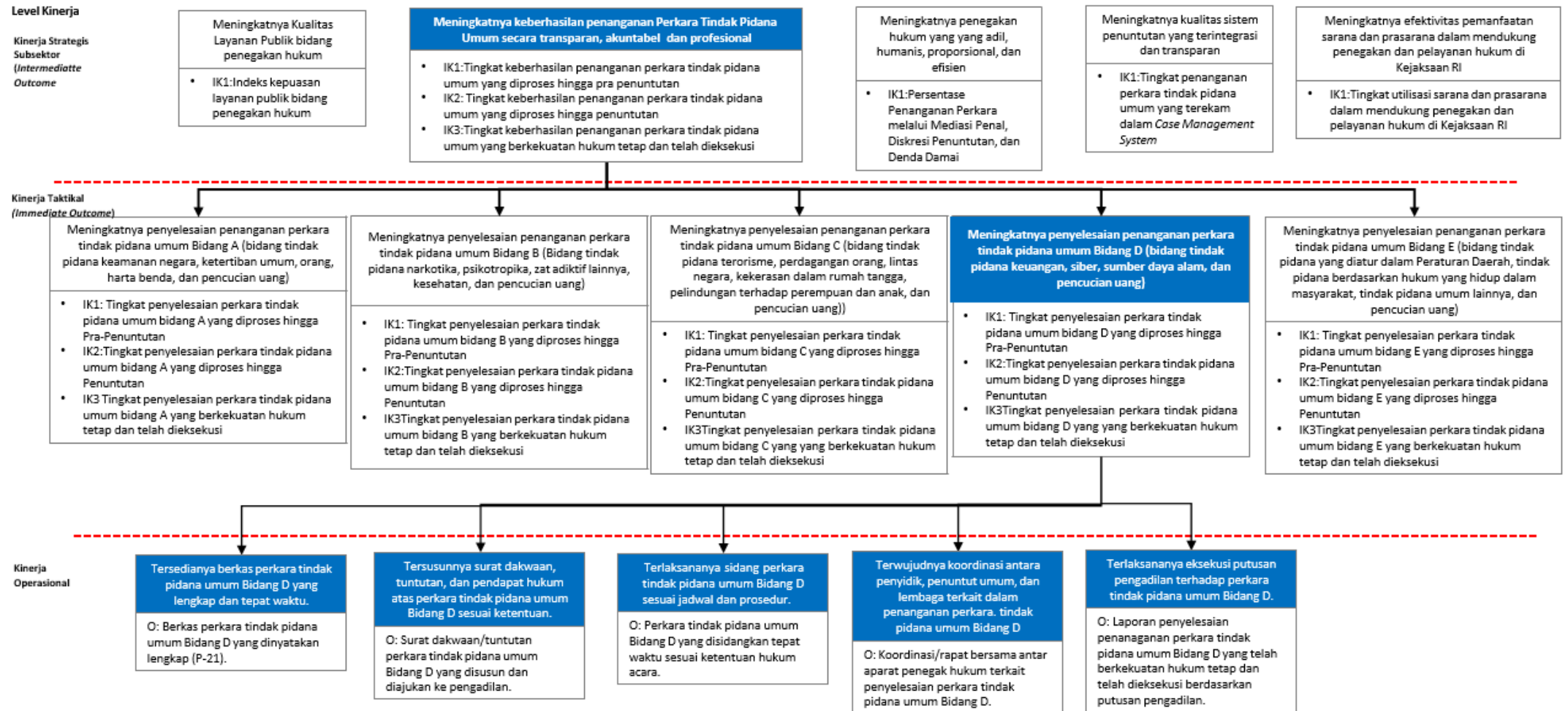
Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (22)



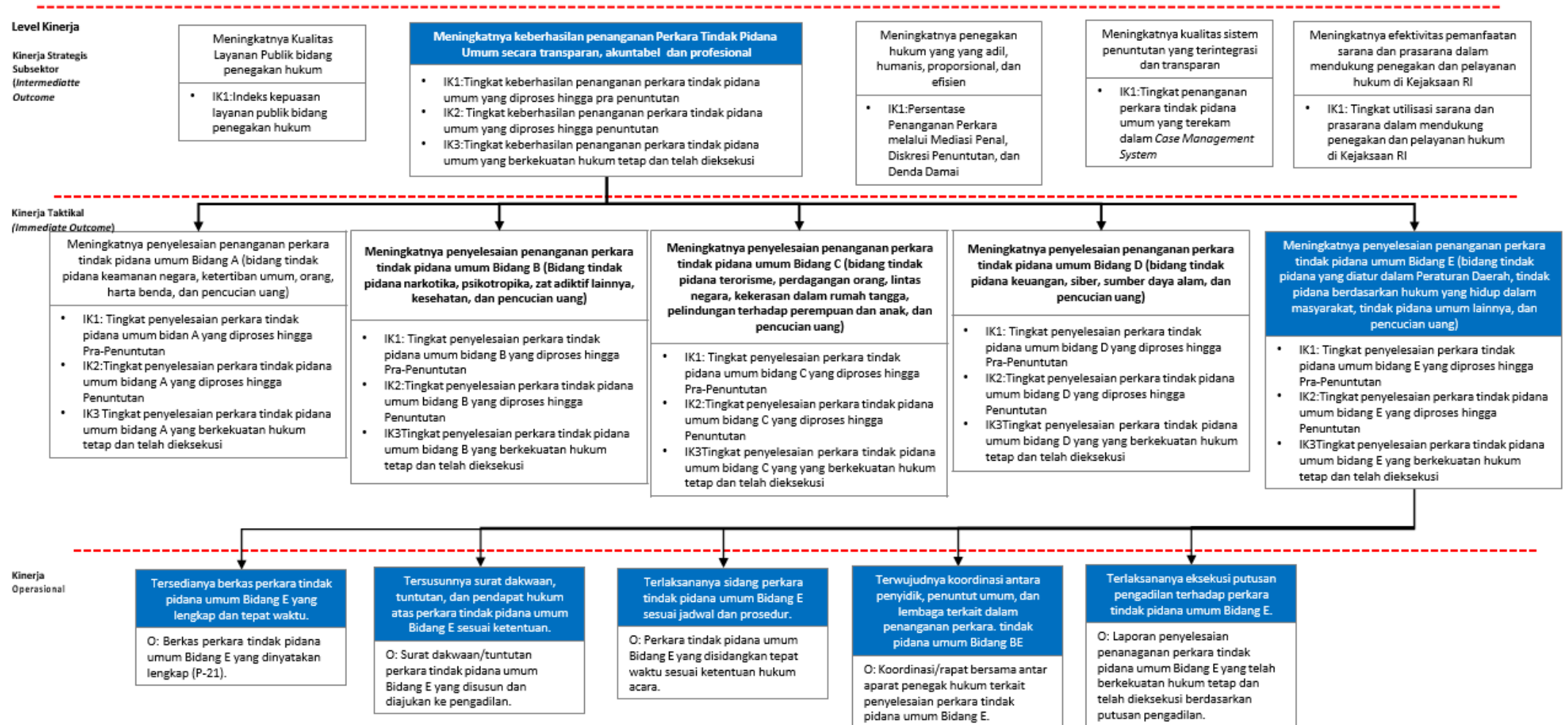
Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽²³⁾



Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽²⁴⁾

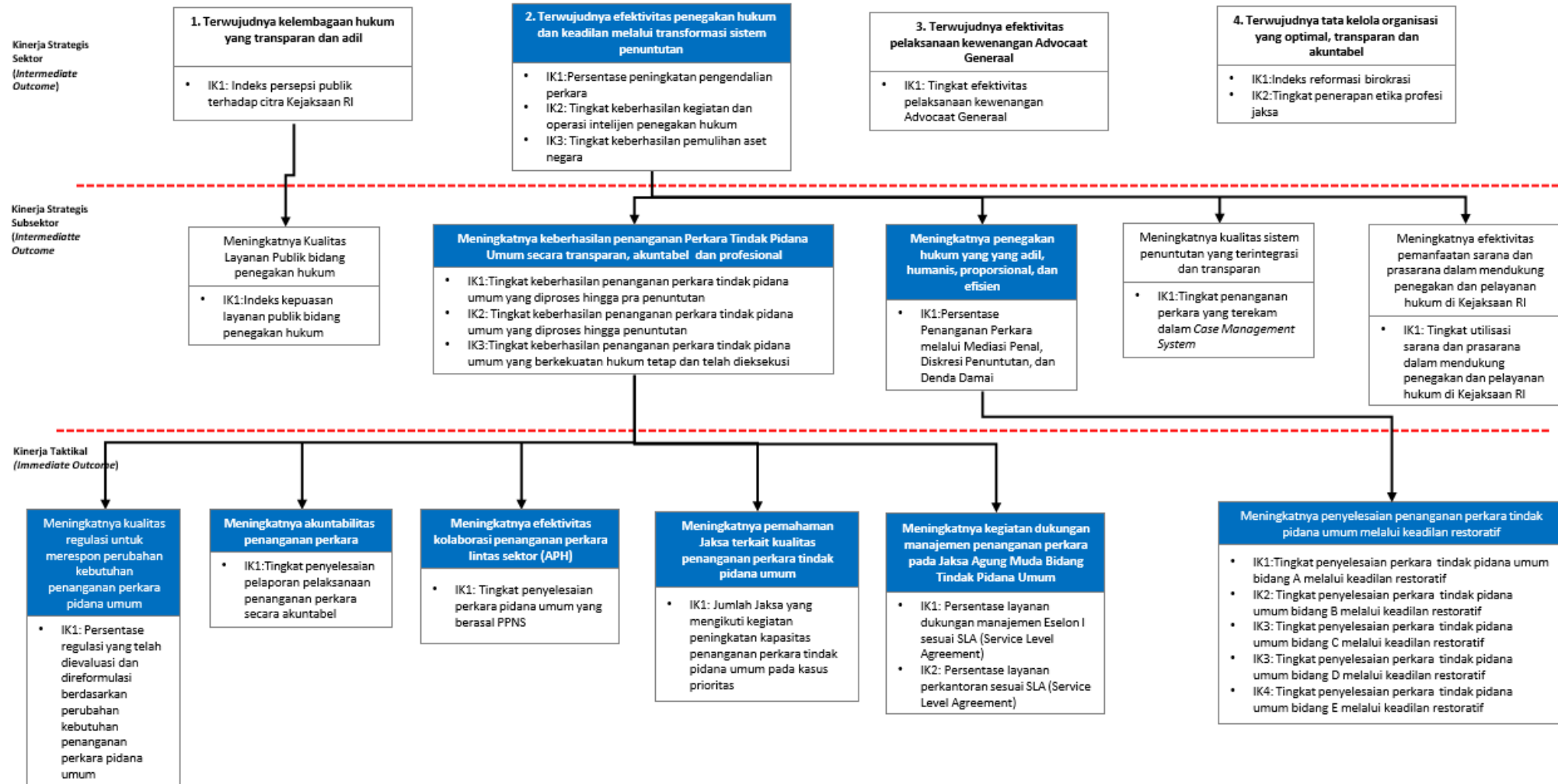


Pohon Kinerja Kejaksaaan Republik Indonesia (25)

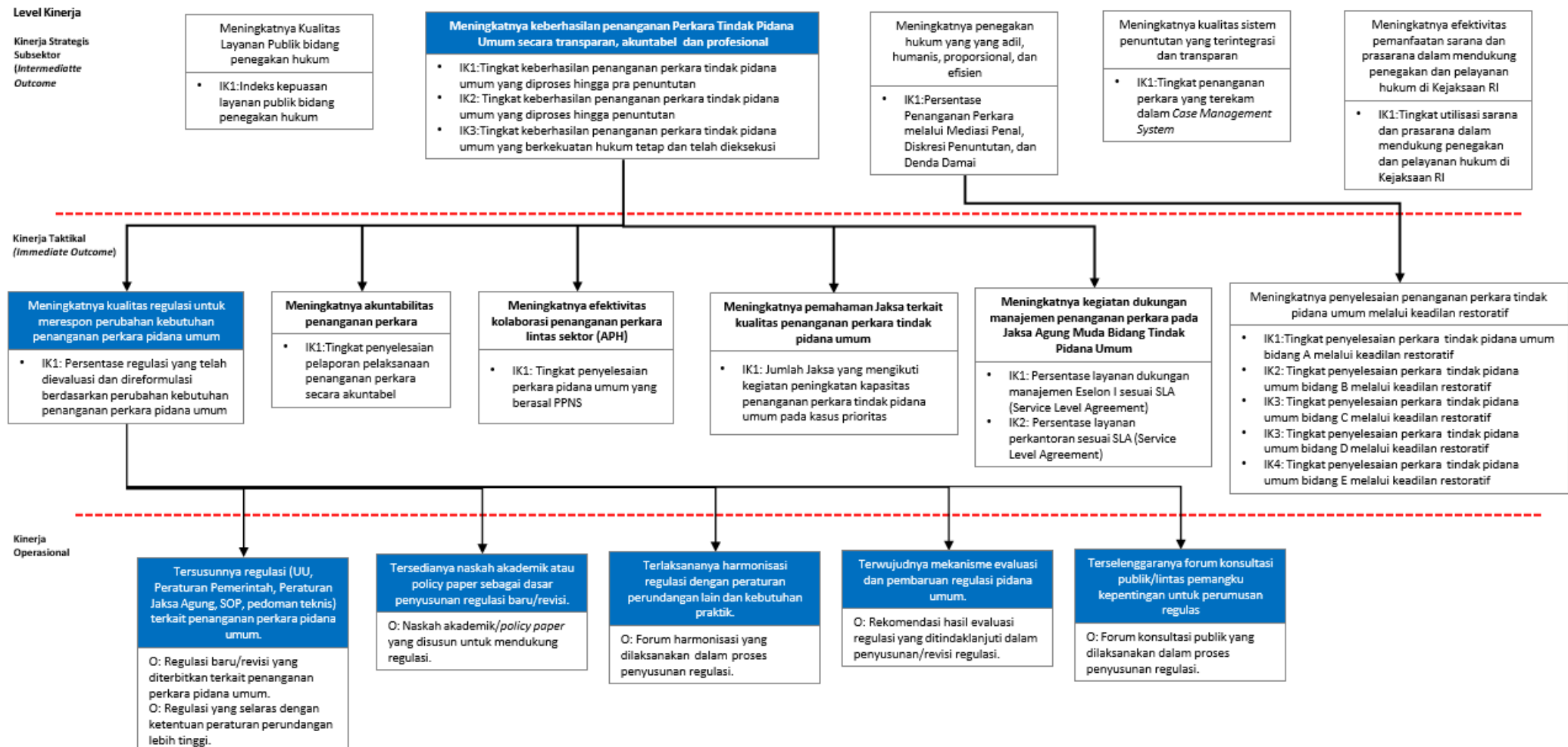


Pohon Kinerja Kejaksaaan Republik Indonesia ⁽²⁶⁾

Level Kinerja



Pohon Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽²⁷⁾



Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽²⁸⁾

Level Kinerja

Kinerja Strategis
Subsektor
(Intermediate
Outcome)

Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum

- IK1: Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum

Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana Umum secara transparan, akuntabel dan profesional

- IK1: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan
- IK2: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan
- IK3: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi

Meningkatnya penegakan hukum yang adil, humanis, proporsional, dan efisien

- IK1: Persentase Penanganan Perkara melalui Mediasi Penal, Diskresi Penuntutan, dan Denda Damai

Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan

- IK1: Tingkat penanganan perkara yang terekam dalam Case Management System

Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI

- IK1: Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI

Kinerja Taktikal
(Immediate Outcome)

Meningkatnya kualitas regulasi untuk merespon perubahan kebutuhan penanganan perkara pidana umum

- IK1: Persentase regulasi yang telah dievaluasi dan direformulasi berdasarkan perubahan kebutuhan penanganan perkara pidana umum

Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara

- IK1: Tingkat penyelesaian pelaporan pelaksanaan penanganan perkara secara akuntabel

Meningkatnya efektivitas kolaborasi penanganan perkara lintas sektor (APH)

- IK1: Tingkat penyelesaian perkara pidana umum yang berasal PPNS

Meningkatnya pemahaman Jaksa terkait kualitas penanganan perkara tindak pidana umum

- IK1: Jumlah Jaksa yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas penanganan perkara tindak pidana umum pada kasus prioritas

Meningkatnya kegiatan dukungan manajemen penanganan perkara pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

- IK1: Persentase layanan dukungan manajemen Eselon I sesuai SLA (Service Level Agreement)
- IK2: Persentase layanan perkantoran sesuai SLA (Service Level Agreement)

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum melalui keadilan restoratif

- IK1: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang A melalui keadilan restoratif
- IK2: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang B melalui keadilan restoratif
- IK3: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang C melalui keadilan restoratif
- IK3: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang D melalui keadilan restoratif
- IK4: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang E melalui keadilan restoratif

Kinerja Operasional

Tersedianya standar operasional prosedur (SOP) penanganan perkara yang jelas dan terdokumentasi.

O: SOP/pedoman teknis penanganan perkara yang ditetapkan/diperbarui.

Tersusunnya laporan penanganan perkara secara periodik dan terbuka untuk pengawasan internal maupun eksternal.

O: Laporan penanganan perkara yang disusun dan dipublikasikan sesuai jadwal.

Terlaksananya audit/monitoring dan evaluasi penanganan perkara sesuai prinsip akuntabilitas.

O: Rekomendasi hasil audit/monitoring penanganan perkara yang ditindaklanjuti.

O: Perkara yang ditangani sesuai SOP

Terdokumentasinya penanganan perkara dalam sistem informasi perkara secara transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

O: Perkara yang telah terinput dan tervalidasi dalam sistem informasi perkara secara akurat dan tepat waktu.

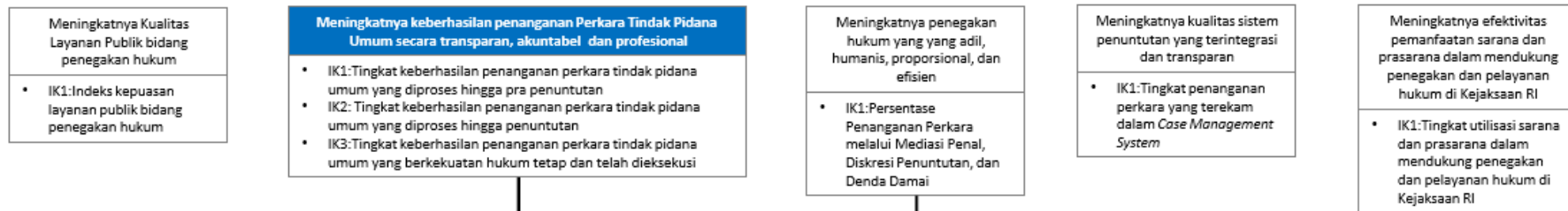
Terlaksananya mekanisme pengaduan masyarakat terkait penanganan perkara.

O: Laporan penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terkait dugaan penyimpangan dalam penanganan perkara.

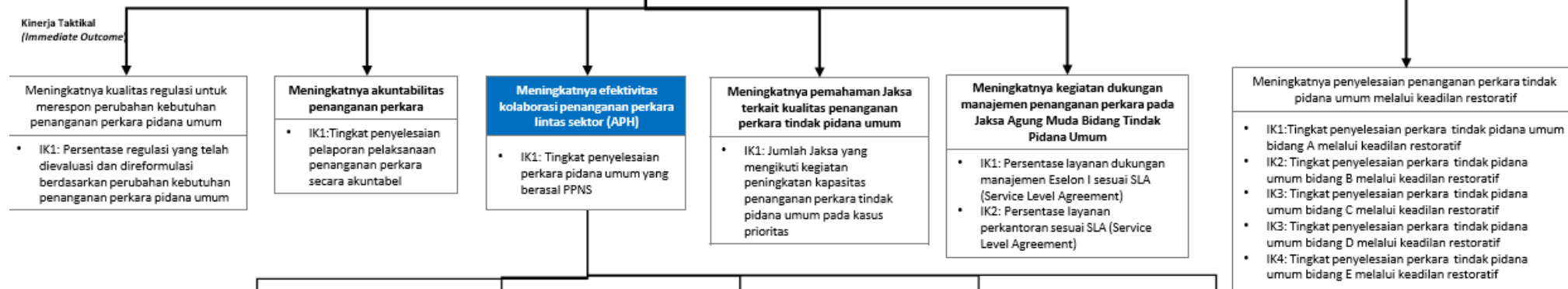
Pohon Kinerja Kejaksanaan Republik Indonesia ⁽²⁹⁾

Level Kinerja

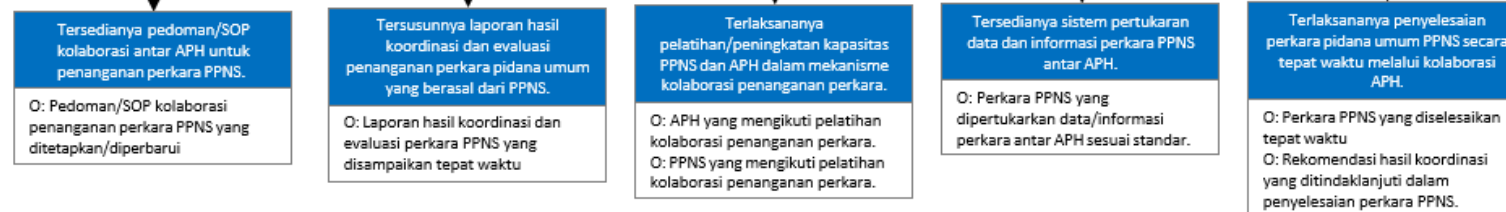
Kinerja Strategis
Subsektor
(Intermediate
Outcome)



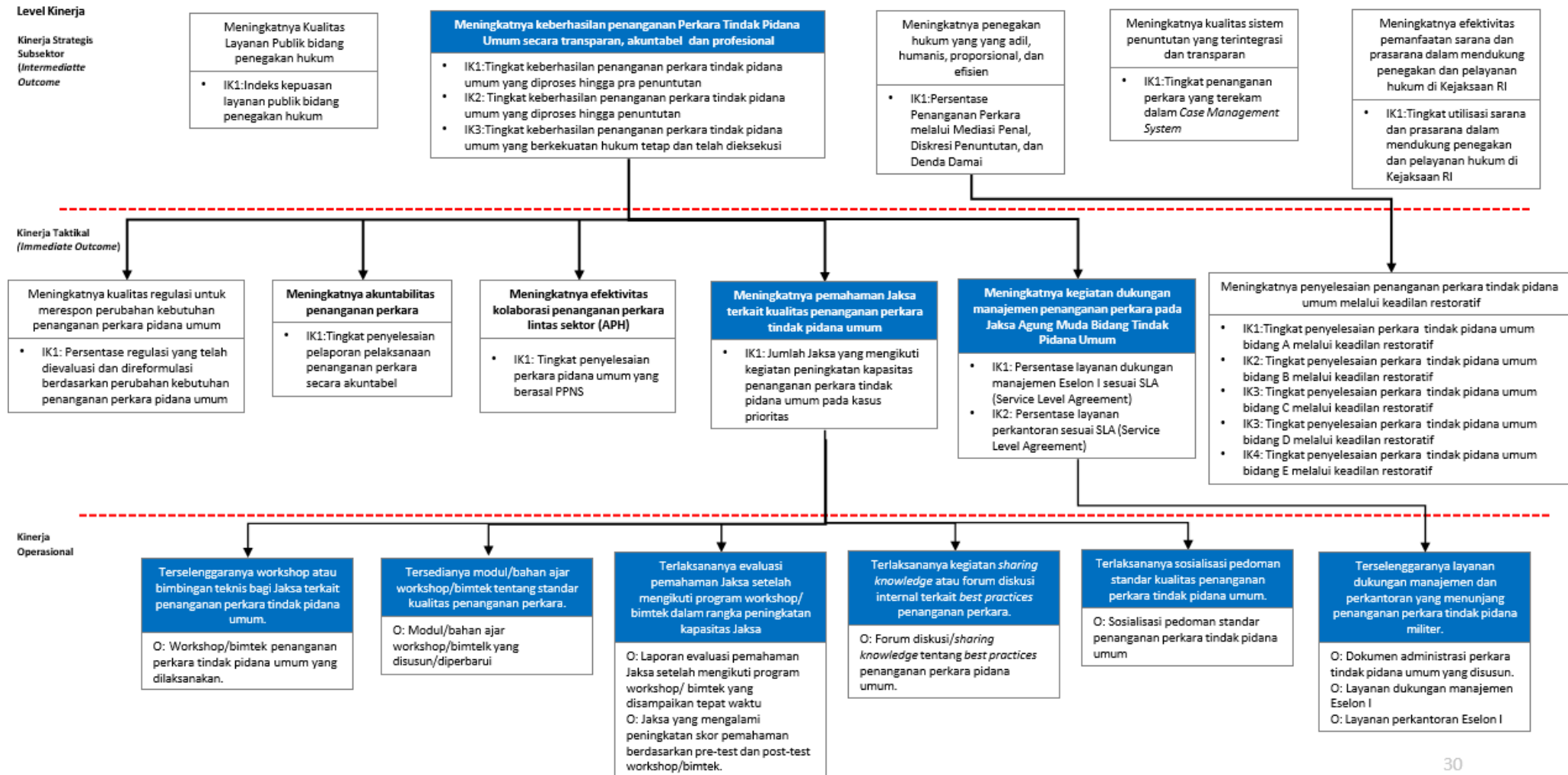
Kinerja Taktikal
(Immediate Outcome)



Kinerja Operasional



Pohon Kinerja Kejaksanaan Republik Indonesia ⁽³⁰⁾



Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽³¹⁾

Level Kinerja

Kinerja Strategis
Subsektor
(Intermediate
Outcome)

Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum

- IK1: Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum

Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana Umum secara transparan, akuntabel dan profesional

- IK1: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan
- IK2: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan
- IK3: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi

Meningkatnya penegakan hukum yang adil, humanis, proporsional, dan efisien

- IK1: Persentase Penanganan Perkara melalui Mediasi Penal, Diskresi Penuntutan, dan Denda Damai

Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan

- IK1: Tingkat penanganan perkara yang terekam dalam *Case Management System*

Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI

- IK1: Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI

Kinerja Taktikal (Immediate Outcome)

Meningkatnya kualitas regulasi untuk merespon perubahan kebutuhan penanganan perkara pidana umum

- IK1: Persentase regulasi yang telah dievaluasi dan direformulasi berdasarkan perubahan kebutuhan penanganan perkara pidana umum

Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara

- IK1: Tingkat penyelesaian laporan pelaksanaan penanganan perkara secara akuntabel

Meningkatnya efektivitas kolaborasi penanganan perkara lintas sektor (APH)

- IK1: Tingkat penyelesaian perkara pidana umum yang berasal PPNS

Meningkatnya pemahaman Jaksa terkait kualitas penanganan perkara tindak pidana umum

- IK1: Jumlah Jaksa yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas penanganan perkara tindak pidana umum pada kasus prioritas

Meningkatnya kegiatan dukungan manajemen penanganan perkara pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

- IK1: Persentase layanan dukungan manajemen Eselon I sesuai SLA (Service Level Agreement)
- IK2: Persentase layanan perkantoran sesuai SLA (Service Level Agreement)

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum melalui keadilan restoratif

- IK1: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang A melalui keadilan restoratif
- IK2: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang B melalui keadilan restoratif
- IK3: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang C melalui keadilan restoratif
- IK3: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang D melalui keadilan restoratif
- IK4: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang E melalui keadilan restoratif

Kinerja Operasional

Tersedianya pedoman teknis penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana umum.

O: Pedoman/standar operasional (SOP) keadilan restoratif yang disusun dan diterapkan.

Tertindakannya sosialisasi dan bimbingan teknis bagi Jaksa mengenai keadilan restoratif.

O: Sosialisasi/bimtek tentang penerapan keadilan restoratif yang diselenggarakan.
O: Jaksa yang mengikuti pelatihan/sosialisasi terkait keadilan restoratif.

Tertindakannya forum koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) dan stakeholder terkait penerapan keadilan restoratif.

O: Forum koordinasi yang dilaksanakan dengan APH dan stakeholder terkait.

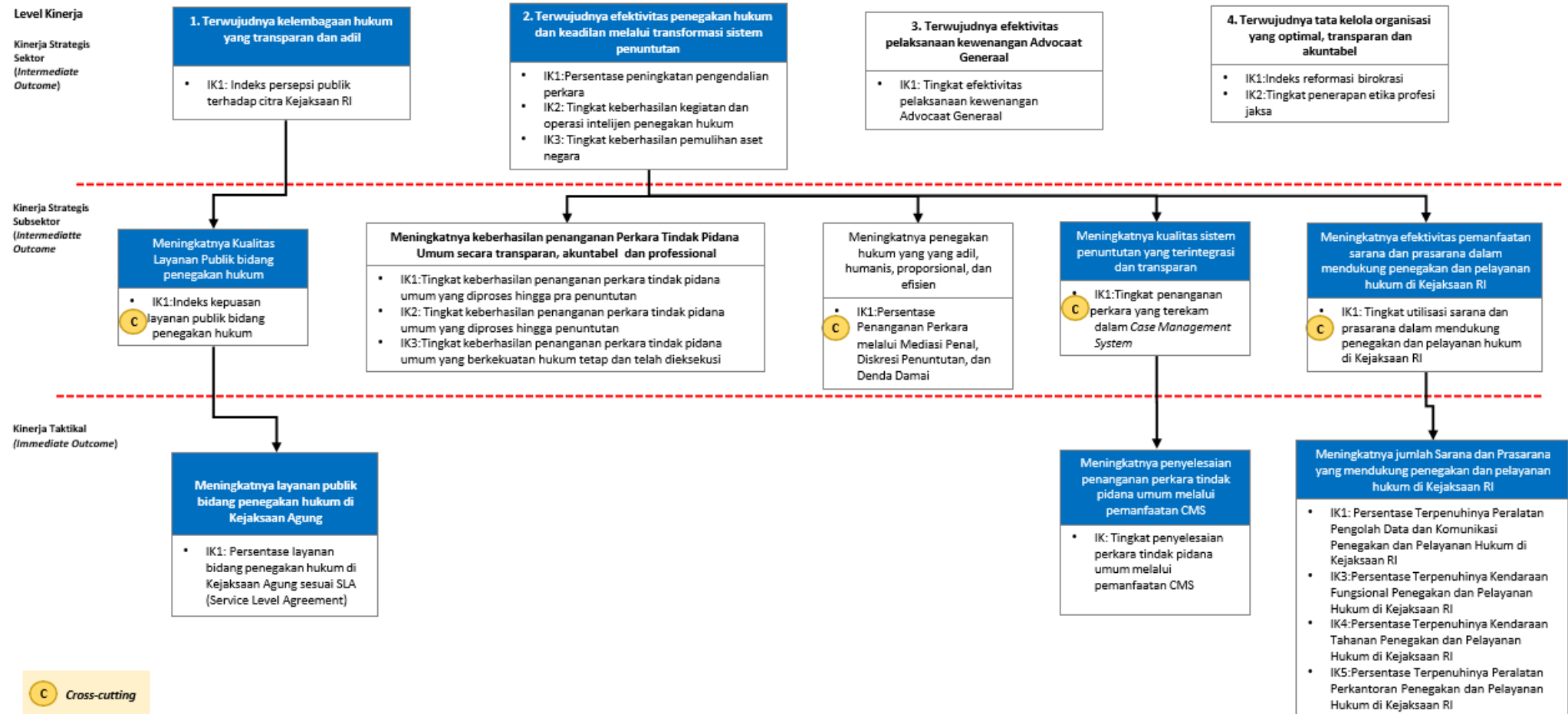
Tertindakannya penanganan perkara tindak pidana umum melalui mekanisme keadilan restoratif

O: Perkara tindak pidana umum yang difasilitasi melalui mekanisme keadilan restoratif.

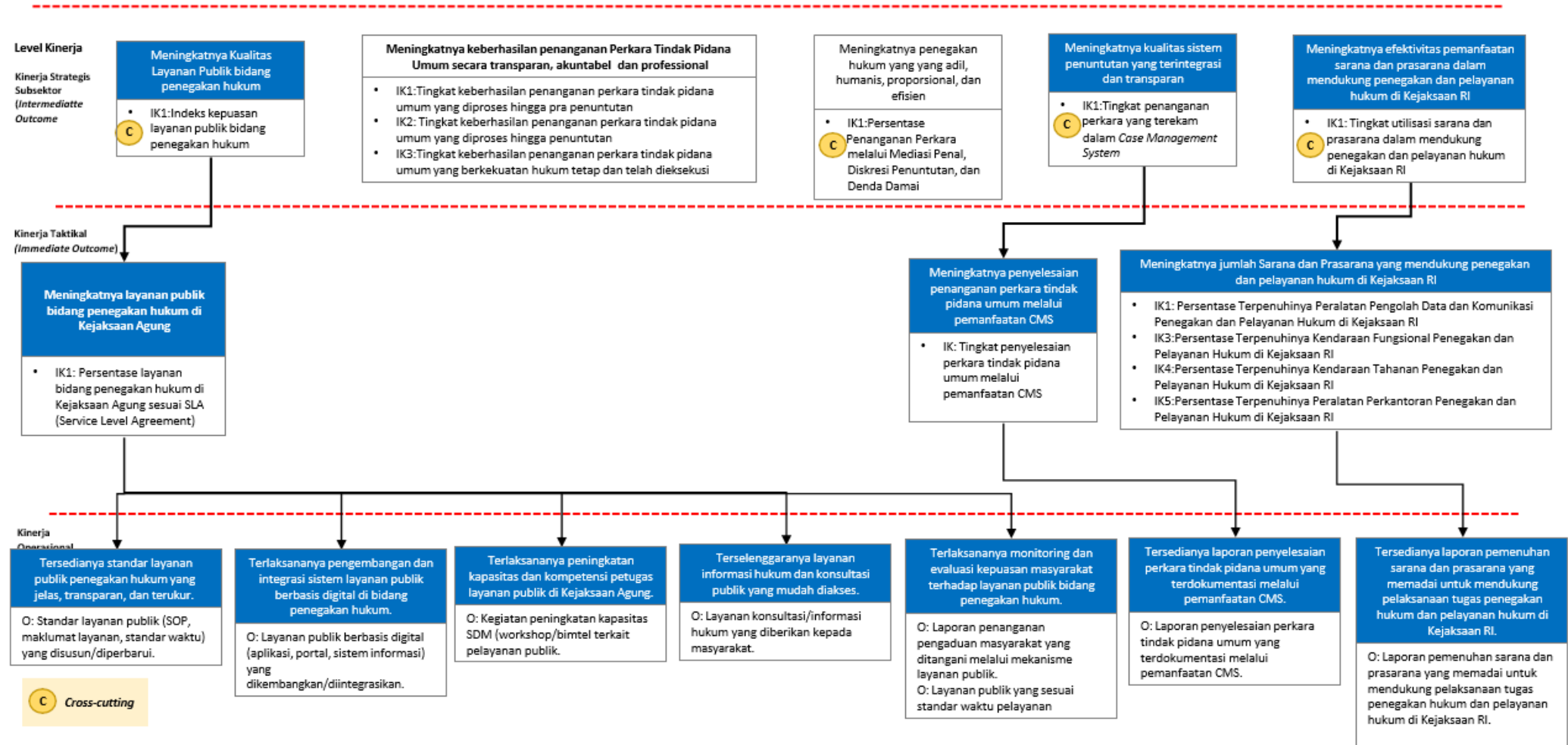
Tersusunnya laporan evaluasi dan monitoring penerapan keadilan restoratif.

O: Laporan evaluasi dan monitoring penerapan keadilan restoratif yang disampaikan tepat waktu

Pohon Kinerja Kejaksaaan Republik Indonesia ⁽³²⁾



Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽³³⁾



Pohon Kinerja Kejaksanaan Republik Indonesia ⁽³⁴⁾

Level Kinerja

Kinerja Strategis
Sektor
(Intermediate
Outcome)

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil

- IK1: Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksanaan RI

2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan

- IK1: Persentase peningkatan pengendalian perkara
- IK2: Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum
- IK3: Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara

3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal

4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel

- IK1: Indeks reformasi birokrasi
- IK2: Tingkat penerapan etika profesi jaksa

Kinerja Strategis
Subsektor
(Intermediate
Outcome)

Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana cukai, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional

- IK1: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU
- IK2: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU
- IK3: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU
- IK4: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU
- IK5: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU
- IK6: Tingkat keberhasilan penanganan perkara pelanggaran HAM Berat
- IK7: Tingkat keberhasilan pengendalian operasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus

Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara serta pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus

- IK1: Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU
- IK2: Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan, Perpajakan, Cukai, tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara)

Kinerja Taktikal

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU

- IK1: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan
- IK2: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan
- IK3: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan
- IK4: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan
- IK5: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang *Inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) dan telah dieksekusi

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU

- IK1: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap prapenuntutan
- IK2: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan
- IK3: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang *Inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) dan telah dieksekusi

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU

- IK1: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap prapenuntutan
- IK2: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap penuntutan
- IK3: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang *Inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) dan telah dieksekusi

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU

- IK1: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap prapenuntutan
- IK2: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan
- IK3: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang *Inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) dan telah dieksekusi

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU

- IK1: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyelidikan
- IK2: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyidikan
- IK3: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap prapenuntutan
- IK4: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan
- IK5: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang *Inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) dan telah dieksekusi

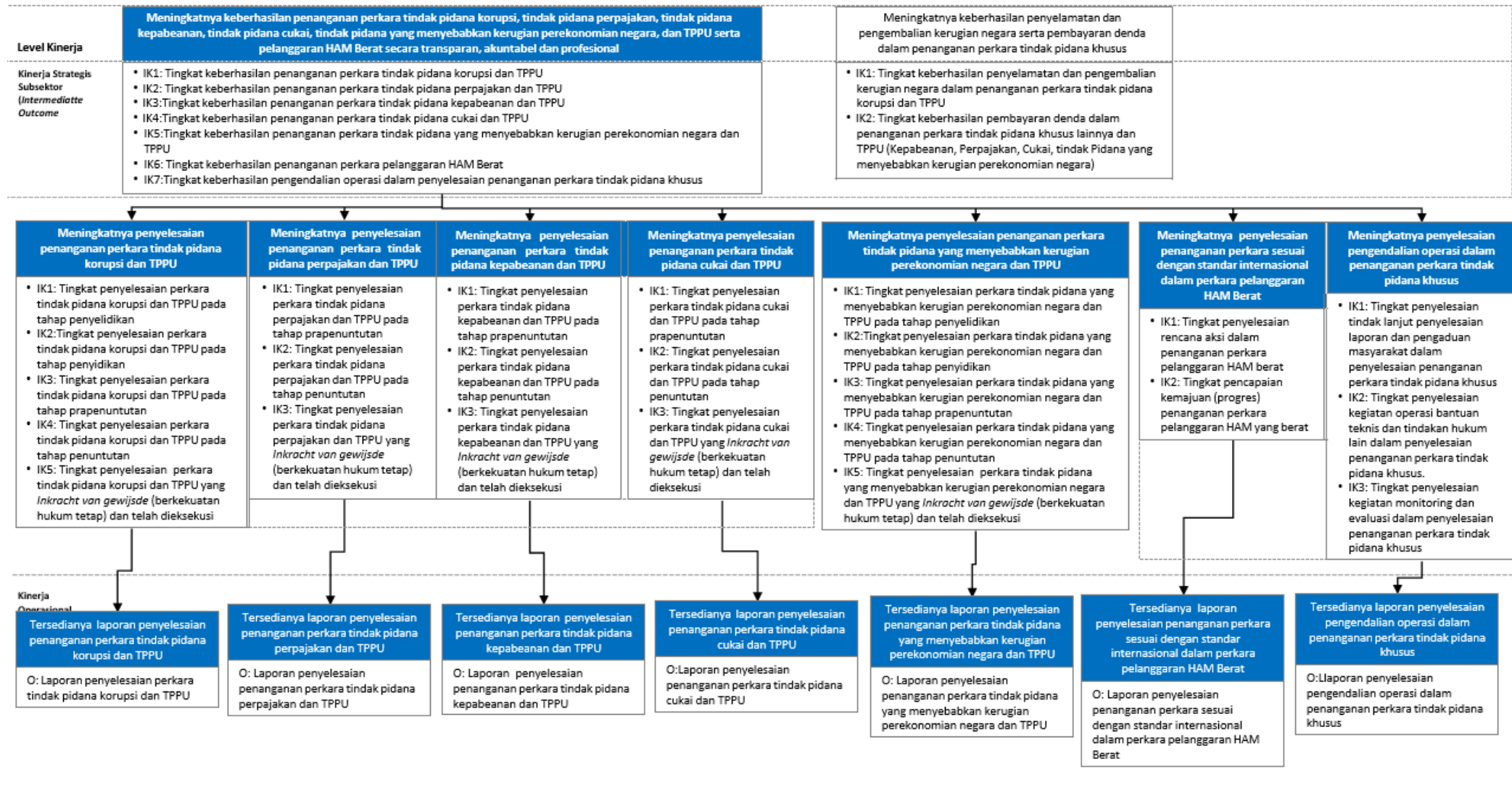
Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara sesuai dengan standar internasional dalam perkara pelanggaran HAM Berat

- IK1: Tingkat penyelesaian rencana aksi dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat
- IK2: Tingkat pencapaian kemajuan (progres) penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat

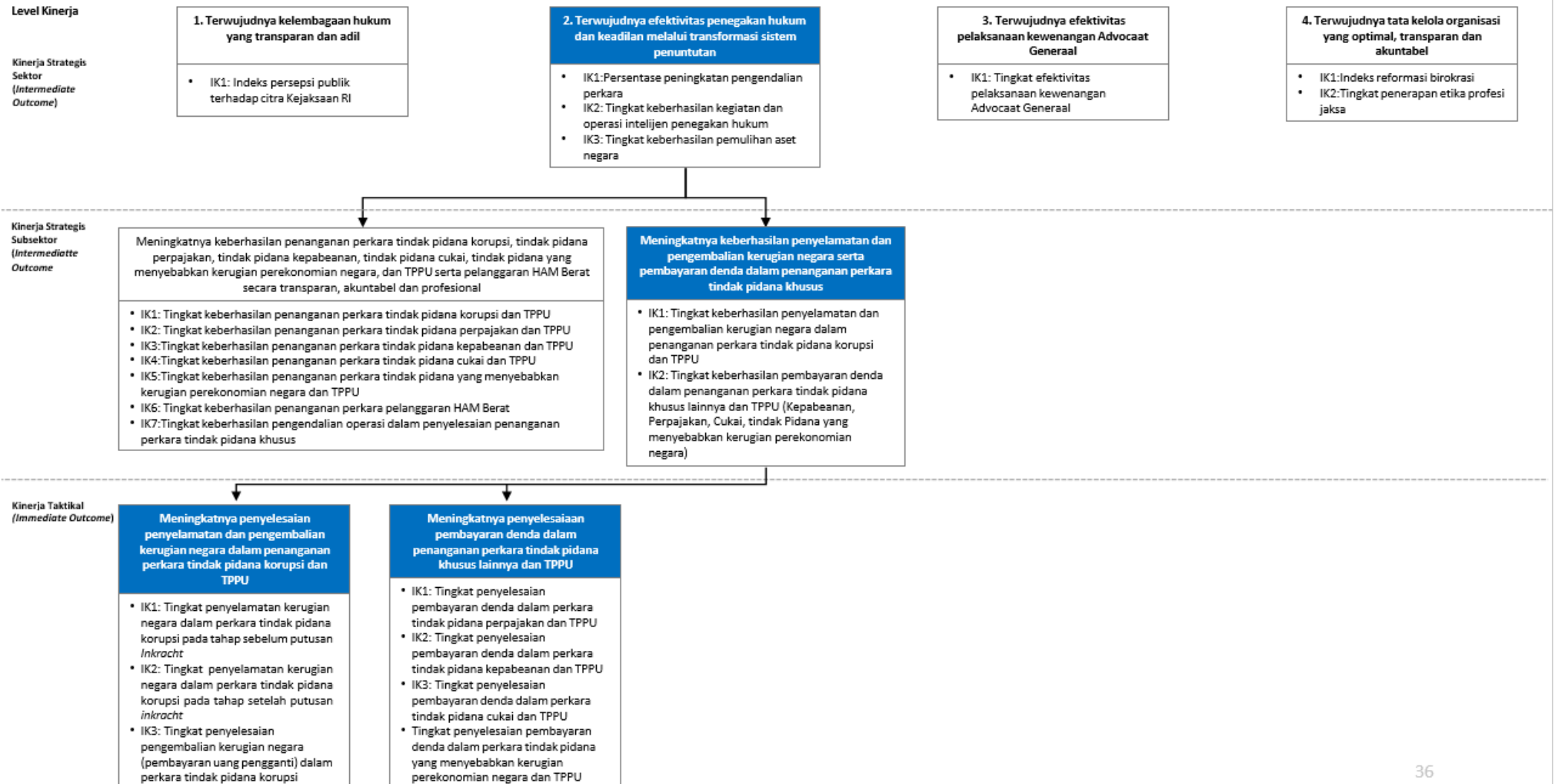
Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus

- IK1: Tingkat penyelesaian tindak lanjut penyelesaian laporan dan pengaduan masyarakat dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus
- IK2: Tingkat penyelesaian bantuan teknis dan tindakan hukum lain dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus
- IK3: Tingkat penyelesaian kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus

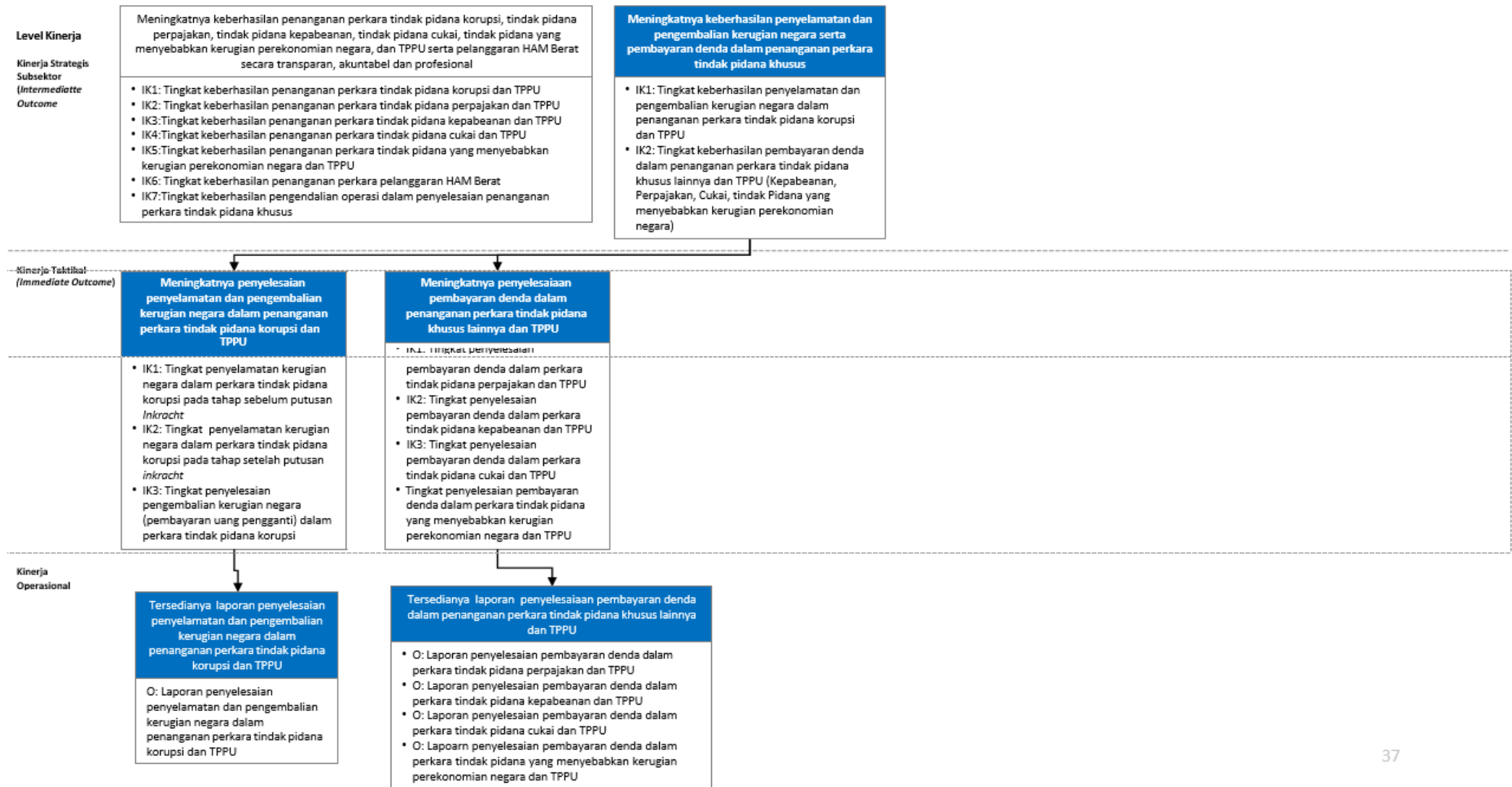
Pohon Kinerja Kejaksan Republik Indonesia ⁽³⁵⁾



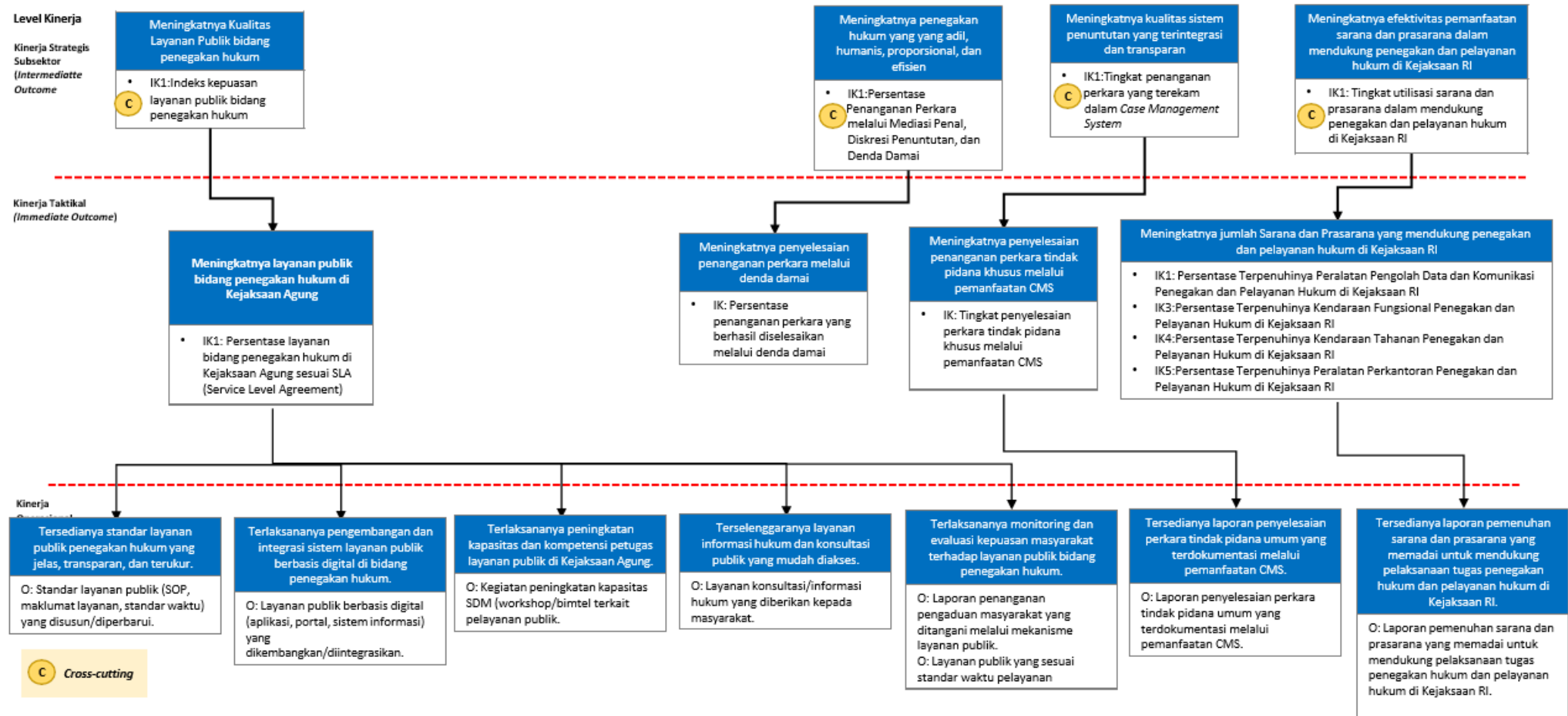
Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽³⁶⁾



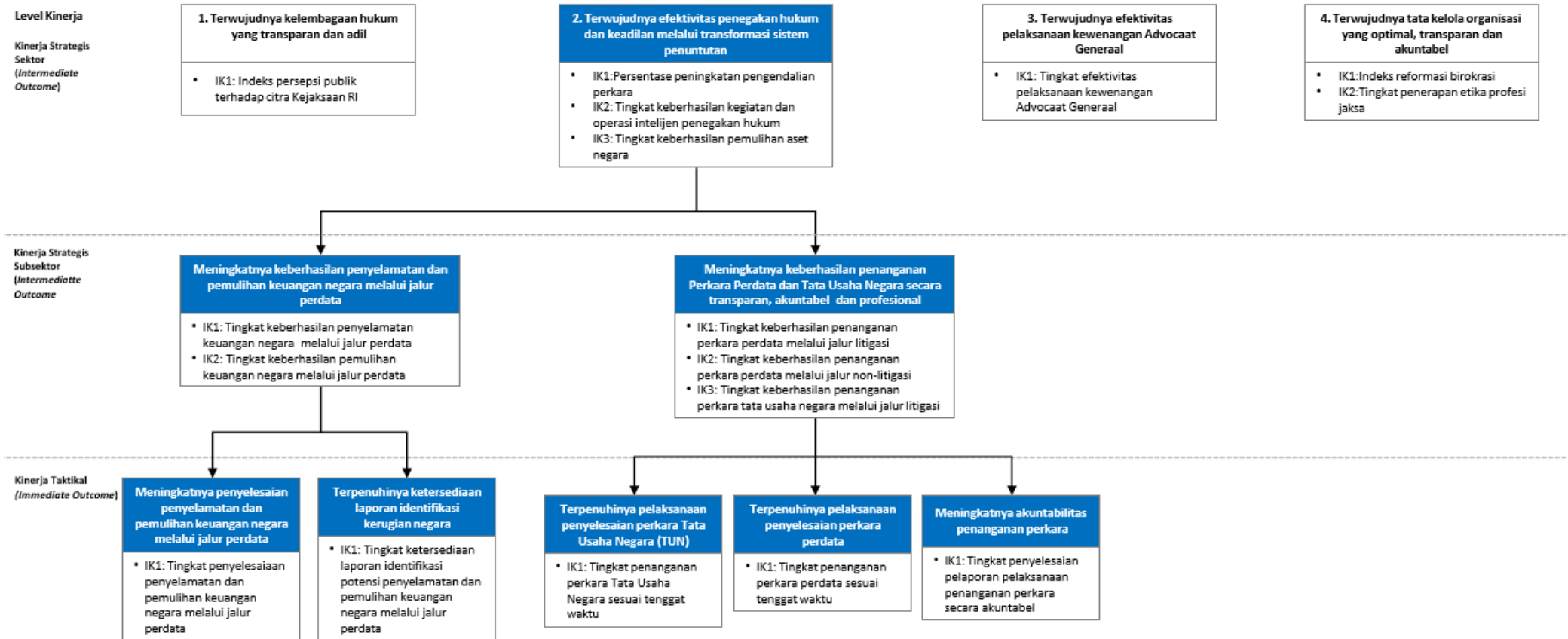
Pohon Kinerja Kejaksaaan Republik Indonesia ⁽³⁷⁾



Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽³⁸⁾



Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽³⁹⁾



Pohon Kinerja Kejaksanaan Republik Indonesia (40)

Level Kinerja

Kinerja Strategis
Subsektor
(Intermediate
Outcome)

Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata

- IK1: Tingkat keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata
- IK2: Tingkat keberhasilan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata

Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara transparan, akuntabel dan profesional

- IK1: Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi
- IK2: Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi
- IK3: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi

Kinerja Taktikal
(Immediate Outcome)

Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata

- IK1: Tingkat penyelesaian penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata

Terpenuhinya ketersediaan laporan identifikasi kerugian negara

- IK1: Tingkat ketersediaan laporan identifikasi potensi penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata

Terpenuhinya pelaksanaan penyelesaian perkara Tata Usaha Negara (TUN)

- IK1: Tingkat penanganan perkara Tata Usaha Negara sesuai tenggat waktu

Terpenuhinya pelaksanaan penyelesaian perkara perdata

- IK1: Tingkat penanganan perkara perdata sesuai tenggat waktu

Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara

- IK1: Tingkat penyelesaian pelaporan pelaksanaan penanganan perkara secara akuntabel

Kinerja Operasional

Tersedianya laporan penyelesaian penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata

O: Laporan penyelesaian penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata

Terselenggaranya kajian identifikasi potensi penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata

O: Kajian identifikasi potensi penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata

Tersedianya laporan pelaksanaan penyelesaian perkara Tata Usaha Negara (TUN)

O: Laporan pelaksanaan penyelesaian perkara Tata Usaha Negara (TUN)

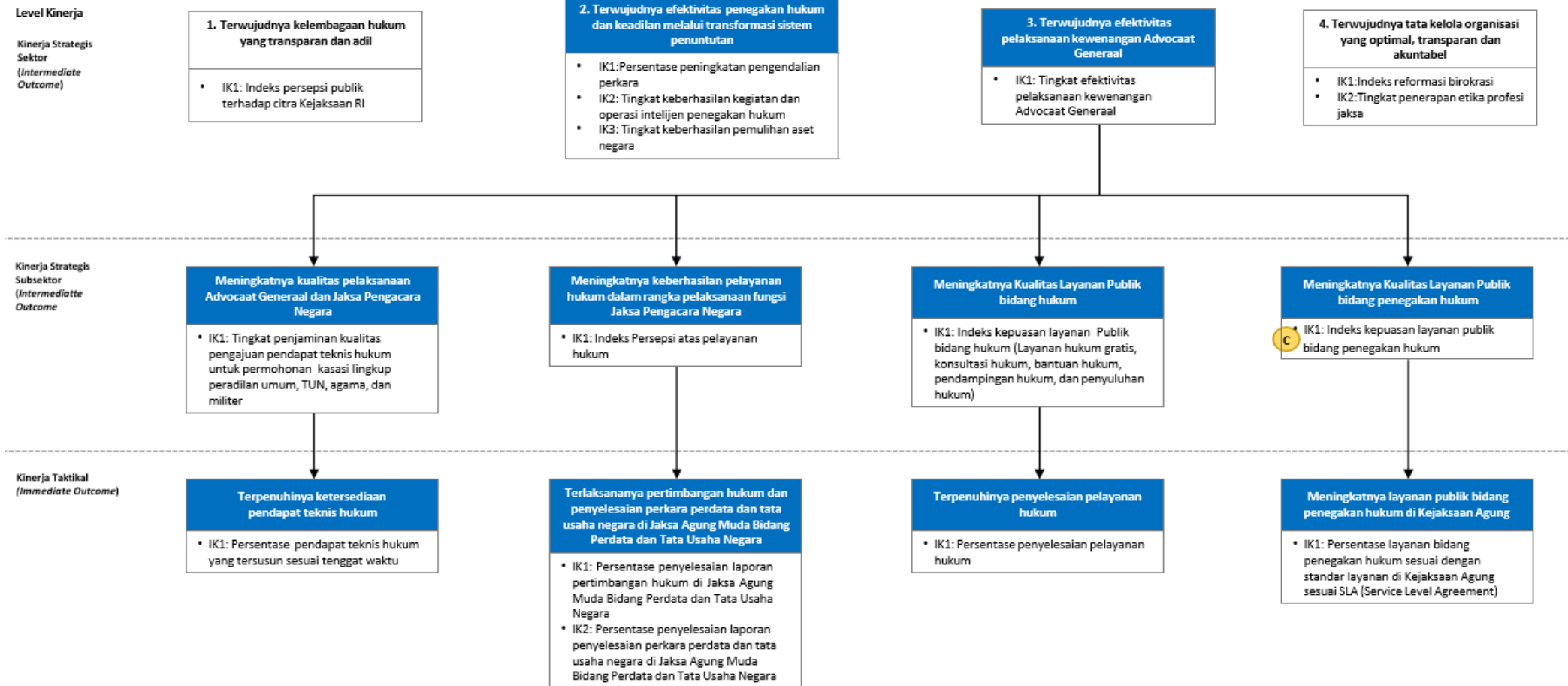
Tersedianya laporan pelaksanaan penyelesaian perkara perdata

O: Laporan pelaksanaan penyelesaian perkara perdata

Terselenggaranya penanganan perkara sesuai standar akuntabilitas

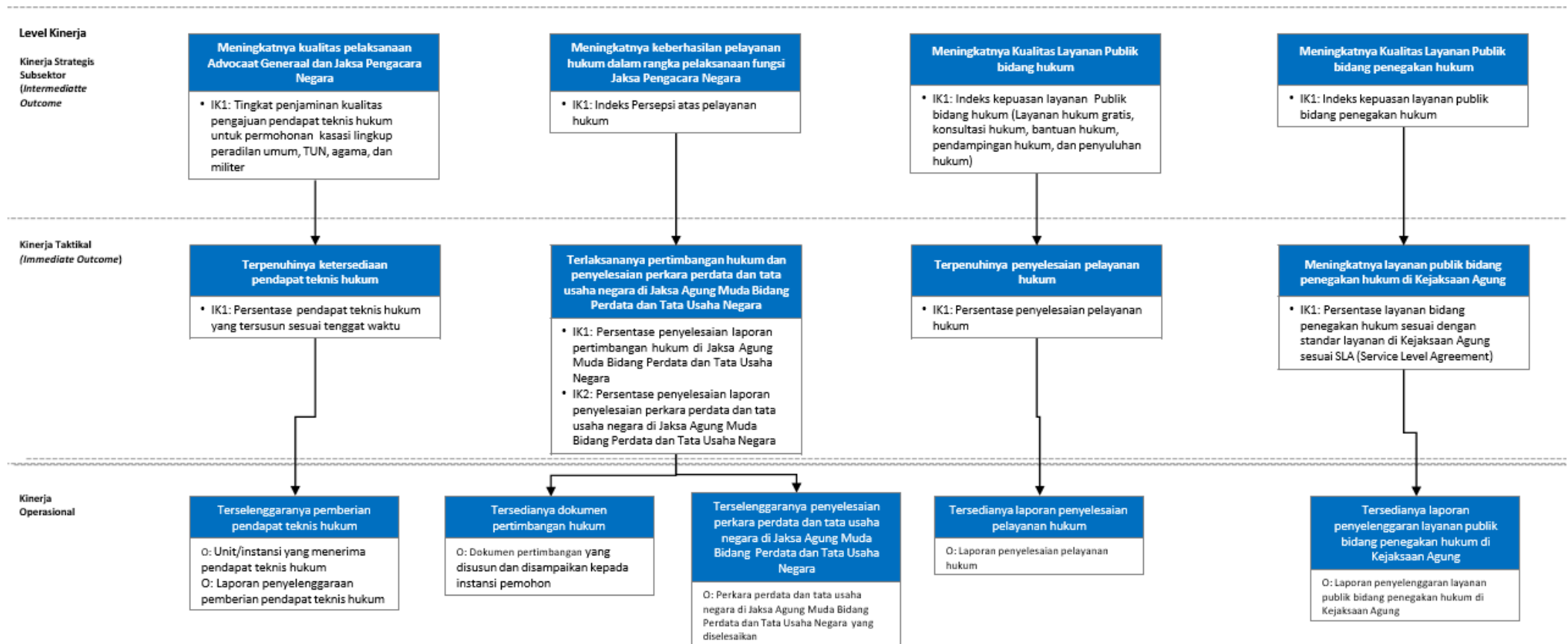
O: Publikasi/penyajian data penanganan perkara yang dapat diakses sesuai ketentuan keterbukaan informasi

Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽⁴¹⁾

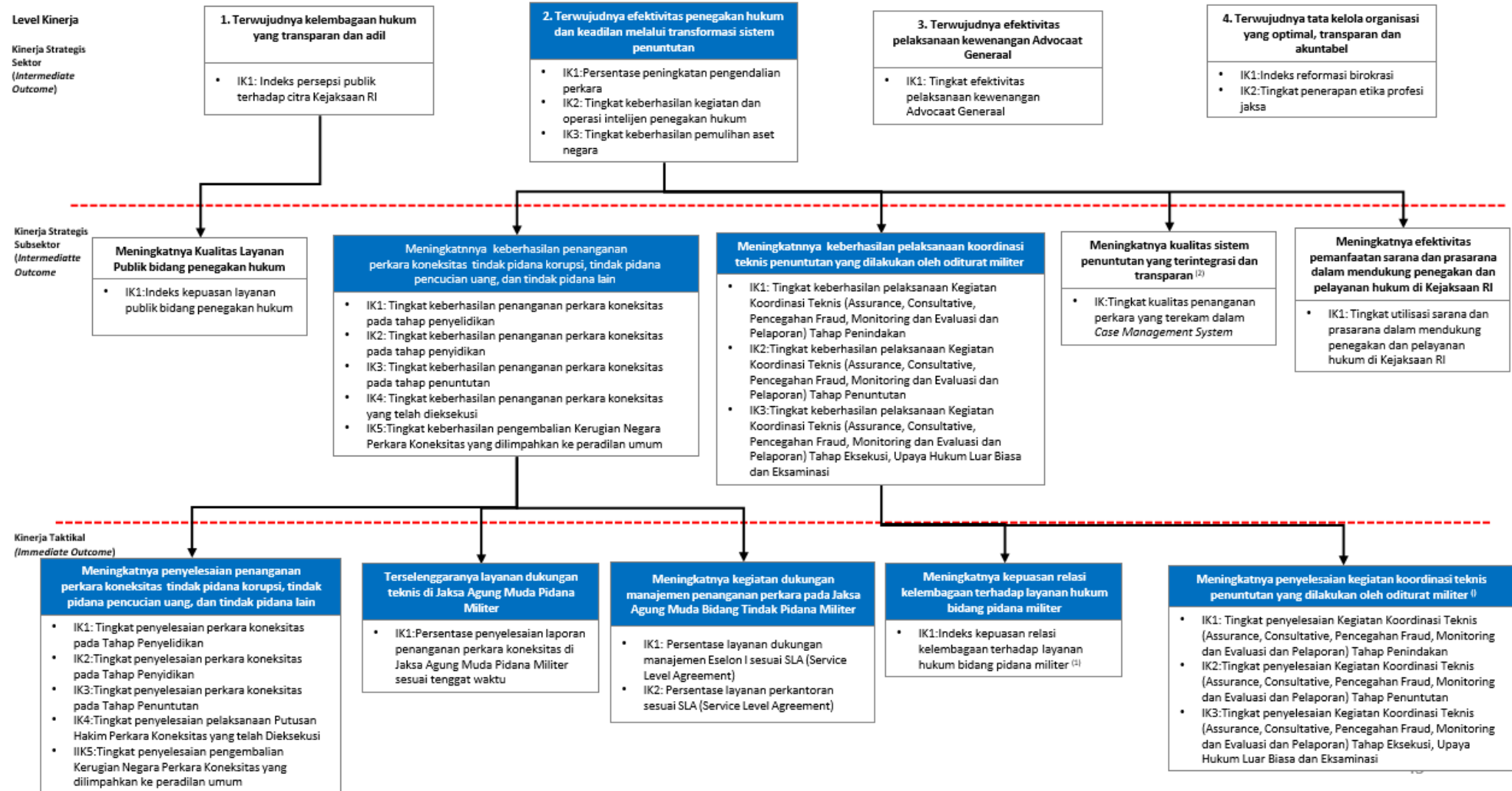


C Cross-cutting

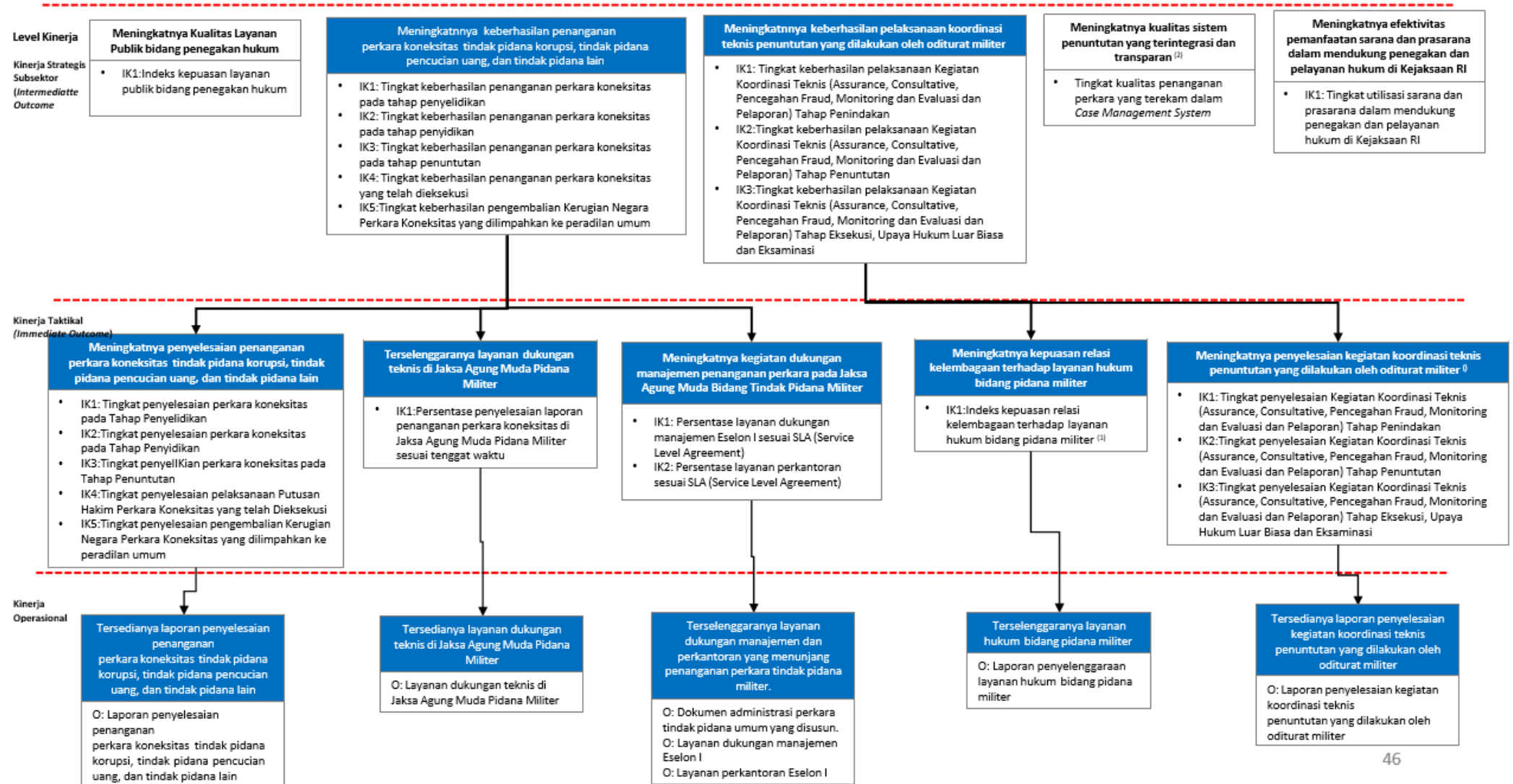
Pohon Kinerja Kejaksanaan Republik Indonesia (42)



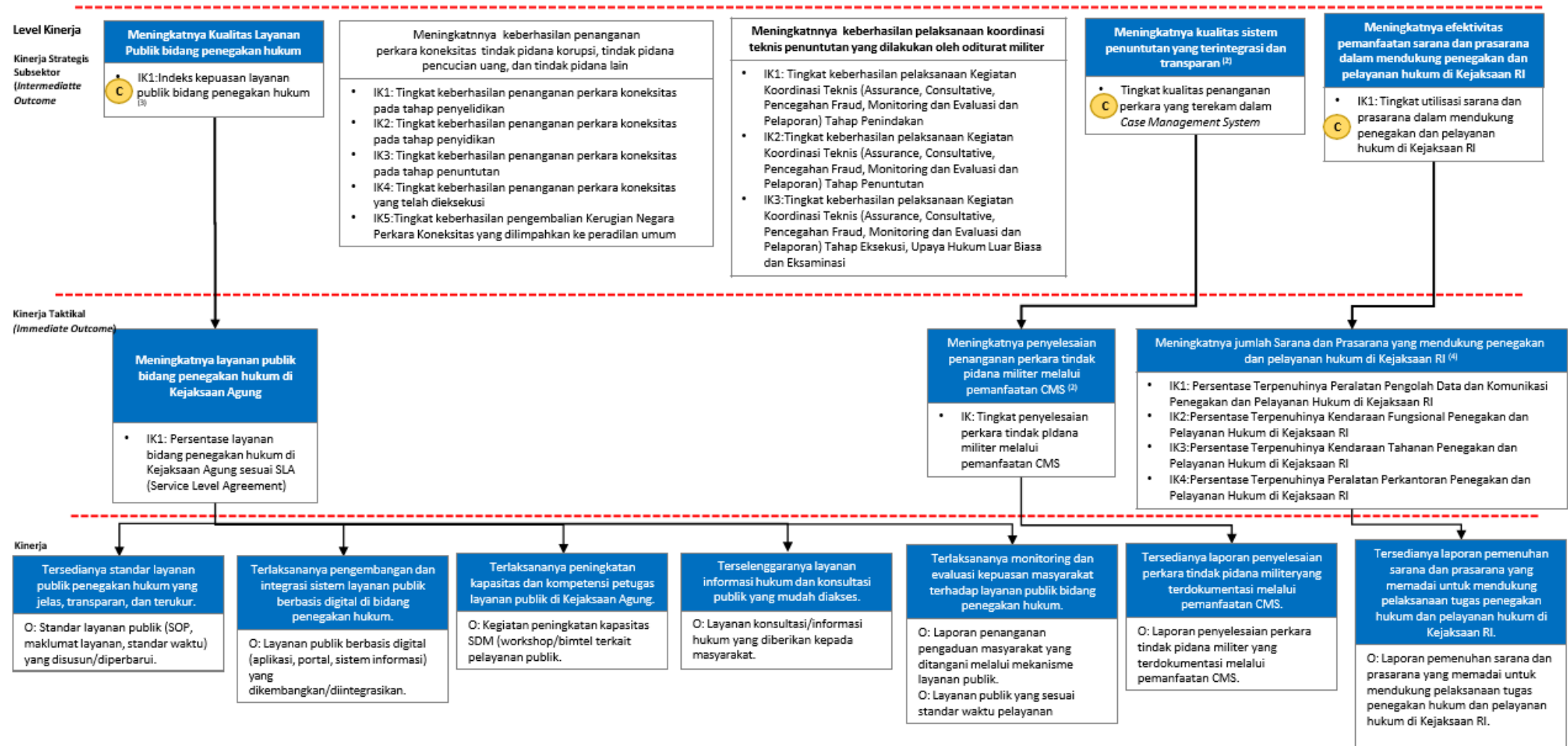
Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽⁴³⁾



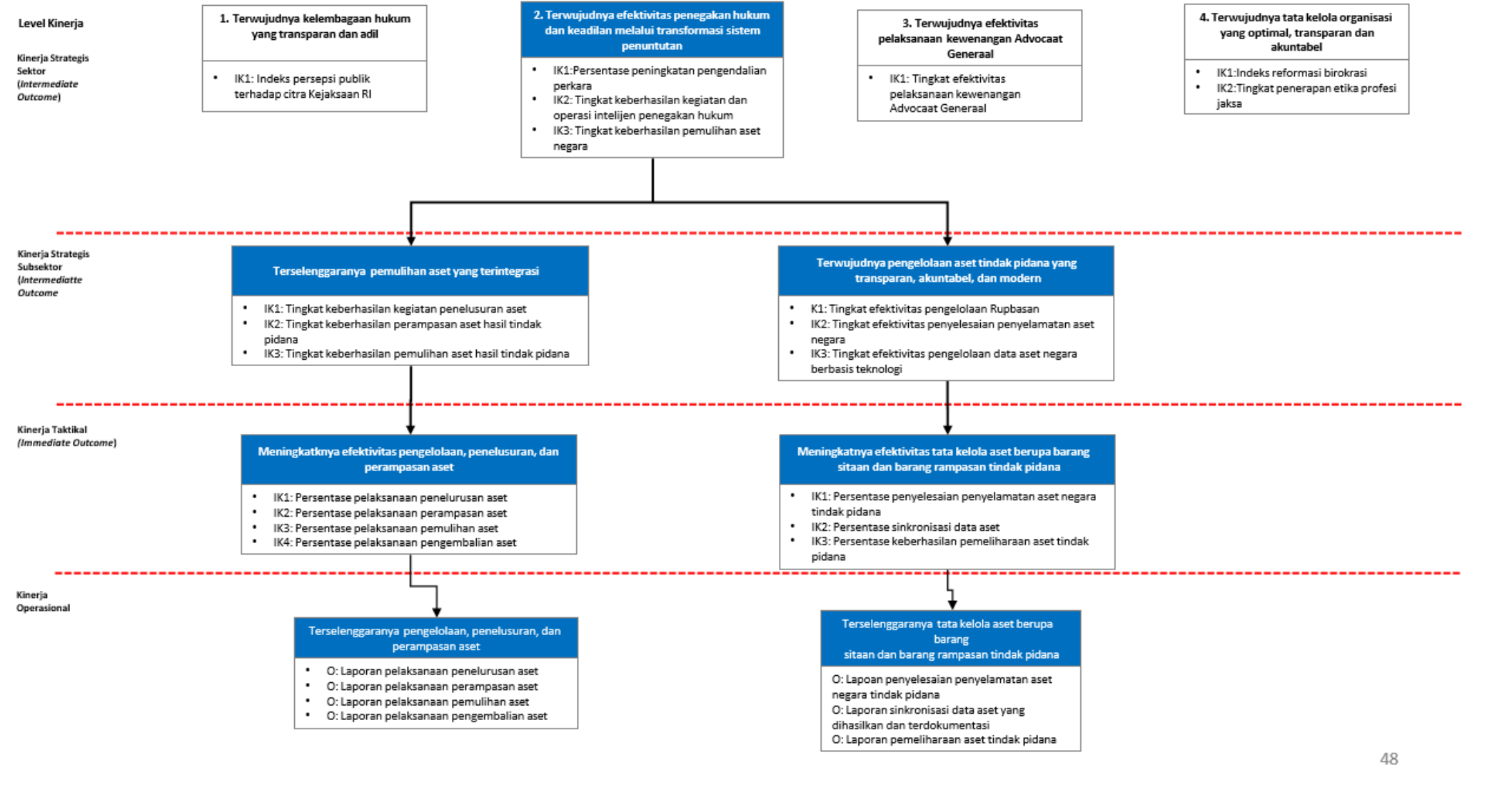
Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽⁴⁴⁾



Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽⁴⁵⁾



Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽⁴⁶⁾



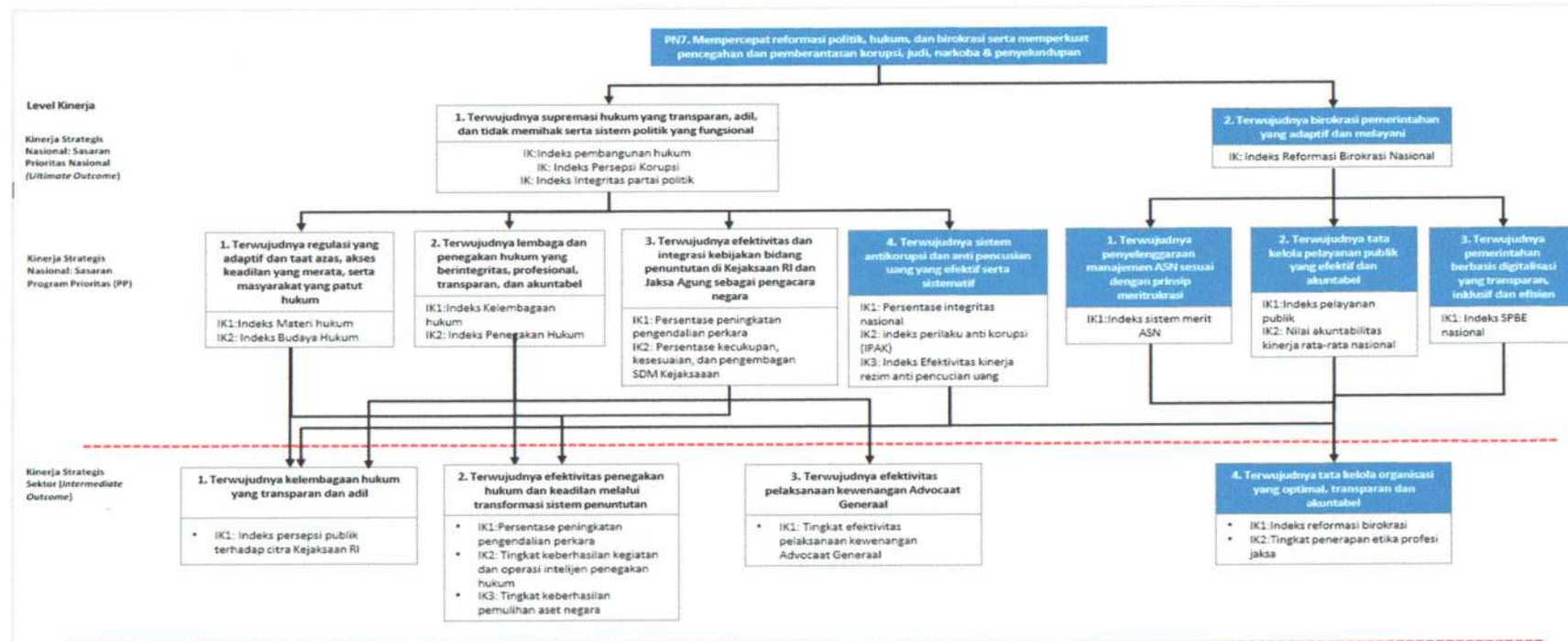


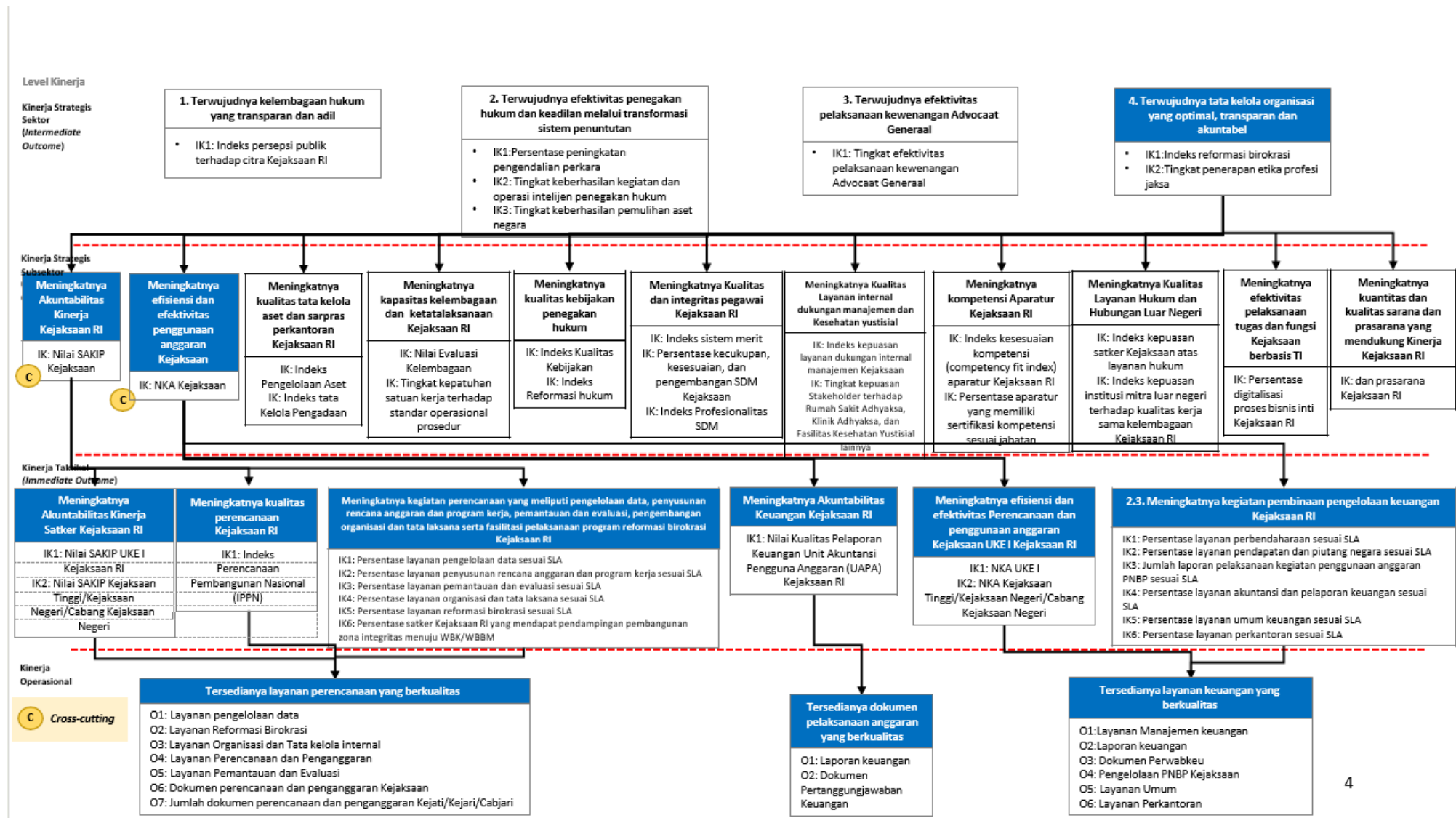
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

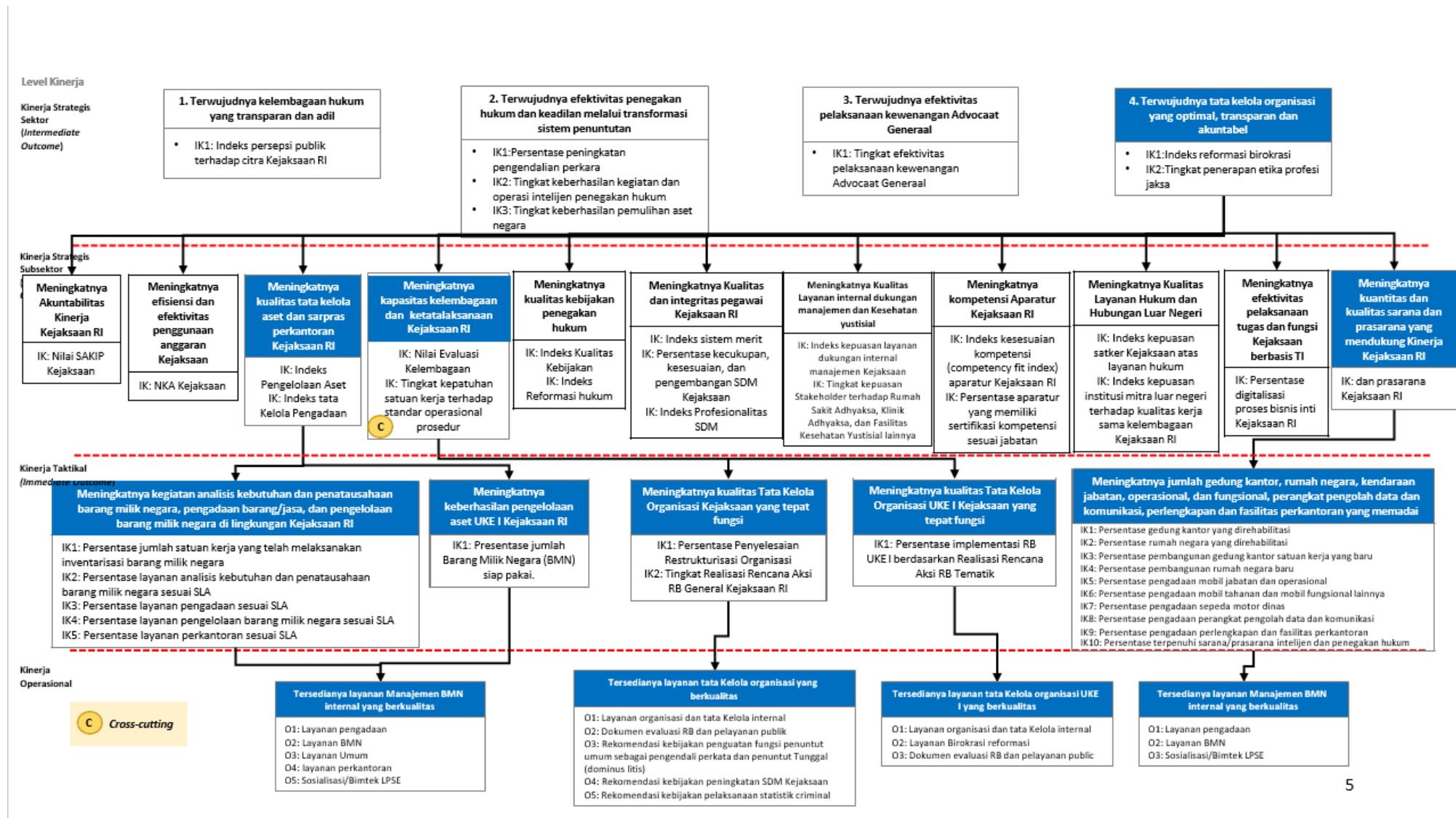
BURHANUDDIN

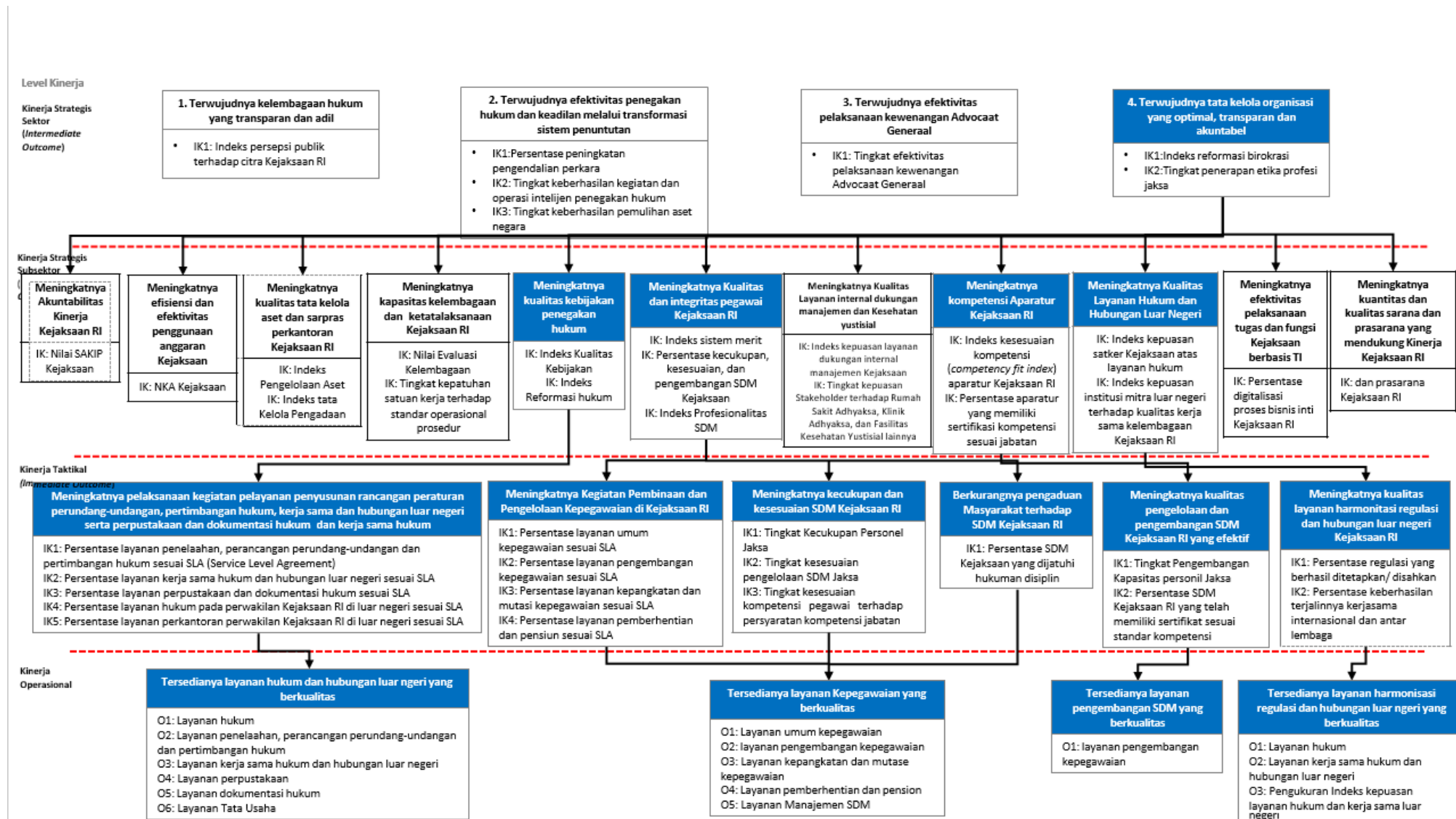
LAMPIRAN V
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1184 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2025-2029

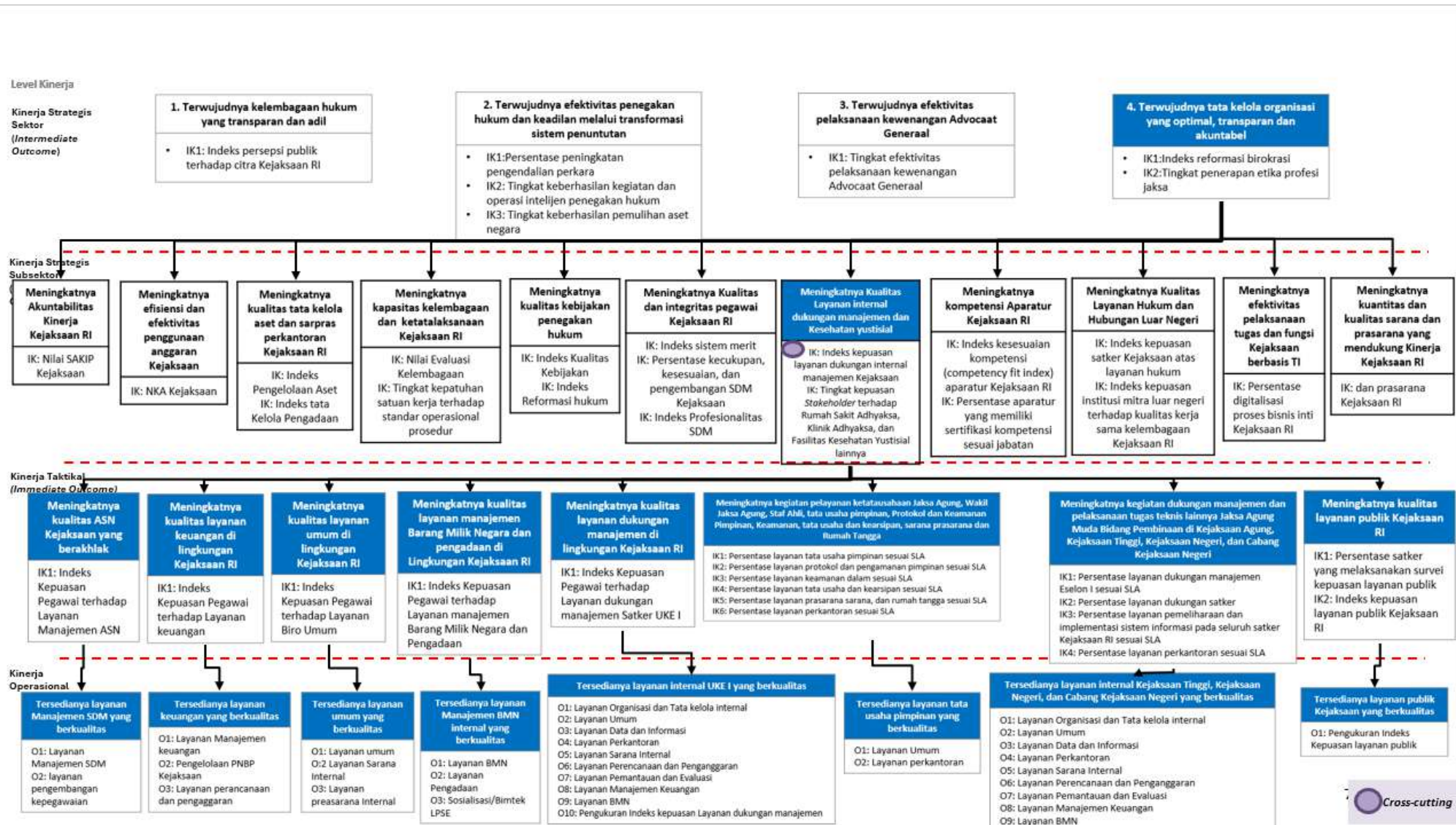
POHON KINERJA KEJAKSAAN RI – DUKUNGAN MANAJEMEN

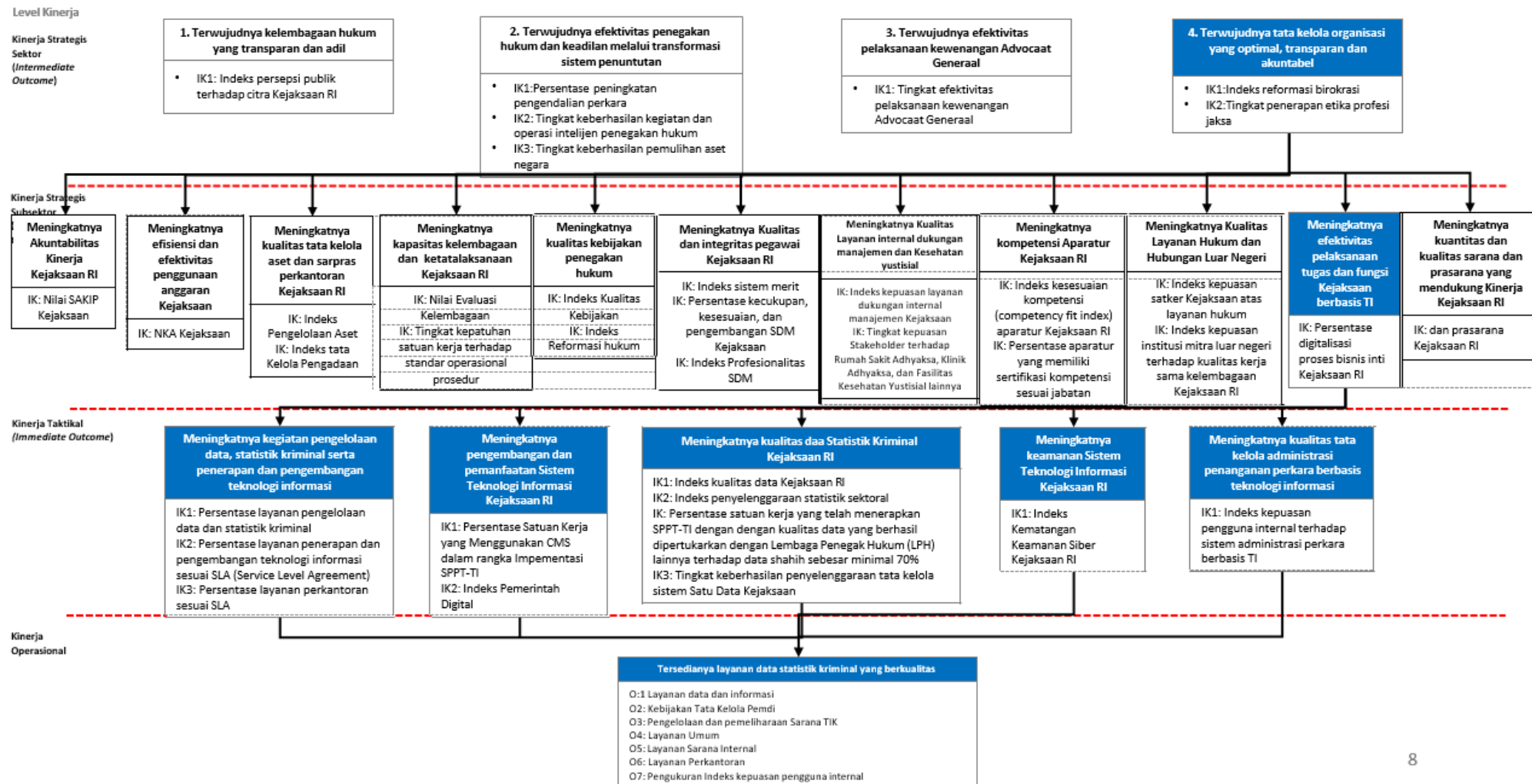


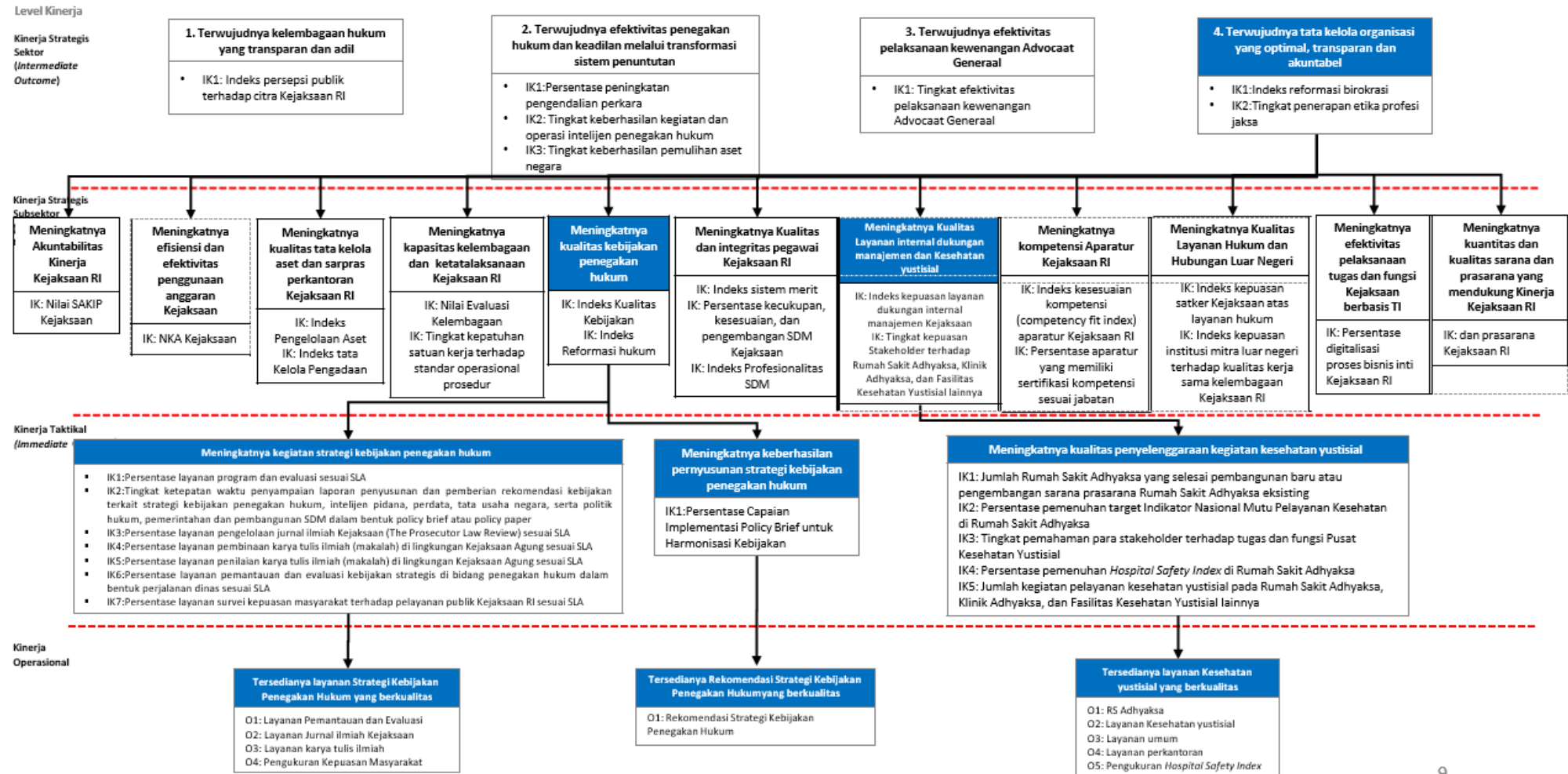


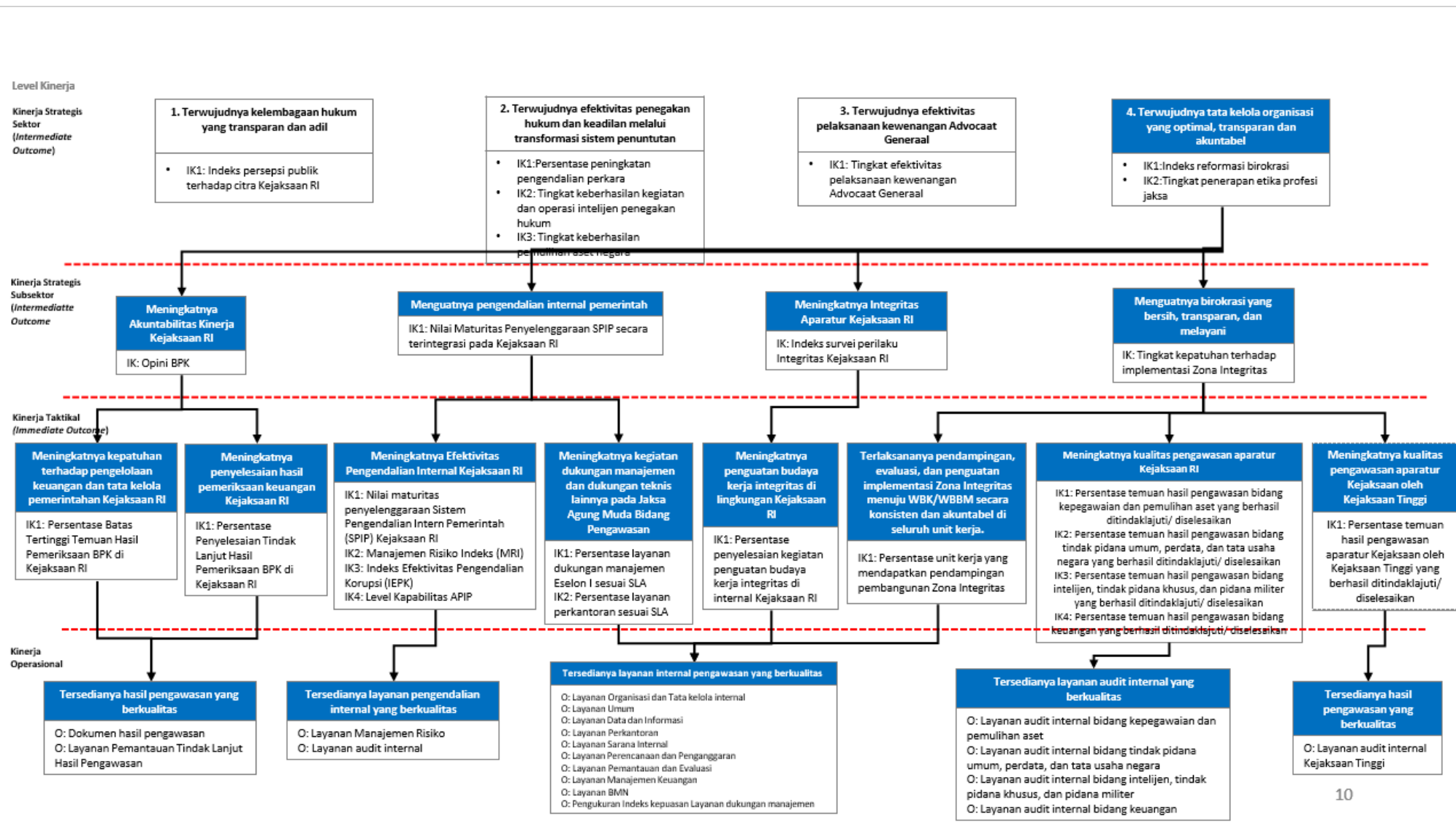




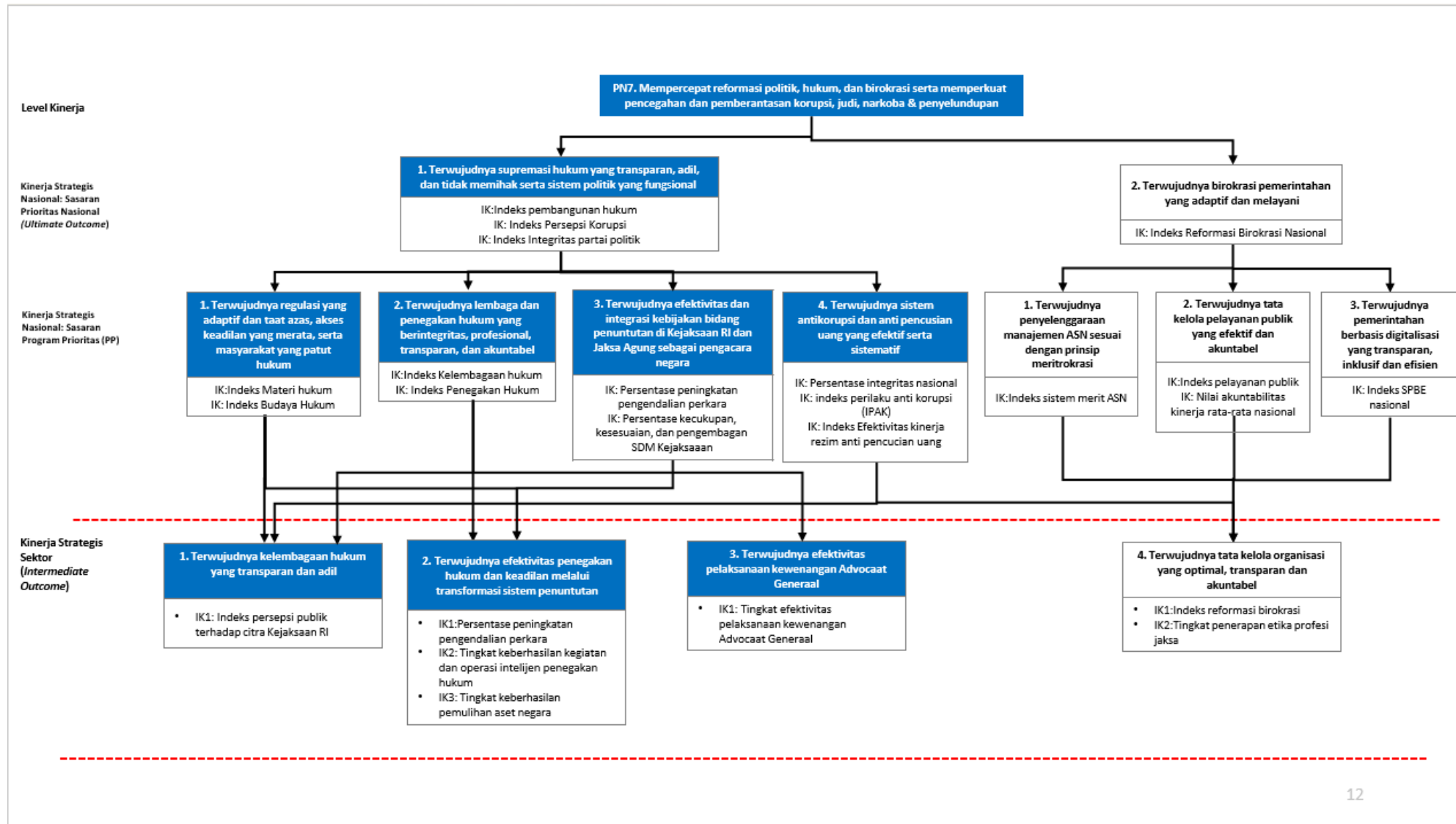


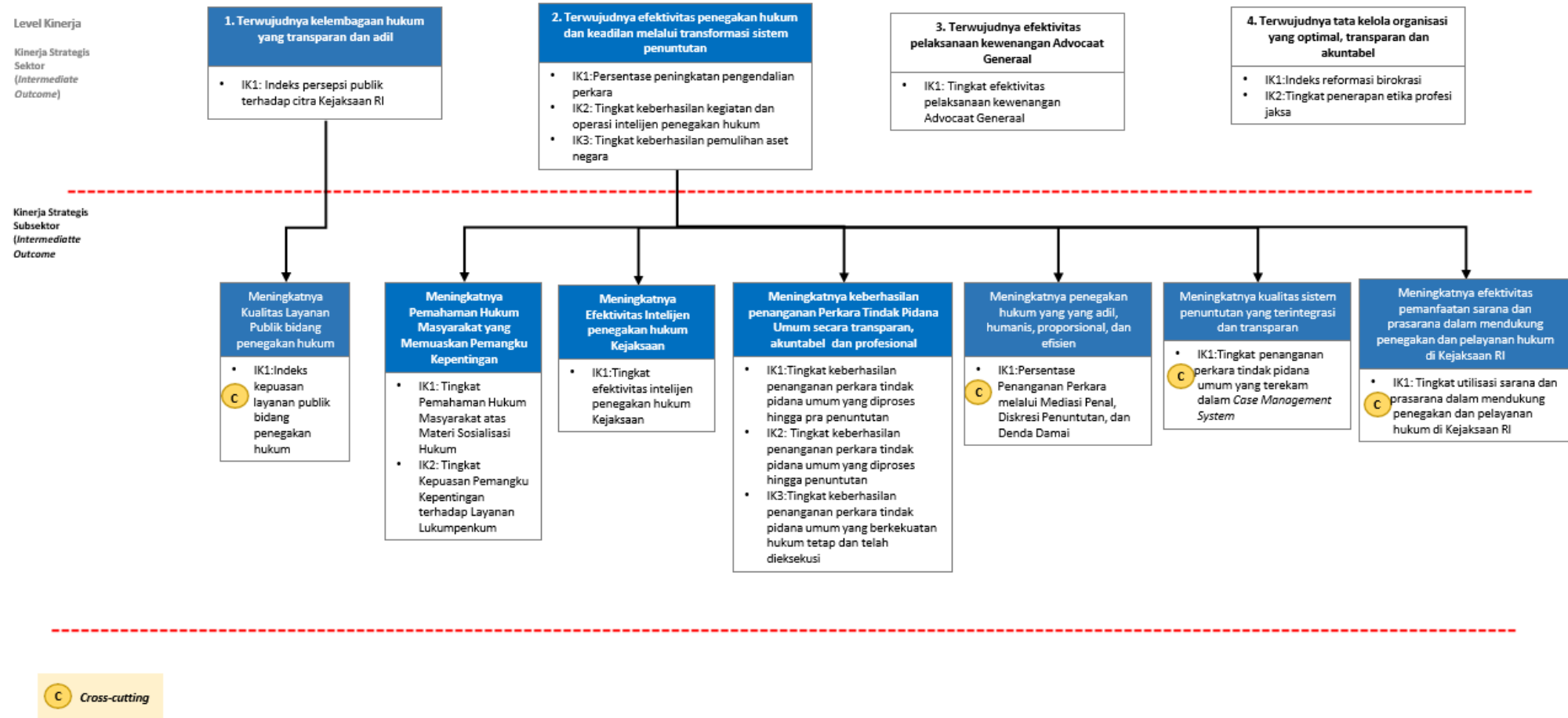






POHON KINERJA KEJAKSAAN RI – PENEGAKAN HUKUM DAN PELAYANAN HUKUM





Level Kinerja

Kinerja Strategis
Sektor
(Intermediate
Outcome)

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil
IK1: Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI

2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan
- IK1: Persentase peningkatan pengendalian perkara - IK2: Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum - IK3: Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara

3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal
IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal

4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel
- IK1: Indeks reformasi birokrasi - IK2: Tingkat penerapan etika profesi jaksa

Kinerja Strategis
Subsektor
(Intermediate
Outcome)

Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana cukai, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional
- IK1: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU - IK2: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU - IK3: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU - IK4: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU - IK5: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU - IK6: Tingkat keberhasilan penanganan perkara pelanggaran HAM Berat - IK7: Tingkat keberhasilan pengendalian operasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus

Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara serta pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus
- IK1: Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU - IK2: Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan, Perpajakan, Cukai, tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara)

Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata
- IK1: Tingkat keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata - IK2: Tingkat keberhasilan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata

Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara transparan, akuntabel dan profesional
- IK1: Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi - IK2: Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi - IK3: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi

Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain
- IK1: Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan - IK2: Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan - IK3: Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan - IK4: Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi - IK5: Tingkat keberhasilan pengembalian Kerugian Negara Perkara Koneksitas yang dilimpahkan ke peradilan umum

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat militer
- IK1: Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan) Tahap Penindakan - IK2: Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan) Tahap Penuntutan - IK3: Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan) Tahap Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi

Level Kinerja

Kinerja Strategis
Sektor
(Intermediate
Outcome)

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil
IK1: Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI

2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan
- IK1: Persentase peningkatan pengendalian perkara - IK2: Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum - IK3: Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara

3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal
IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal

4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel
- IK1: Indeks reformasi birokrasi - IK2: Tingkat penerapan etika profesi jaksa

Kinerja Strategis
Subsektor
(Intermediate
Outcome)

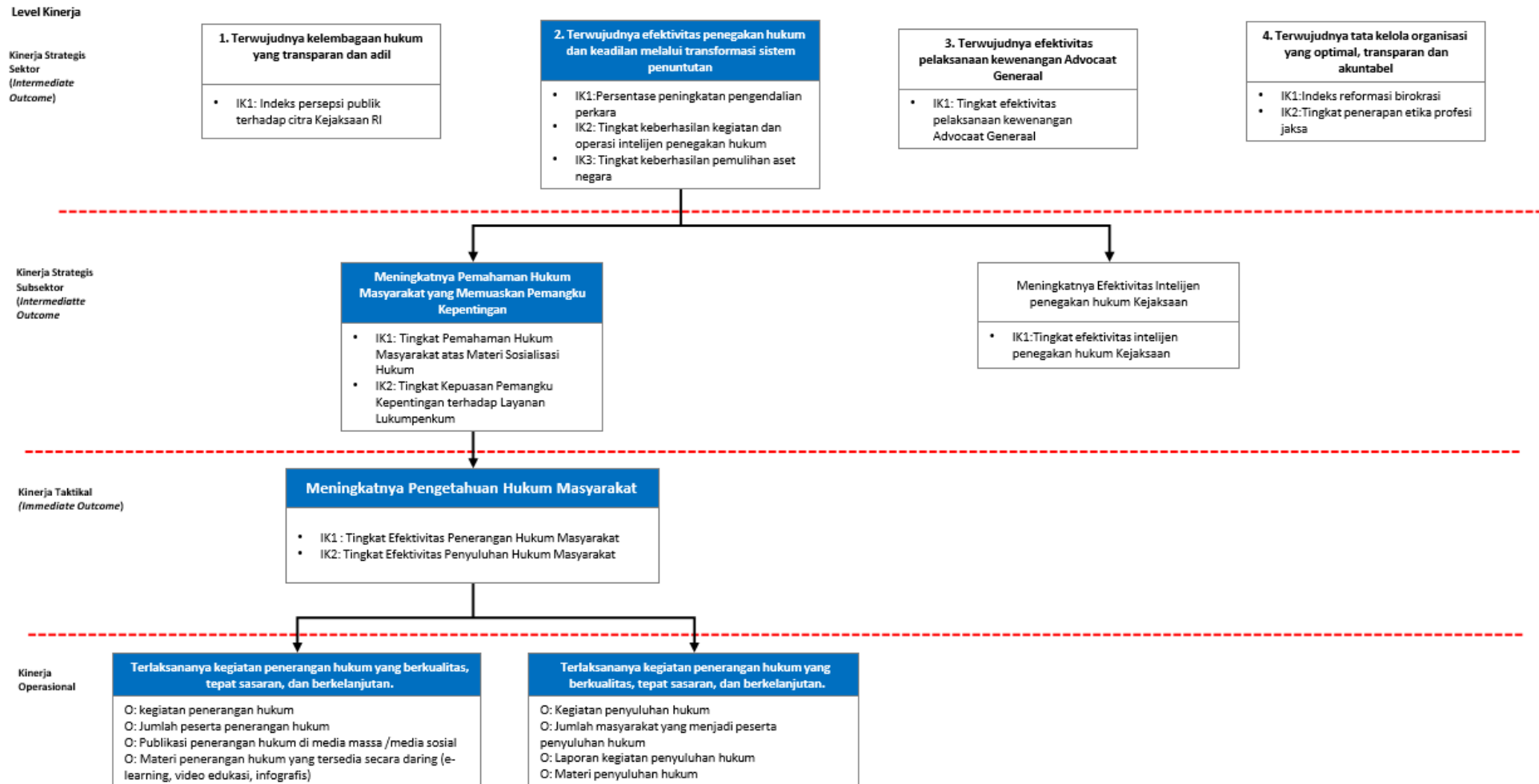
Terselenggaranya pemulihan aset yang terintegrasi
- IK1: Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset - IK2: Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana - IK3: Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana

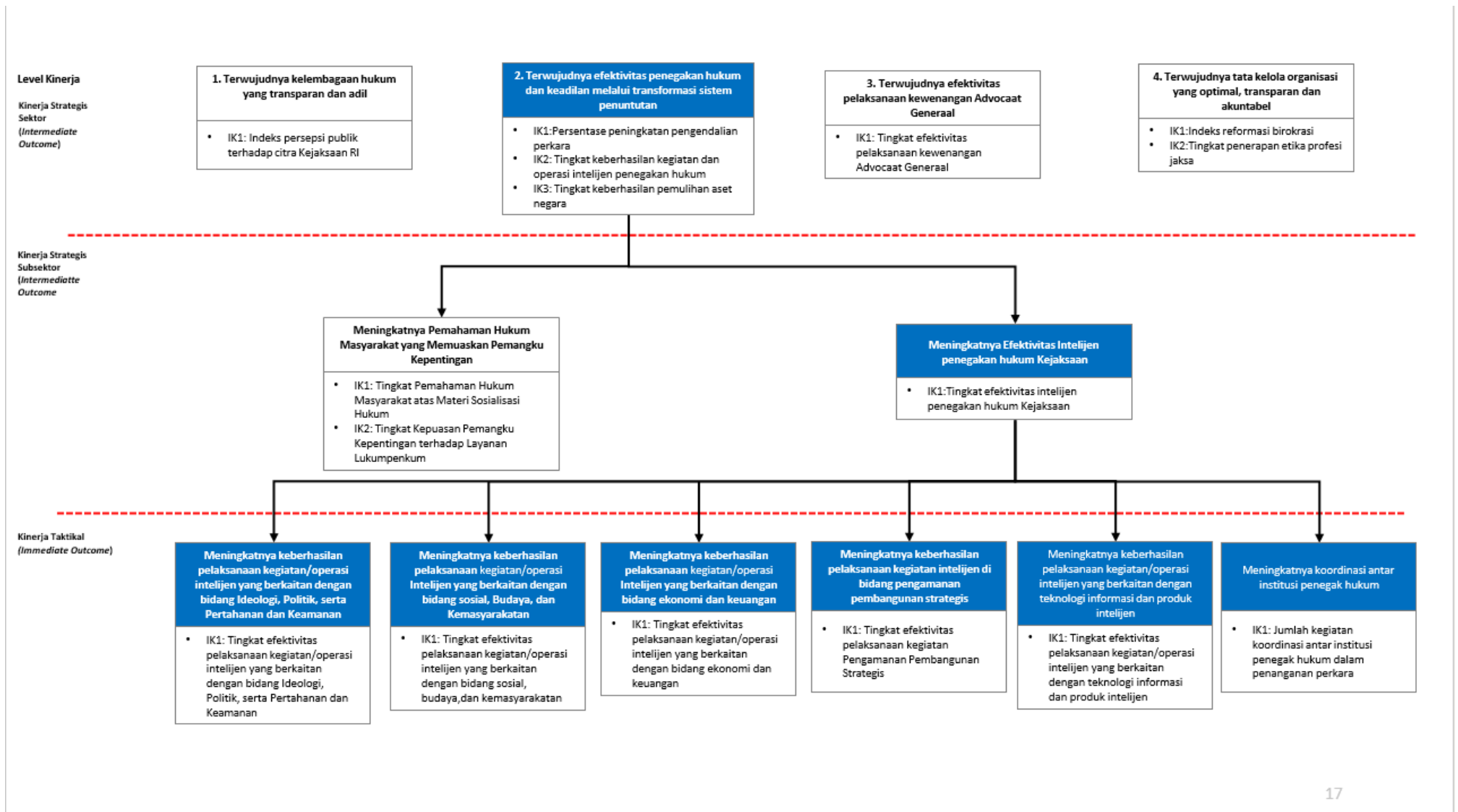
Terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang transparan, akuntabel, dan modern
- K1: Tingkat efektivitas pengelolaan Rupbasan - IK2: Tingkat efektivitas penyelesaian penyelamatan aset negara - IK3: Tingkat efektivitas pengelolaan data aset negara berbasis teknologi

Meningkatnya kualitas pelaksanaan Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara Negara
IK1: Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer

Meningkatnya keberhasilan pelayanan hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara
IK1: Indeks Persepsi atas pelayanan hukum

Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang hukum
IK1: Indeks kepuasan layanan Publik bidang hukum (Layanan hukum gratis, konsultasi hukum, bantuan hukum, pendampingan hukum, dan penyuluhan hukum)





Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽¹⁶⁾

Level Kinerja

Kinerja Strategis
Subsektor
(Intermediate
Outcome)

Meningkatnya Pemahaman Hukum Masyarakat yang Memuaskan Pemangku Kepentingan

- IK1: Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat atas Materi Sosialisasi Hukum
- IK2: Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Layanan Lukumpenkum

Meningkatnya Efektivitas Intelijen penegakan hukum Kejaksaan

- IK1: Tingkat efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan

Kinerja Taktikal
(Immediate Outcome)

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, serta Pertahanan dan Keamanan

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, serta Pertahanan dan Keamanan

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan intelijen di bidang pengamanan pembangunan strategis

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produk intelijen

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produk intelijen

Meningkatnya koordinasi antar institusi penegak hukum

- IK1: Jumlah kegiatan koordinasi antar institusi penegak hukum dalam penanganan perkara

Kinerja Operasional

Tersedianya informasi intelijen yang akurat, tepat waktu, dan relevan terkait isu ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan

O: Laporan intelijen terkait isu ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan yang disampaikan tepat waktu

Terlaksananya operasi intelijen khusus sesuai kebutuhan dan perintah operasi.

O: Kegiatan/Operasi intelijen terkait isu Ideologi, Politik, serta Keamanan yang berhasil dilaksanakan sesuai rencana.

Tersedianya laporan hasil operasi intelijen yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan strategis.

O: Laporan intelijen yang dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan oleh pimpinan/lembaga terkait.
O: Rekomendasi intelijen yang ditindaklanjuti oleh instansi/lembaga pengguna.

Terselenggaranya koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaan operasi intelijen di bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan.

O: Koordinasi/kerjasama intelijen lintas lembaga yang dilaksanakan untuk isu ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan.

Tersedianya informasi intelijen yang akurat, tepat waktu, dan relevan terkait isu sosial, budaya, dan kemasyarakatan

O: Laporan intelijen terkait isu sosial, budaya, dan kemasyarakatan yang disampaikan tepat waktu

Terlaksananya operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan sesuai kebutuhan dan perintah operasi.

O: Kegiatan/Operasi intelijen terkait isu sosial, budaya, dan kemasyarakatan yang berhasil dilaksanakan sesuai rencana.

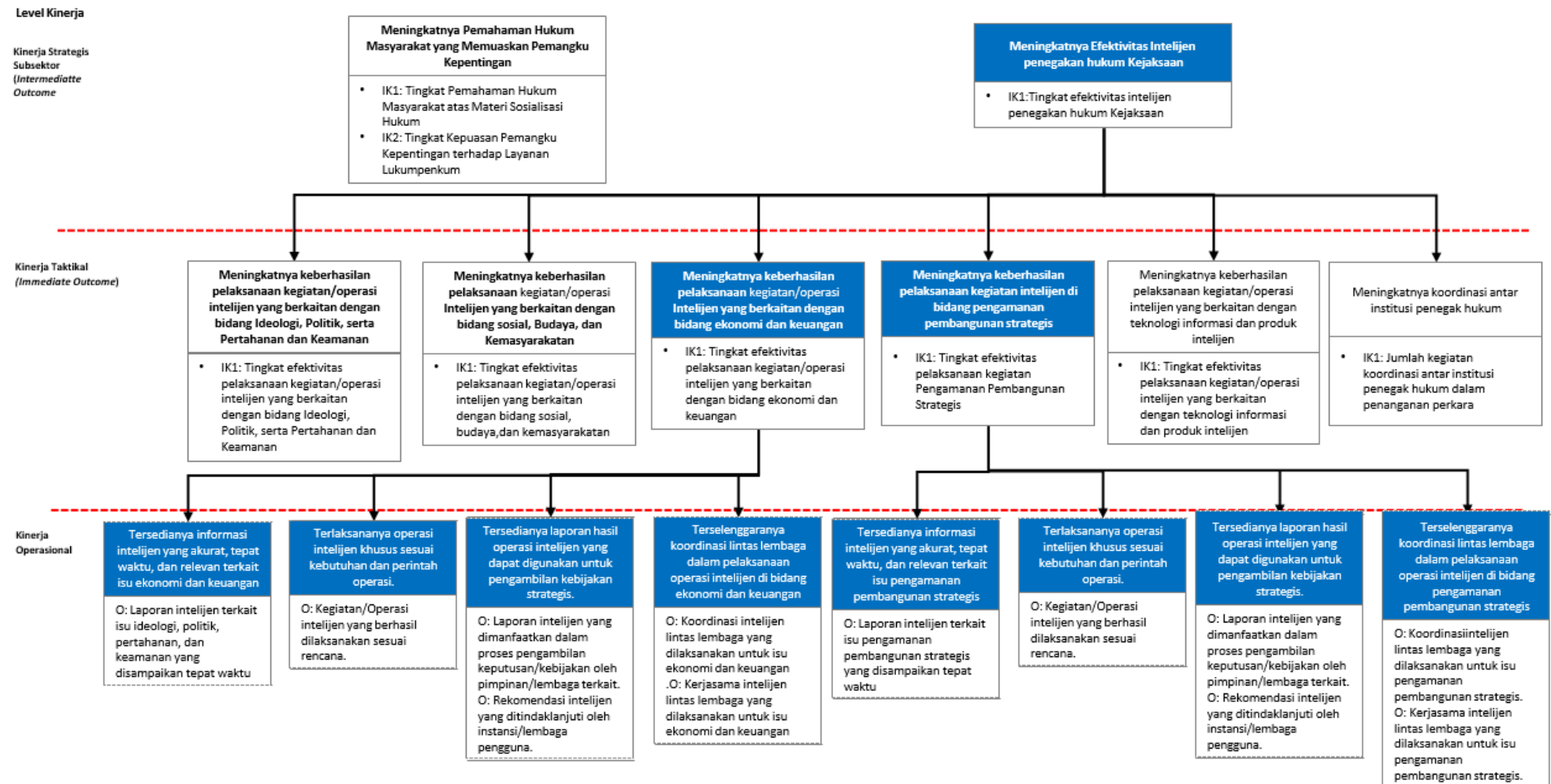
Tersedianya laporan hasil operasi intelijen yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan strategis.

O: Laporan intelijen yang dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan oleh pimpinan/lembaga terkait.
O: Rekomendasi intelijen yang ditindaklanjuti oleh instansi/lembaga pengguna.

Terselenggaranya koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaan operasi intelijen di bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan

O: Koordinasi intelijen lintas lembaga yang dilaksanakan untuk isu sosial, budaya, dan kemasyarakatan
O: Kerjasama intelijen lintas lembaga yang dilaksanakan untuk isu sosial, budaya, dan kemasyarakatan

Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽¹⁷⁾



Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽¹⁸⁾

Level Kinerja

Kinerja Strategis
Subsektor
(Intermediate
Outcome)

Meningkatnya Pemahaman Hukum Masyarakat yang Memuaskan Pemangku Kepentingan

- IK1: Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat atas Materi Sosialisasi Hukum
- IK2: Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Layanan Lukumpenkum

Meningkatnya Efektivitas Intelijen penegakan hukum Kejaksaan

- IK1: Tingkat efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan

Kinerja Taktikal
(Immediate Outcome)

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, serta Pertahanan dan Keamanan

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, serta Pertahanan dan Keamanan

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan intelijen di bidang pengamanan pembangunan strategis

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produk intelijen

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produk intelijen

Meningkatnya koordinasi antar institusi penegak hukum

- IK1: Jumlah kegiatan koordinasi antar institusi penegak hukum dalam penanganan perkara

Kinerja Operasional

Tersedianya sistem dan aplikasi teknologi informasi pendukung operasi intelijen.

O: Sistem/aplikasi TI intelijen yang dipelihara/dikembangkan/dioperasionalkan

Tersedianya produk intelijen berbasis teknologi informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu.

O: Produk intelijen berbasis TI (laporan, analisis, rekomendasi) yang dihasilkan.
O: Laporan intelijen berbasis TI yang disampaikan tepat waktu.

Terlaksananya operasi intelijen yang memanfaatkan teknologi informasi

O: Produk intelijen berbasis TI yang dimanfaatkan oleh pimpinan/instansi pengguna.
O: Kegiatan/ operasi intelijen berbasis TI yang berhasil dilaksanakan sesuai rencana.

Terselenggaranya penguatan kapasitas SDM intelijen dalam pemanfaatan teknologi informasi.

O: SDM intelijen yang dilatih/tersertifikasi dalam pemanfaatan TI untuk operasi intelijen.

Terwujudnya mekanisme pengamanan data, jaringan, dan produk intelijen berbasis TI.

O: Insiden keamanan informasi intelijen yang dapat ditangani dalam periode tertentu.

Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽¹⁹⁾

Level Kinerja

Kinerja Strategis
Subsektor
(Intermediate
Outcome)

Meningkatnya Pemahaman Hukum Masyarakat yang Memuaskan Pemangku Kepentingan

- IK1: Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat atas Materi Sosialisasi Hukum
- IK2: Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Layanan Lukumpenkum

Meningkatnya Efektivitas Intelijen penegakan hukum Kejaksaan

- IK1: Tingkat efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan

Kinerja Taktikal
(Immediate Outcome)

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, serta Pertahanan dan Keamanan

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, serta Pertahanan dan Keamanan

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan intelijen di bidang pengamanan pembangunan strategis

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produk intelijen

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produk intelijen

Meningkatnya koordinasi antar institusi penegak hukum

- IK1: Jumlah kegiatan koordinasi antar institusi penegak hukum dalam penanganan perkara

Kinerja Operasional

Terselenggaranya forum koordinasi rutin antar institusi penegak hukum.

O: Rapat/ pertemuan koordinasi antar institusi penegak hukum yang dilaksanakan.
O: Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti oleh masing-masing institusi.

Terbentuknya mekanisme/protokol kerja sama lintas institusi penegak hukum.

O: Dokumen mekanisme/protokol kerja sama lintas institusi yang ditetapkan dan dijalankan.

Tersusunnya kesepakatan/nota kesepahaman (MoU) dalam rangka peningkatan koordinasi.

O: Kesepakatan/nota kesepahaman yang ditandatangani/ditindaklanjuti

Tersedianya sistem pertukaran data dan informasi antar institusi penegak hukum.

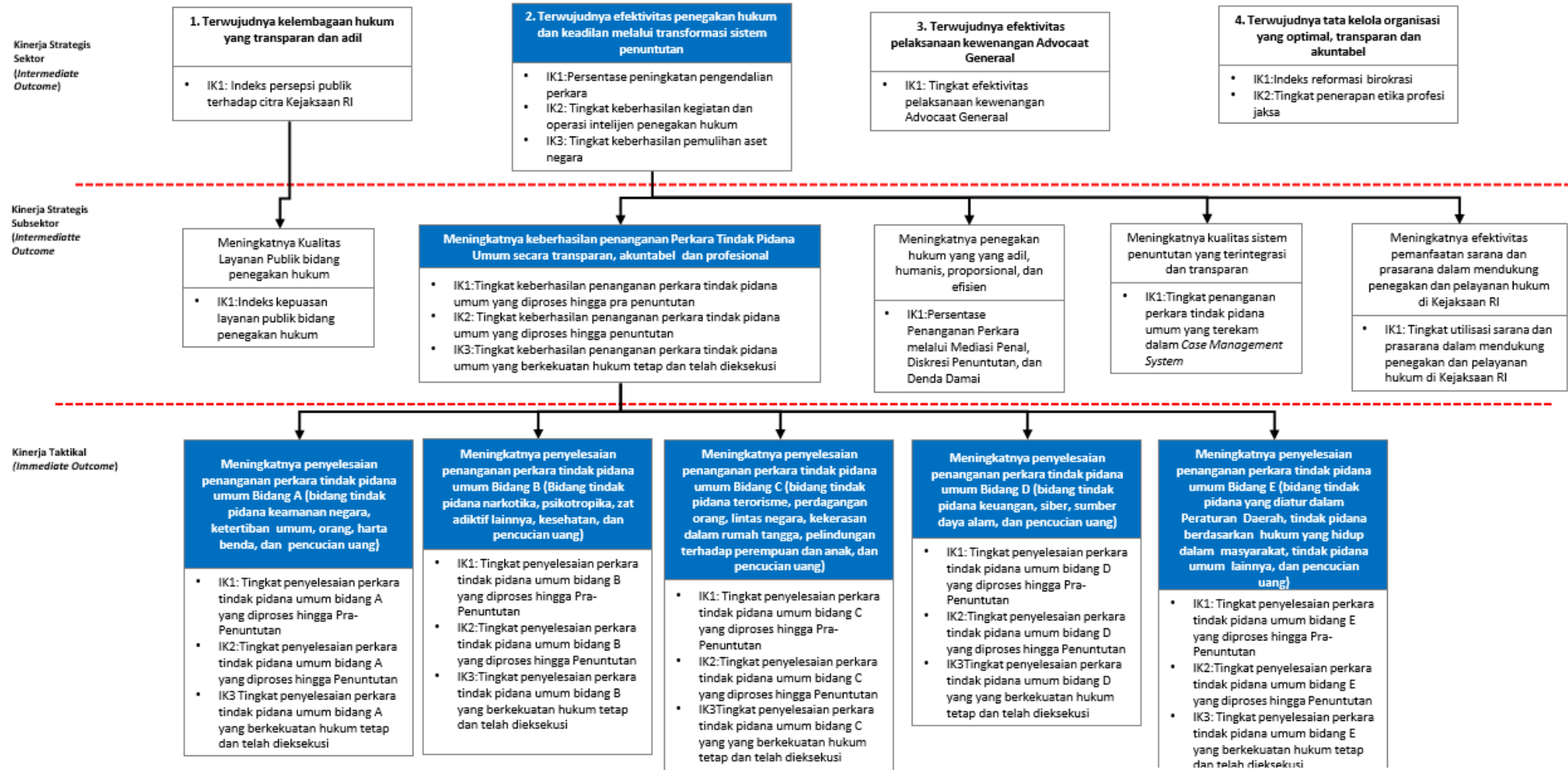
O: Frekuensi pertukaran data/informasi hukum antar institusi penegak hukum.
O: Institusi penegak hukum yang terhubung dalam sistem pertukaran data dan informasi
O: Modul/fungsi sistem pertukaran data yang sudah berfungsi sesuai desain

Terlaksananya operasi gabungan atau penanganan kasus secara kolaboratif.

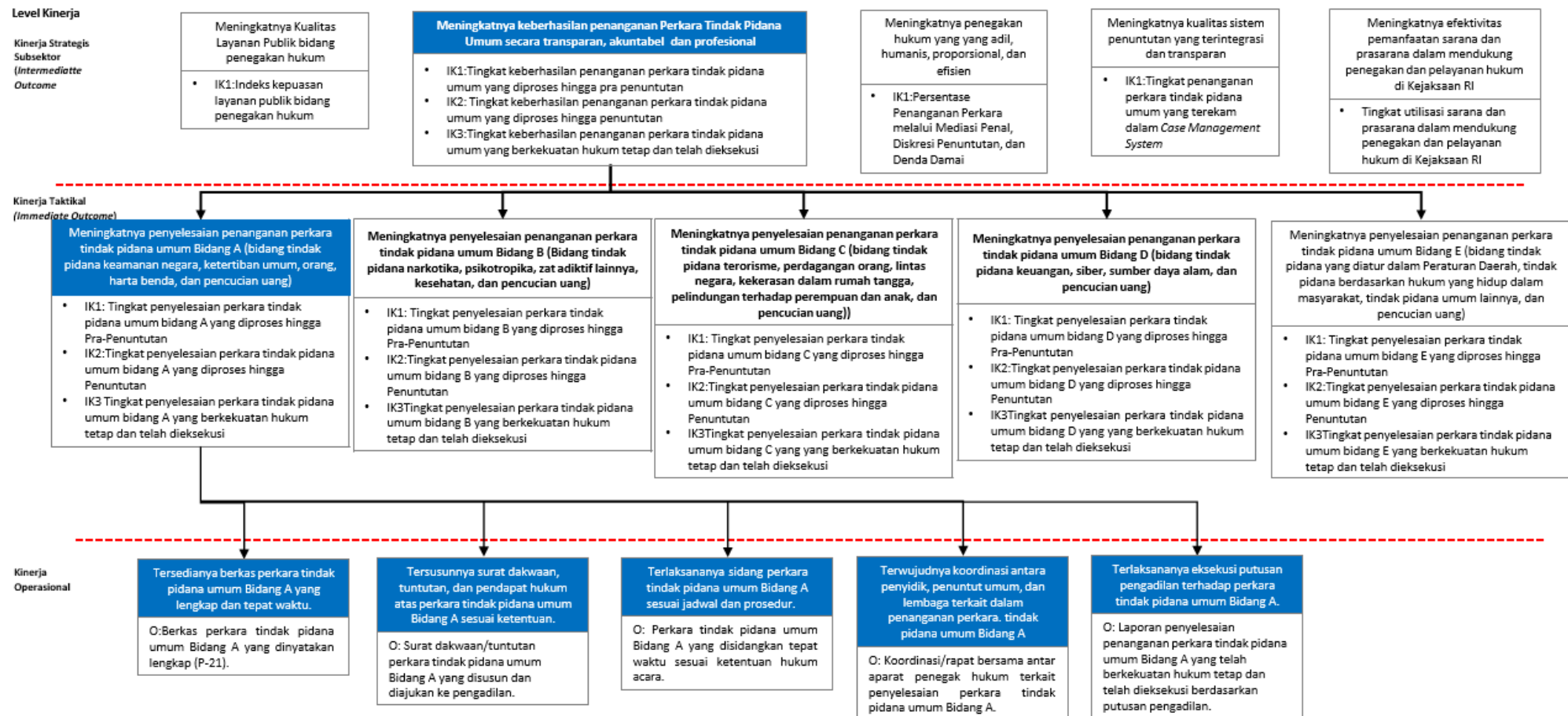
O: Laporan pelaksanaan operasi gabungan/penanganan kasus bersama yang dilaksanakan.

Pohon Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (20)

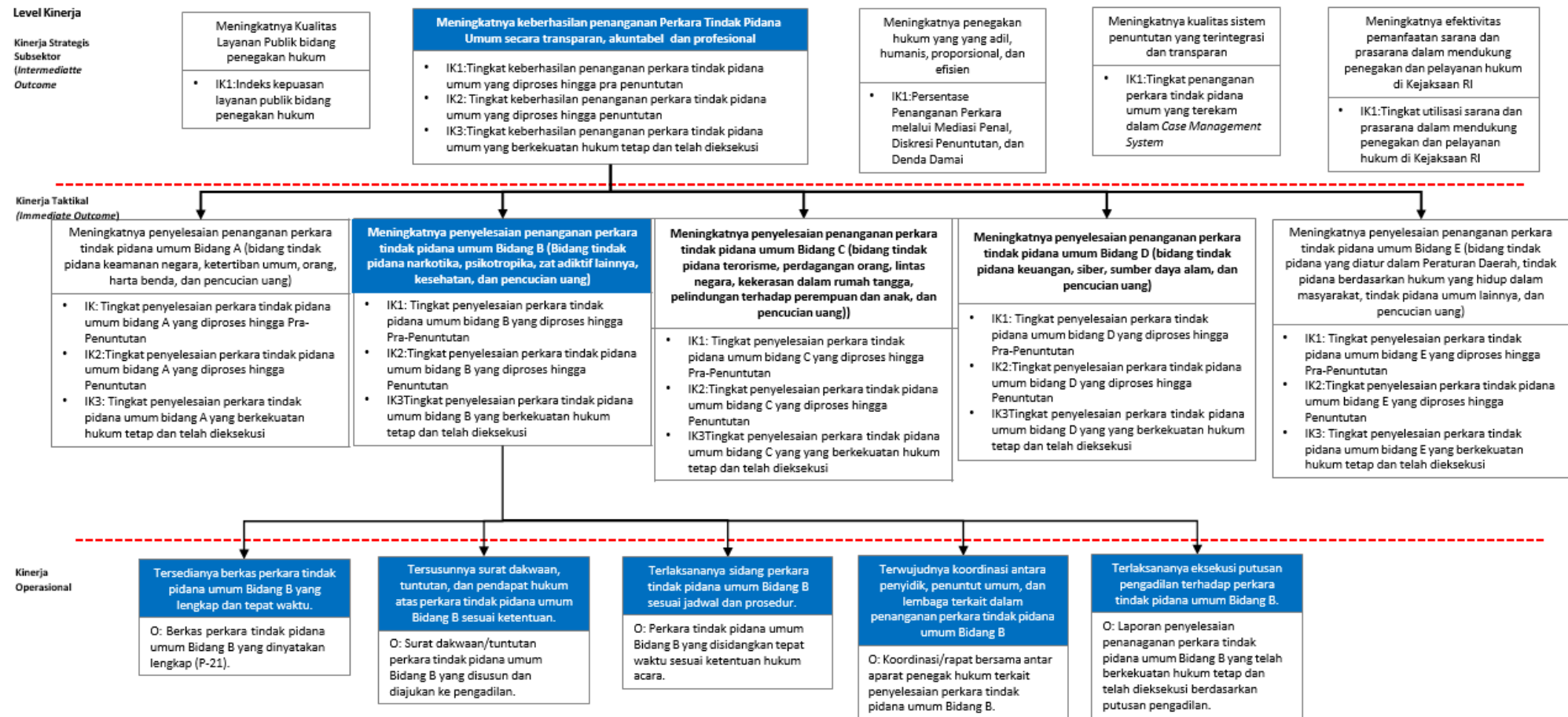
Level Kinerja



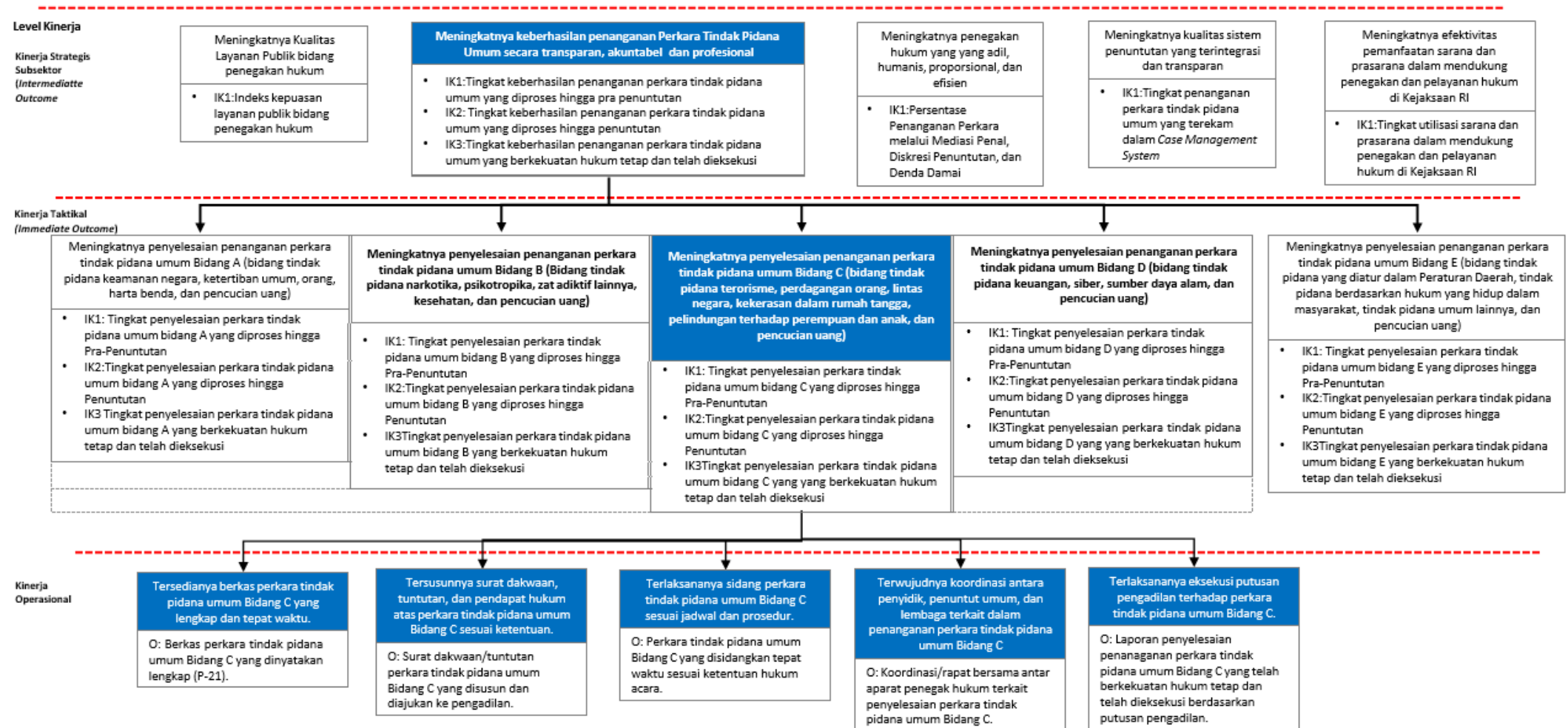
Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽²¹⁾



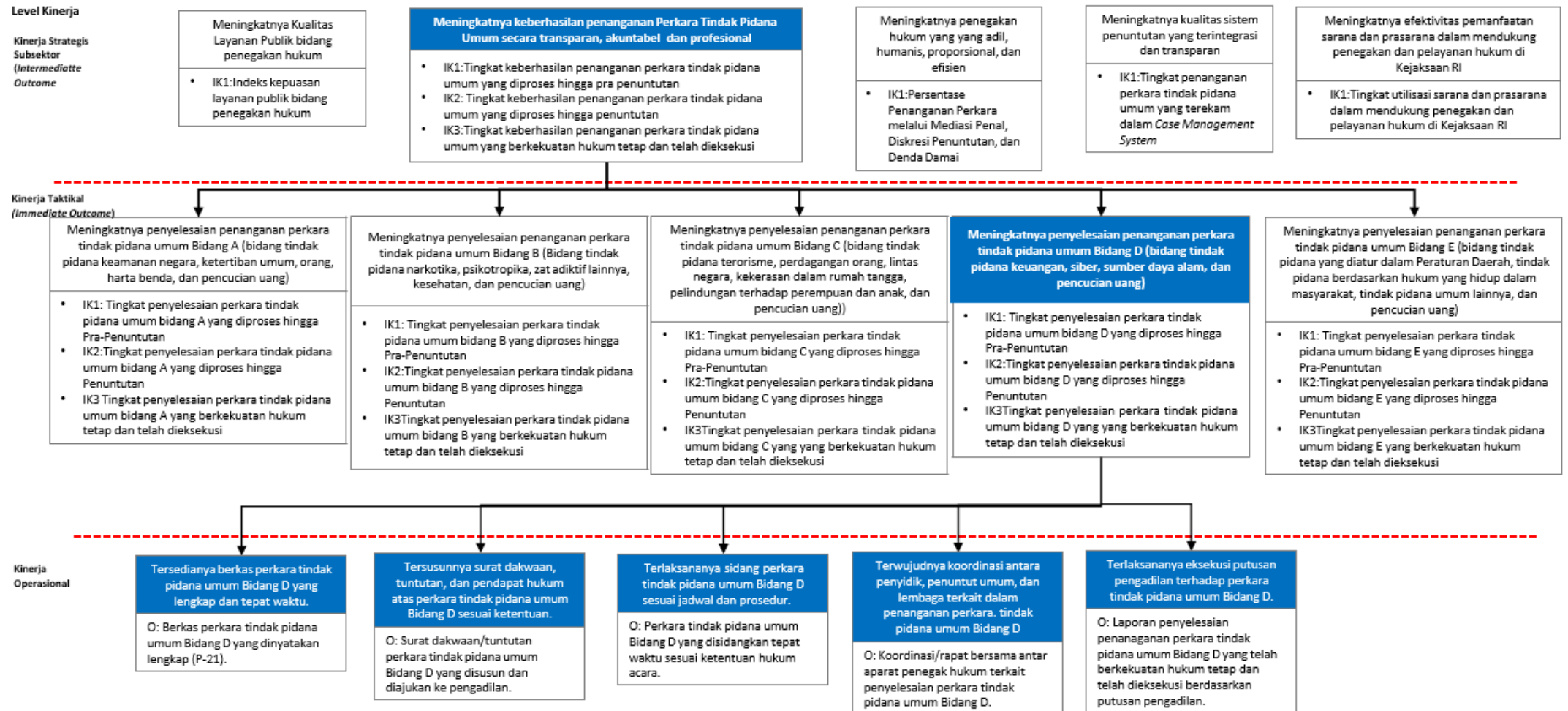
Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (22)



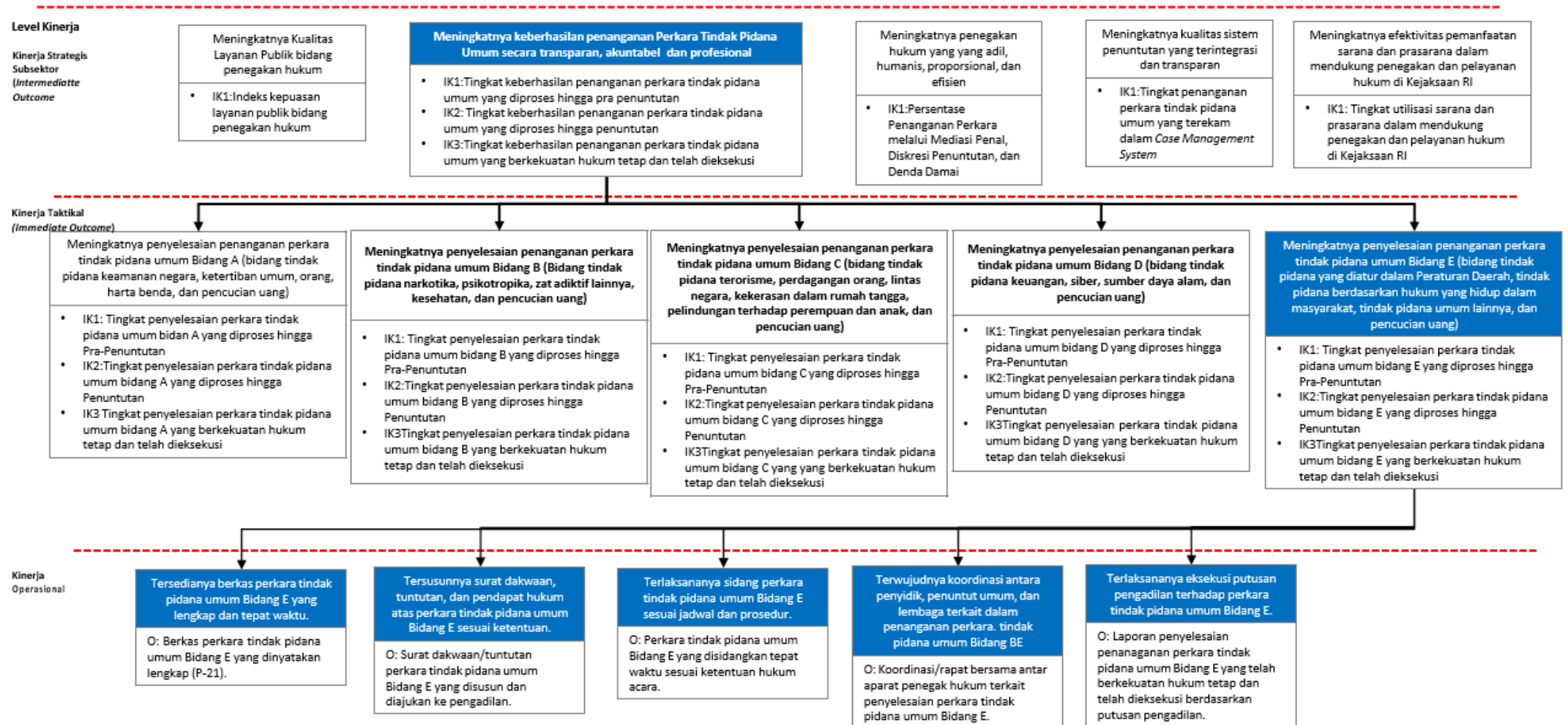
Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽²³⁾



Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽²⁴⁾

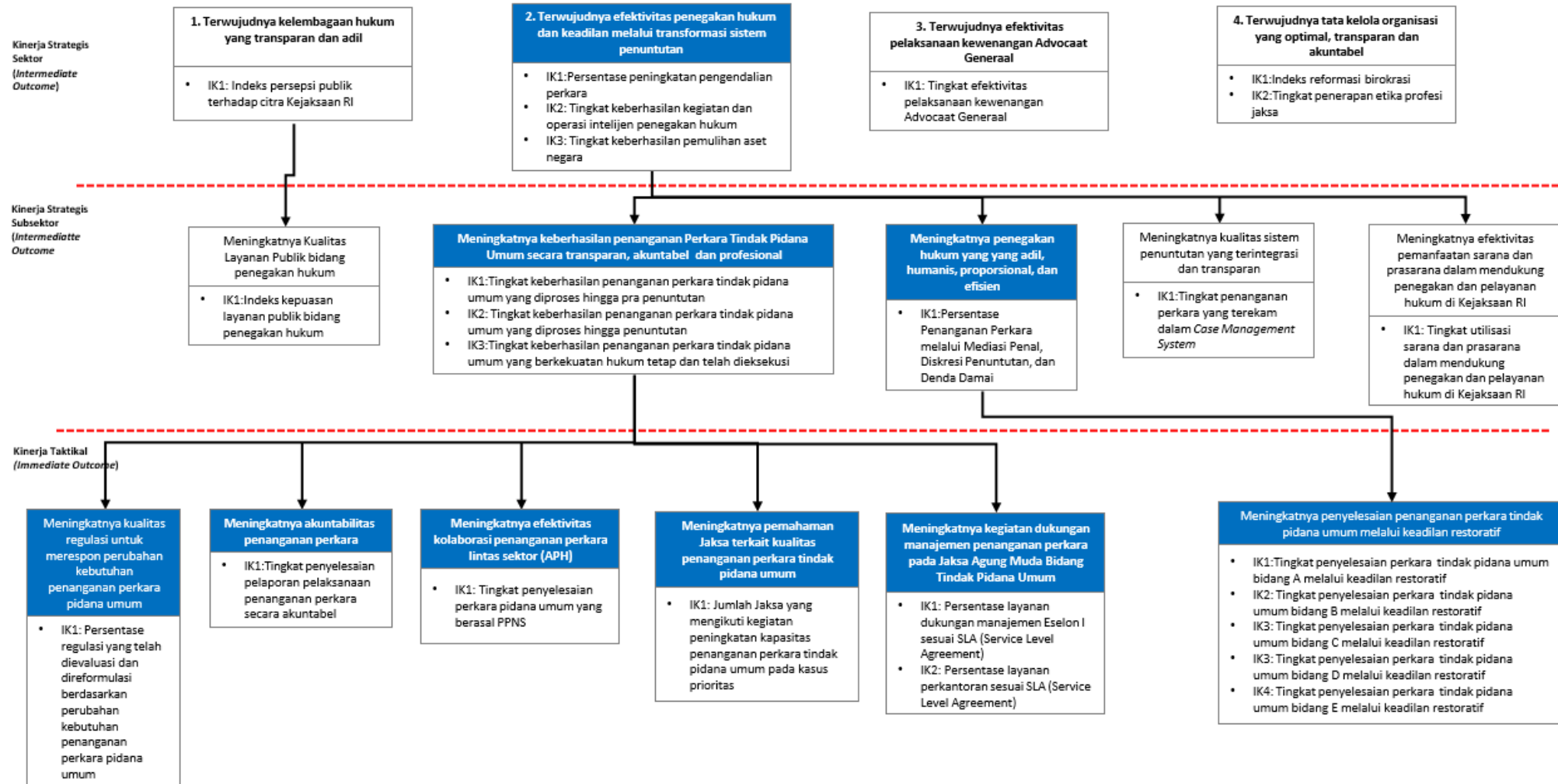


Pohon Kinerja Kejaksaaan Republik Indonesia ⁽²⁵⁾

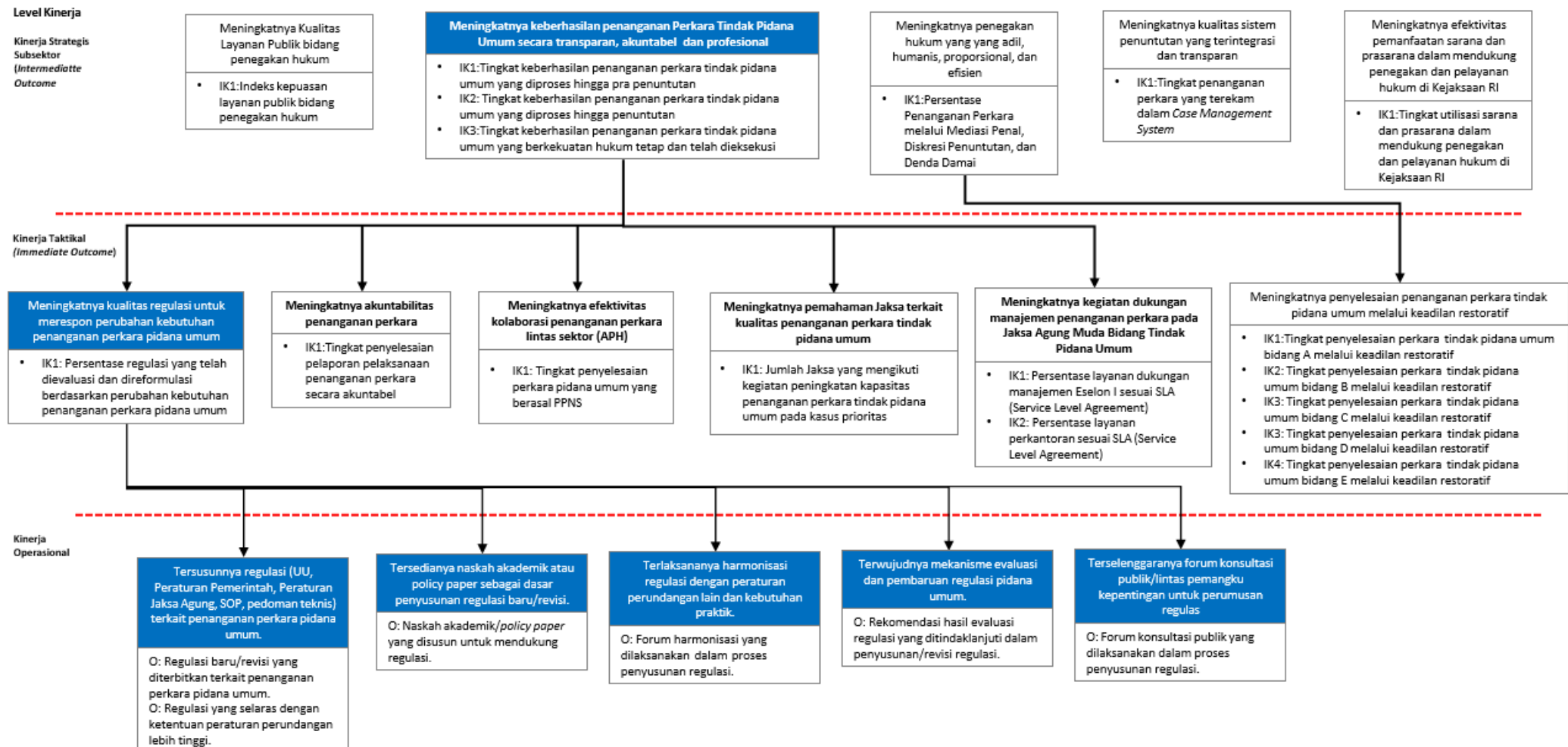


Pohon Kinerja Kejaksanaan Republik Indonesia ⁽²⁶⁾

Level Kinerja



Pohon Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽²⁷⁾



Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽²⁸⁾

Level Kinerja

Kinerja Strategis
Subsektor
(Intermediate
Outcome)

Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum

- IK1: Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum

Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana Umum secara transparan, akuntabel dan profesional

- IK1: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan
- IK2: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan
- IK3: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi

Meningkatnya penegakan hukum yang adil, humanis, proporsional, dan efisien

- IK1: Persentase Penanganan Perkara melalui Mediasi Penal, Diskresi Penuntutan, dan Denda Damai

Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan

- IK1: Tingkat penanganan perkara yang terekam dalam Case Management System

Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI

- IK1: Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI

Kinerja Taktikal
(Immediate Outcome)

Meningkatnya kualitas regulasi untuk merespon perubahan kebutuhan penanganan perkara pidana umum

- IK1: Persentase regulasi yang telah dievaluasi dan direformulasi berdasarkan perubahan kebutuhan penanganan perkara pidana umum

Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara

- IK1: Tingkat penyelesaian pelaporan pelaksanaan penanganan perkara secara akuntabel

Meningkatnya efektivitas kolaborasi penanganan perkara lintas sektor (APH)

- IK1: Tingkat penyelesaian perkara pidana umum yang berasal PPNS

Meningkatnya pemahaman Jaksa terkait kualitas penanganan perkara tindak pidana umum

- IK1: Jumlah Jaksa yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas penanganan perkara tindak pidana umum pada kasus prioritas

Meningkatnya kegiatan dukungan manajemen penanganan perkara pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

- IK1: Persentase layanan dukungan manajemen Eselon I sesuai SLA (Service Level Agreement)
- IK2: Persentase layanan perkantoran sesuai SLA (Service Level Agreement)

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum melalui keadilan restoratif

- IK1: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang A melalui keadilan restoratif
- IK2: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang B melalui keadilan restoratif
- IK3: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang C melalui keadilan restoratif
- IK3: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang D melalui keadilan restoratif
- IK4: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang E melalui keadilan restoratif

Kinerja Operasional

Tersedianya standar operasional prosedur (SOP) penanganan perkara yang jelas dan terdokumentasi.

O: SOP/pedoman teknis penanganan perkara yang ditetapkan/diperbarui.

Tersusunnya laporan penanganan perkara secara periodik dan terbuka untuk pengawasan internal maupun eksternal.

O: Laporan penanganan perkara yang disusun dan dipublikasikan sesuai jadwal.

Terlaksananya audit/monitoring dan evaluasi penanganan perkara sesuai prinsip akuntabilitas.

O: Rekomendasi hasil audit/monitoring penanganan perkara yang ditindaklanjuti.

O: Perkara yang ditangani sesuai SOP

Terdokumentasinya penanganan perkara dalam sistem informasi perkara secara transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

O: Perkara yang telah terinput dan tervalidasi dalam sistem informasi perkara secara akurat dan tepat waktu.

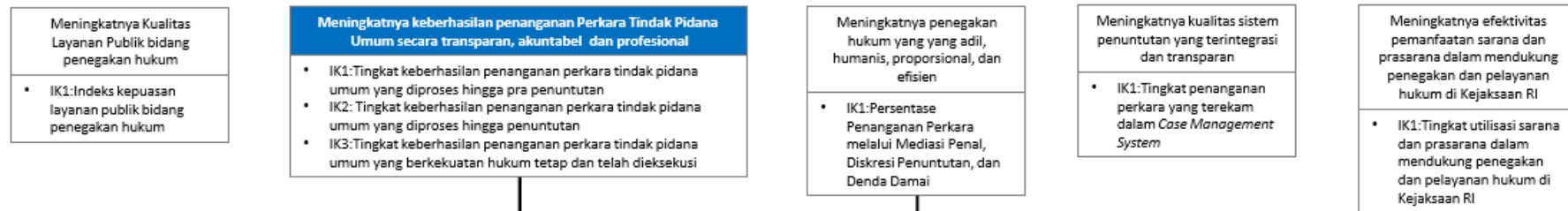
Terlaksananya mekanisme pengaduan masyarakat terkait penanganan perkara.

O: Laporan penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terkait dugaan penyimpangan dalam penanganan perkara.

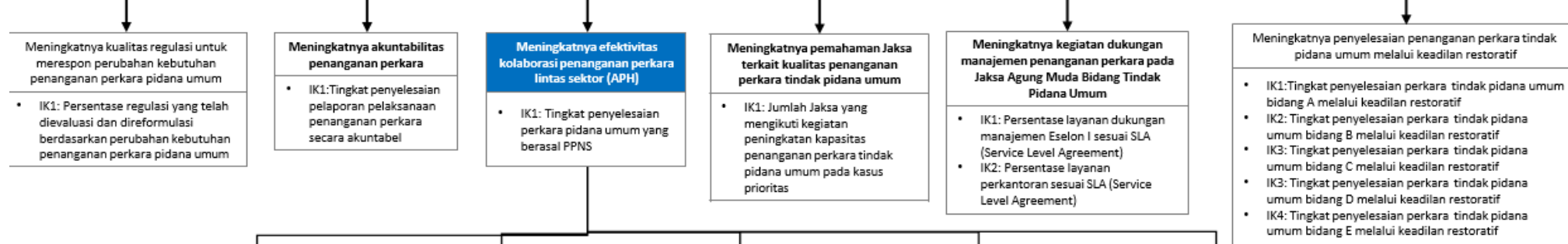
Pohon Kinerja Kejaksanaan Republik Indonesia ⁽²⁹⁾

Level Kinerja

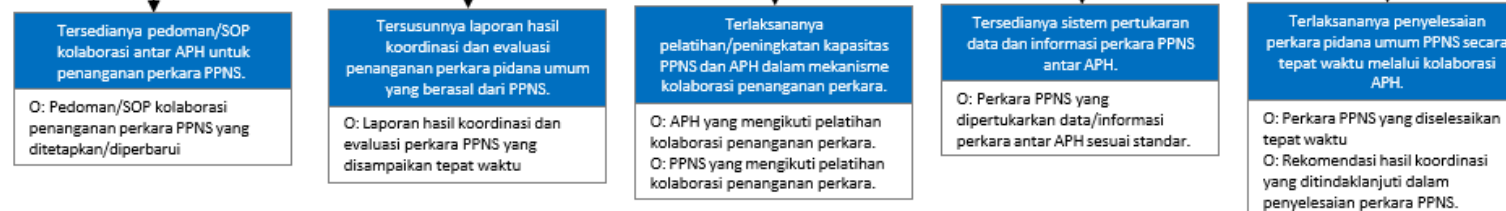
Kinerja Strategis
Subsektor
(Intermediate
Outcome)



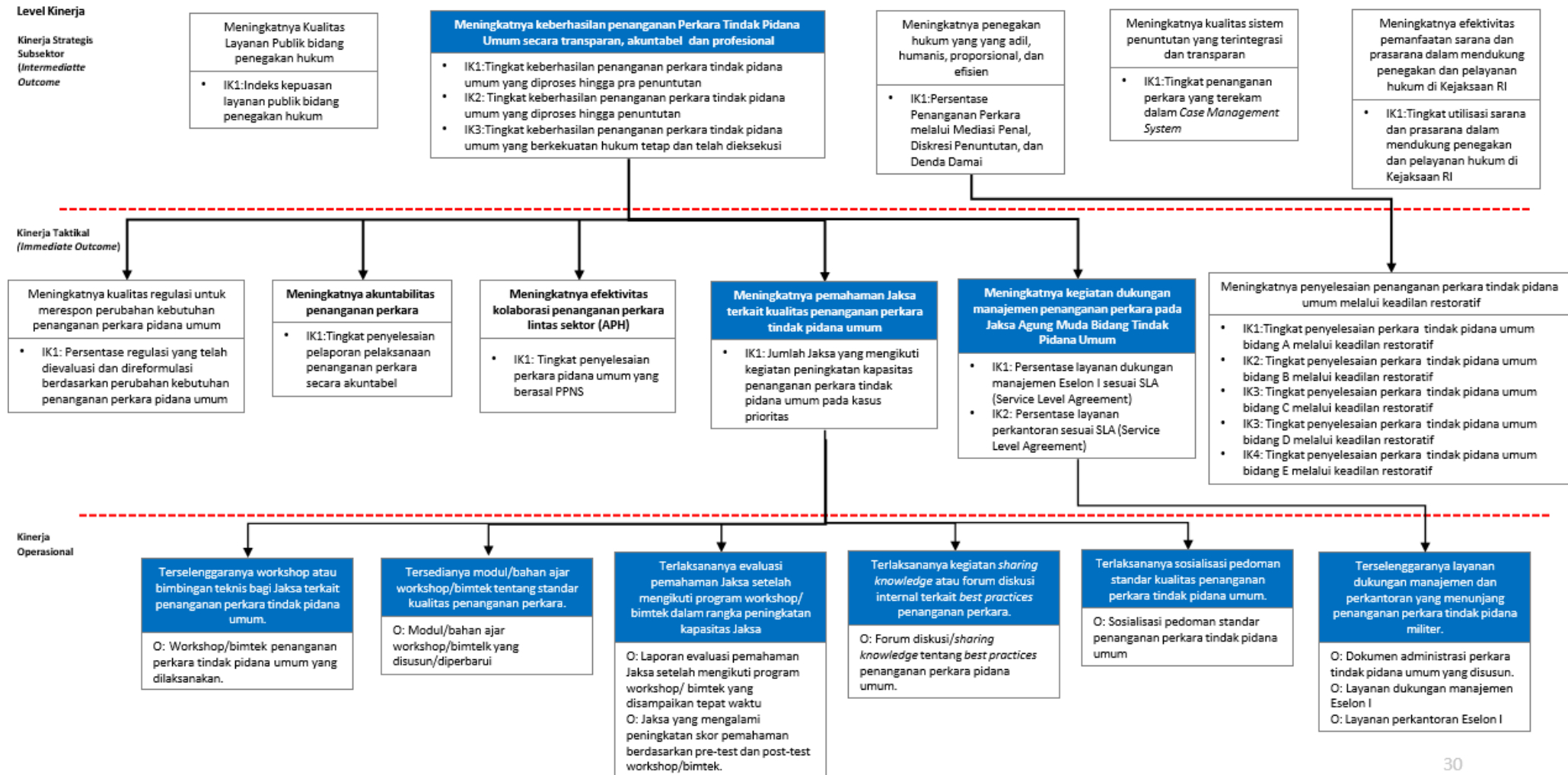
Kinerja Taktikal
(Immediate Outcome)



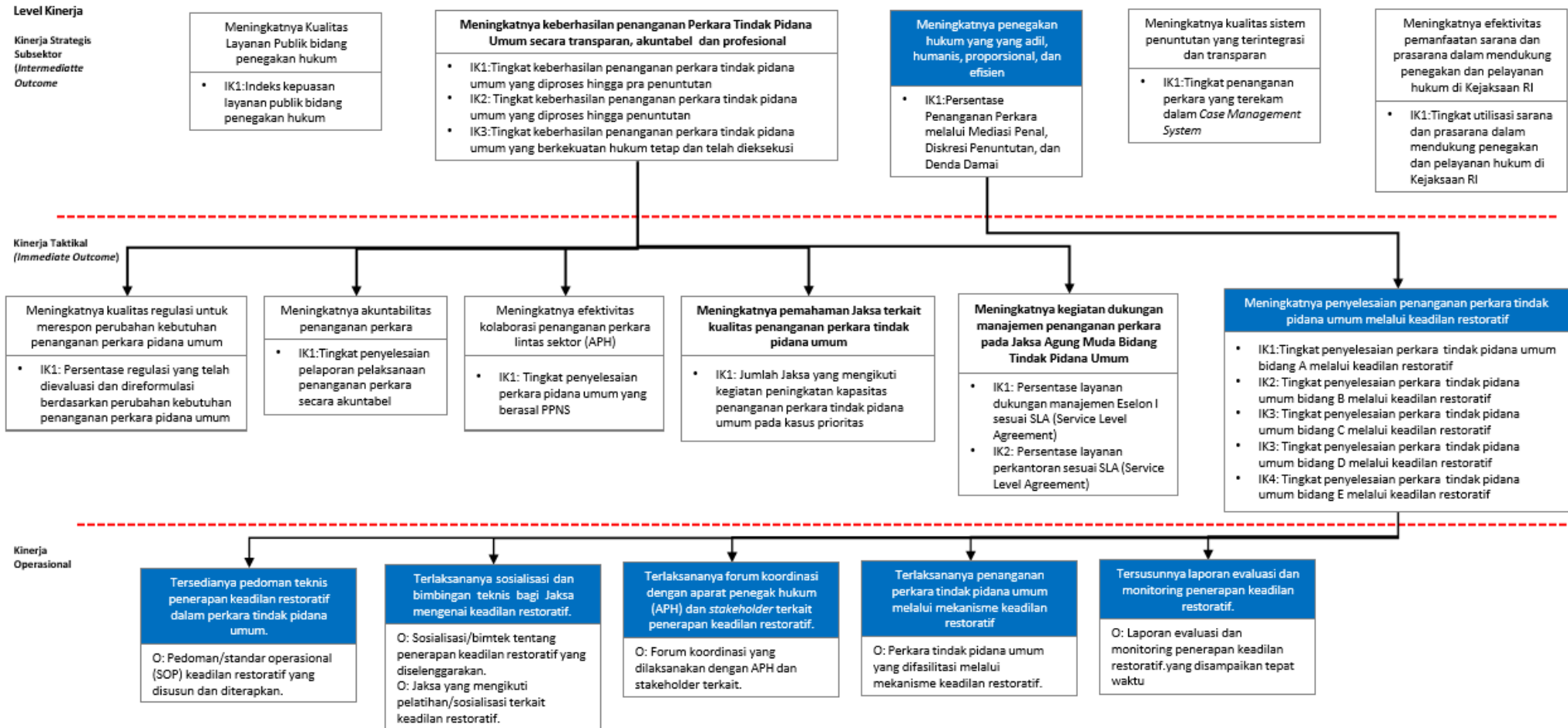
Kinerja Operasional



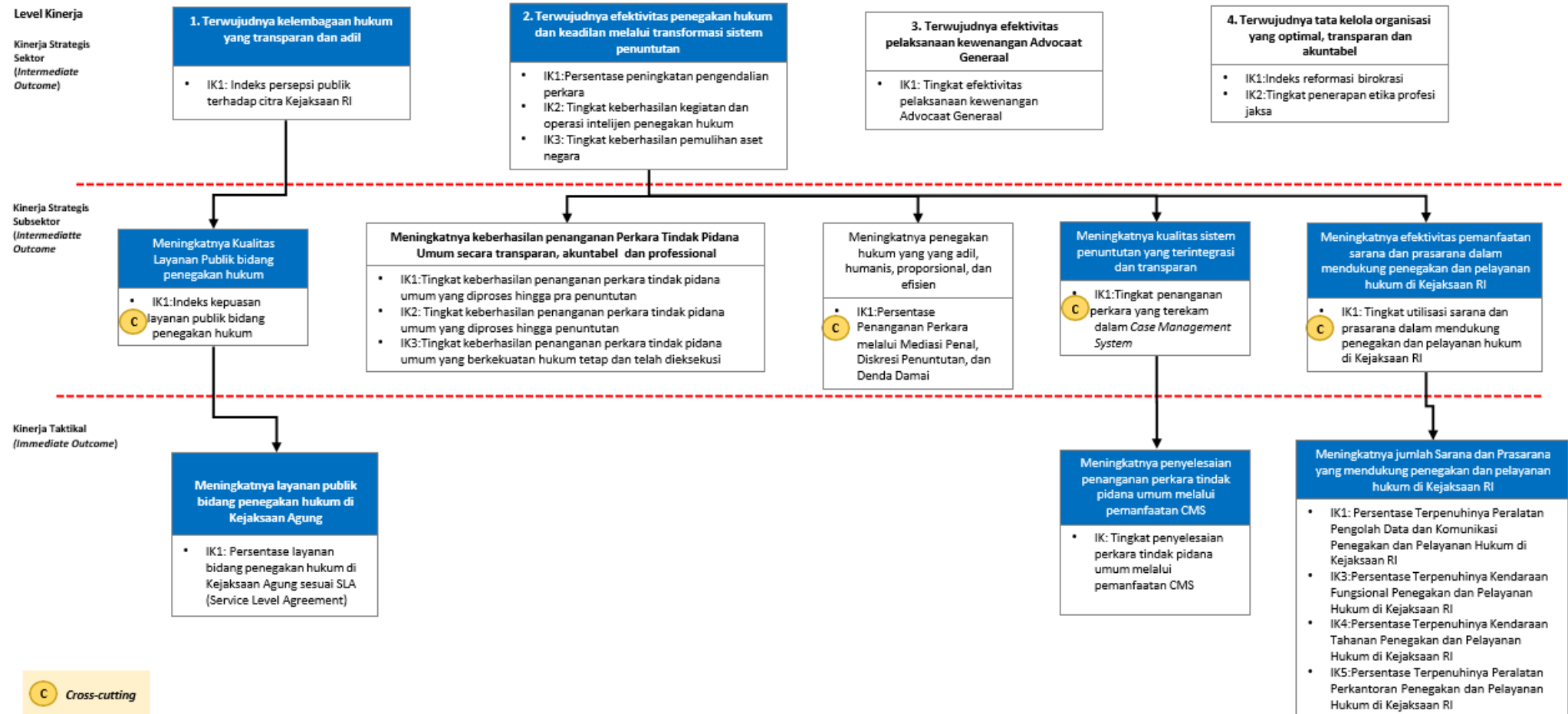
Pohon Kinerja Kejaksanaan Republik Indonesia ⁽³⁰⁾



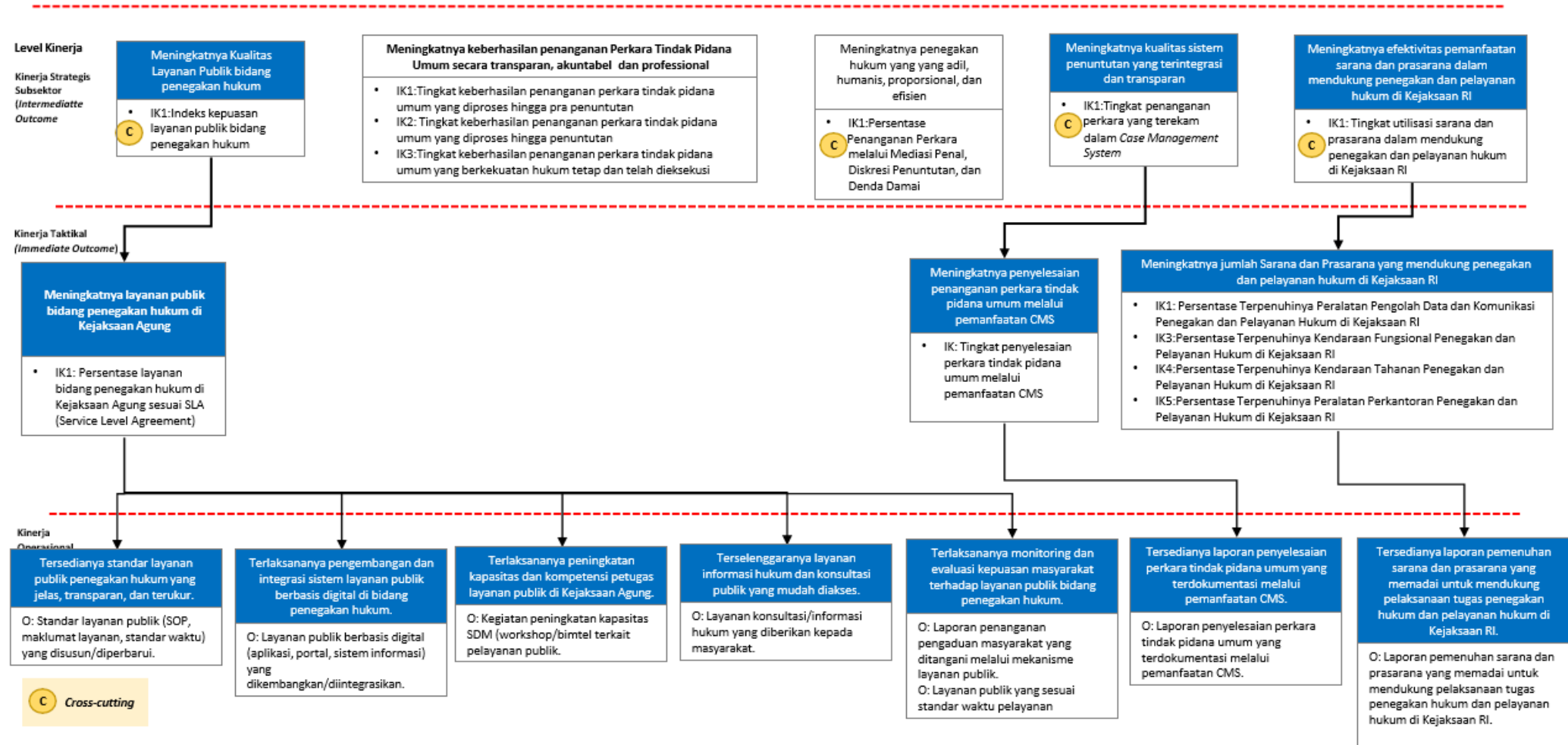
Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽³¹⁾



Pohon Kinerja Kejaksaaan Republik Indonesia ⁽³²⁾



Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽³³⁾



Pohon Kinerja Kejaksanaan Republik Indonesia ⁽³⁴⁾

Level Kinerja

Kinerja Strategis
Sektor
(Intermediate
Outcome)

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil

- IK1: Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksanaan RI

2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan

- IK1: Persentase peningkatan pengendalian perkara
- IK2: Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum
- IK3: Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara

3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal

- IK1: Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal

4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel

- IK1: Indeks reformasi birokrasi
- IK2: Tingkat penerapan etika profesi jaksa

Kinerja Strategis
Subsektor
(Intermediate
Outcome)

Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana keapabeanaan, tindak pidana cukai, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional

- IK1: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU
- IK2: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU
- IK3: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana keapabeanaan dan TPPU
- IK4: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU
- IK5: Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU
- IK6: Tingkat keberhasilan penanganan perkara pelanggaran HAM Berat
- IK7: Tingkat keberhasilan pengendalian operasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus

Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara serta pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus

- IK1: Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU
- IK2: Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanaan, Perpajakan, Cukai, tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara)

Kinerja Taktikal

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU

- IK1: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan
- IK2: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan
- IK3: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan
- IK4: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan
- IK5: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang *Inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) dan telah dieksekusi

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU

- IK1: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap prapenuntutan
- IK2: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan
- IK3: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang *Inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) dan telah dieksekusi

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana keapabeanaan dan TPPU

- IK1: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana keapabeanaan dan TPPU pada tahap prapenuntutan
- IK2: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana keapabeanaan dan TPPU pada tahap penuntutan
- IK3: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana keapabeanaan dan TPPU yang *Inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) dan telah dieksekusi

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU

- IK1: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap prapenuntutan
- IK2: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan
- IK3: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang *Inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) dan telah dieksekusi

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU

- IK1: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyelidikan
- IK2: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyidikan
- IK3: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap prapenuntutan
- IK4: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan
- IK5: Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang *Inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) dan telah dieksekusi

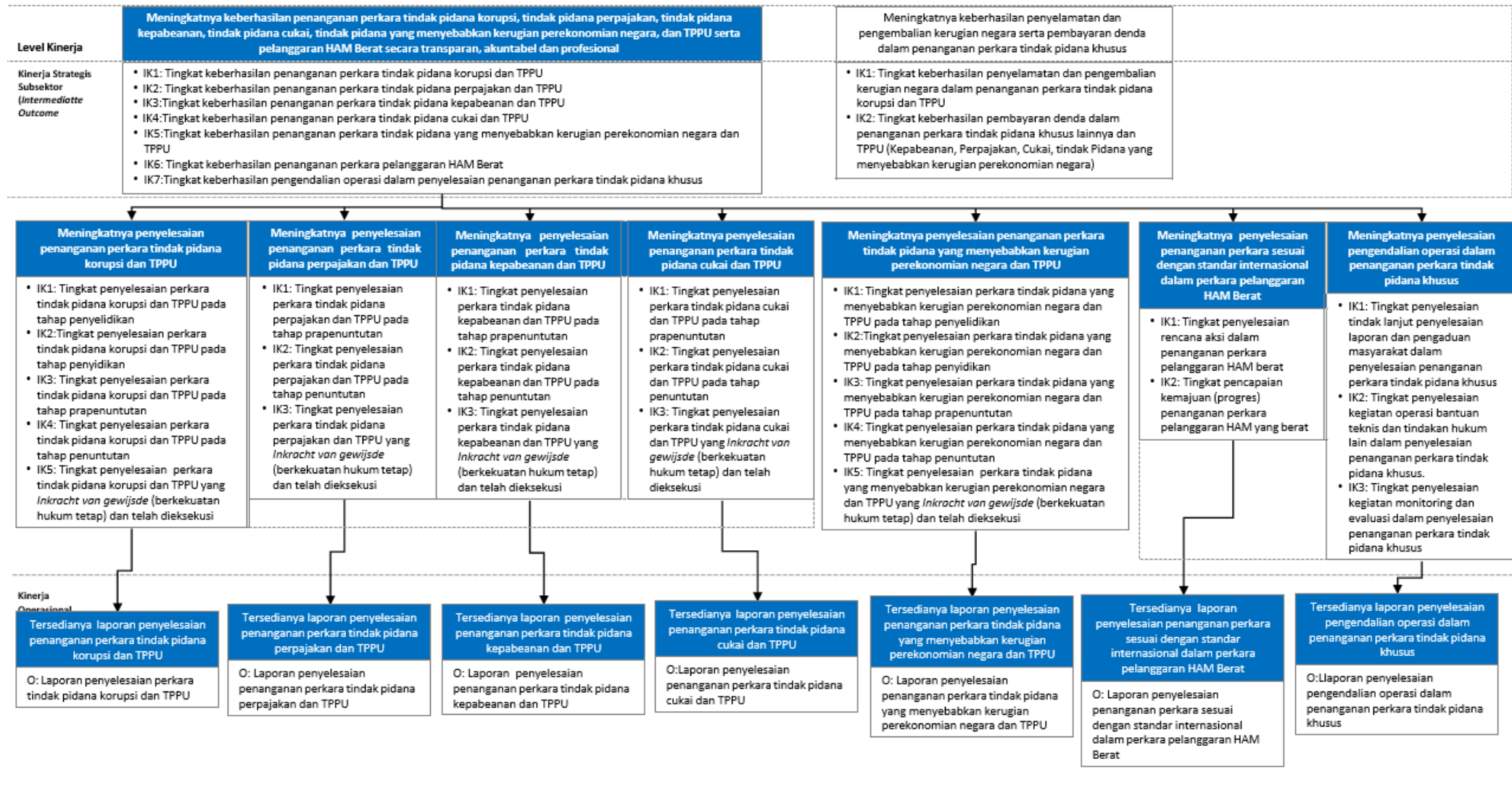
Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara sesuai dengan standar internasional dalam perkara pelanggaran HAM Berat

- IK1: Tingkat penyelesaian rencana aksi dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat
- IK2: Tingkat pencapaian kemajuan (progres) penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat

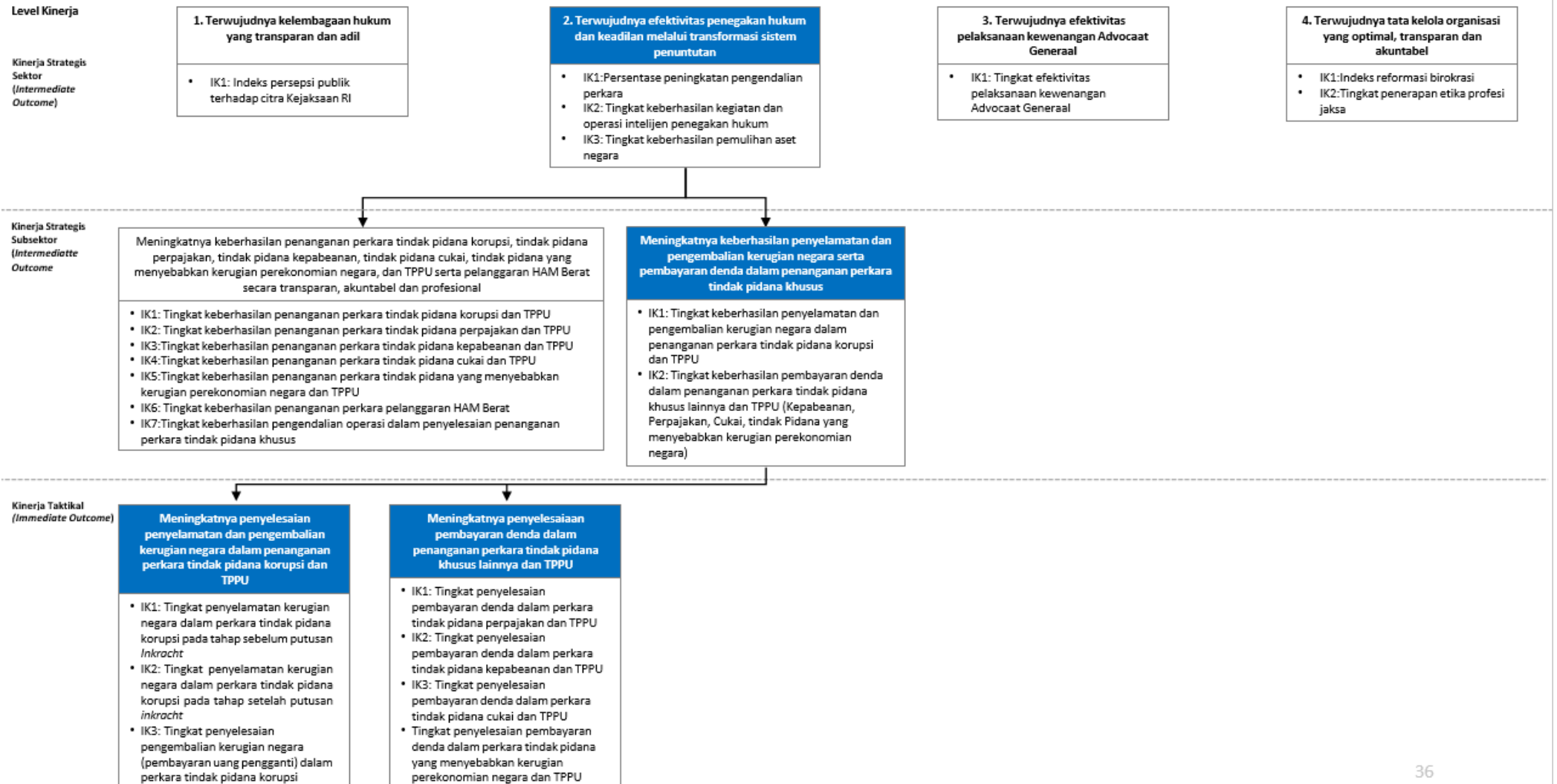
Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus

- IK1: Tingkat penyelesaian tindak lanjut penyelesaian laporan dan pengaduan masyarakat dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus
- IK2: Tingkat penyelesaian bantuan teknis dan tindakan hukum lain dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus
- IK3: Tingkat penyelesaian kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus

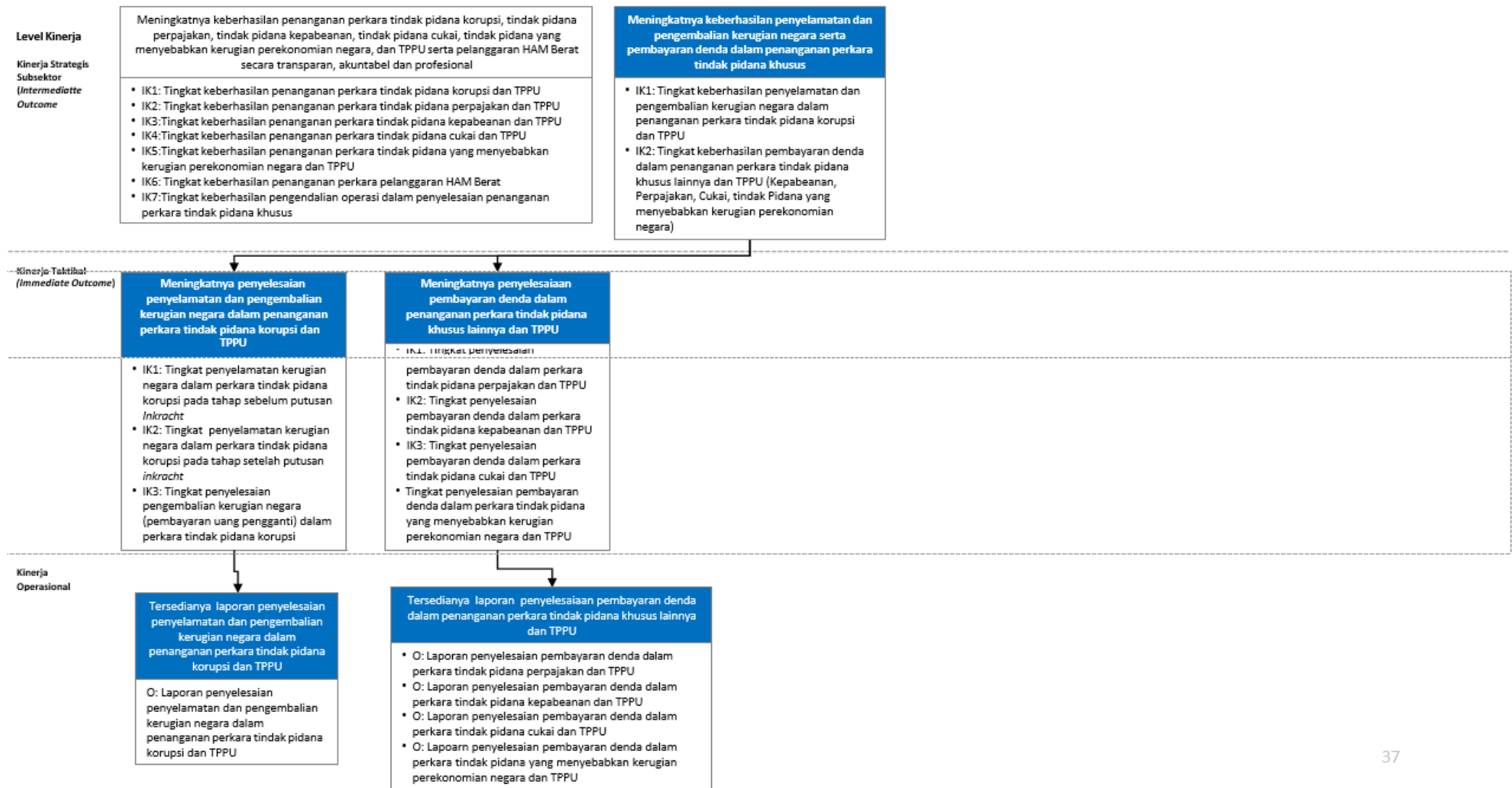
Pohon Kinerja Kejaksan Republik Indonesia ⁽³⁵⁾



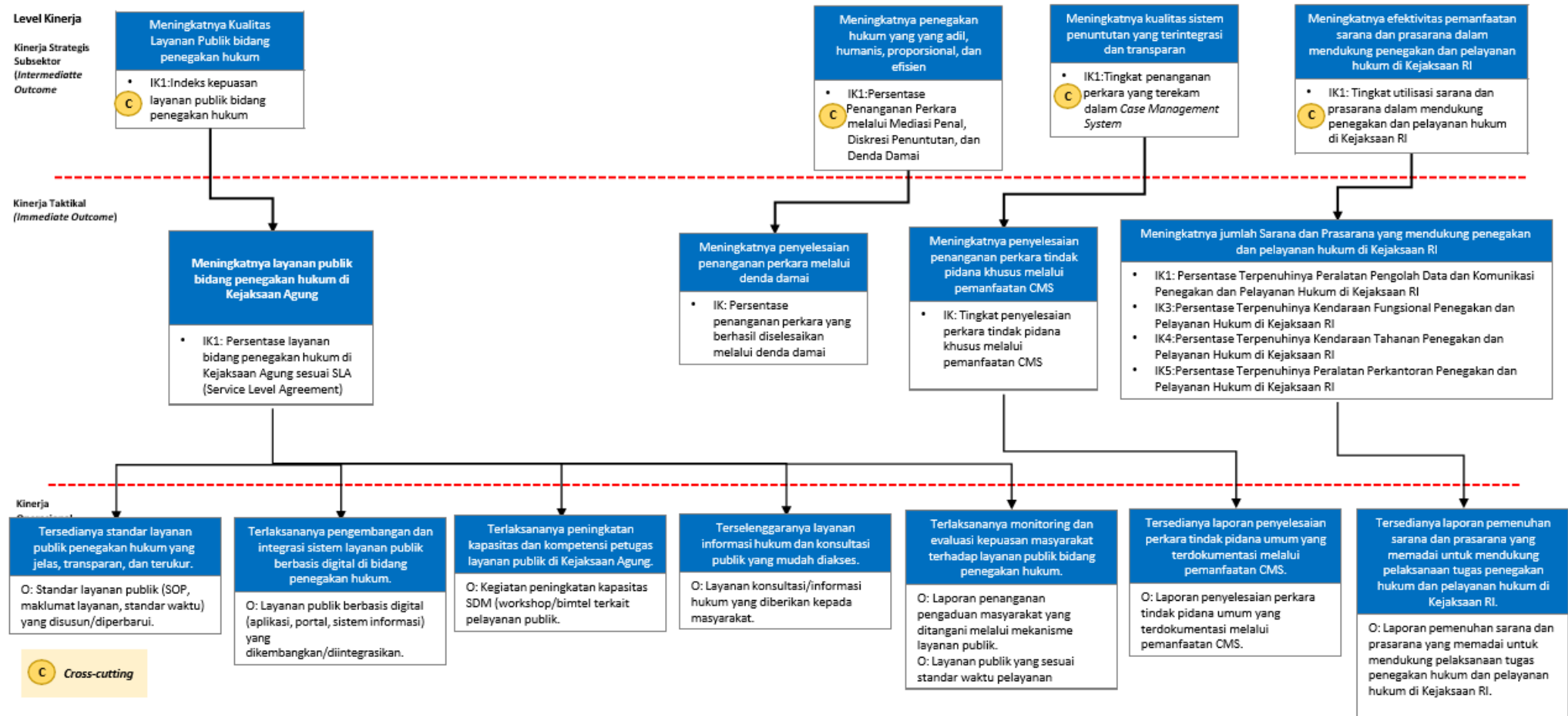
Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽³⁶⁾



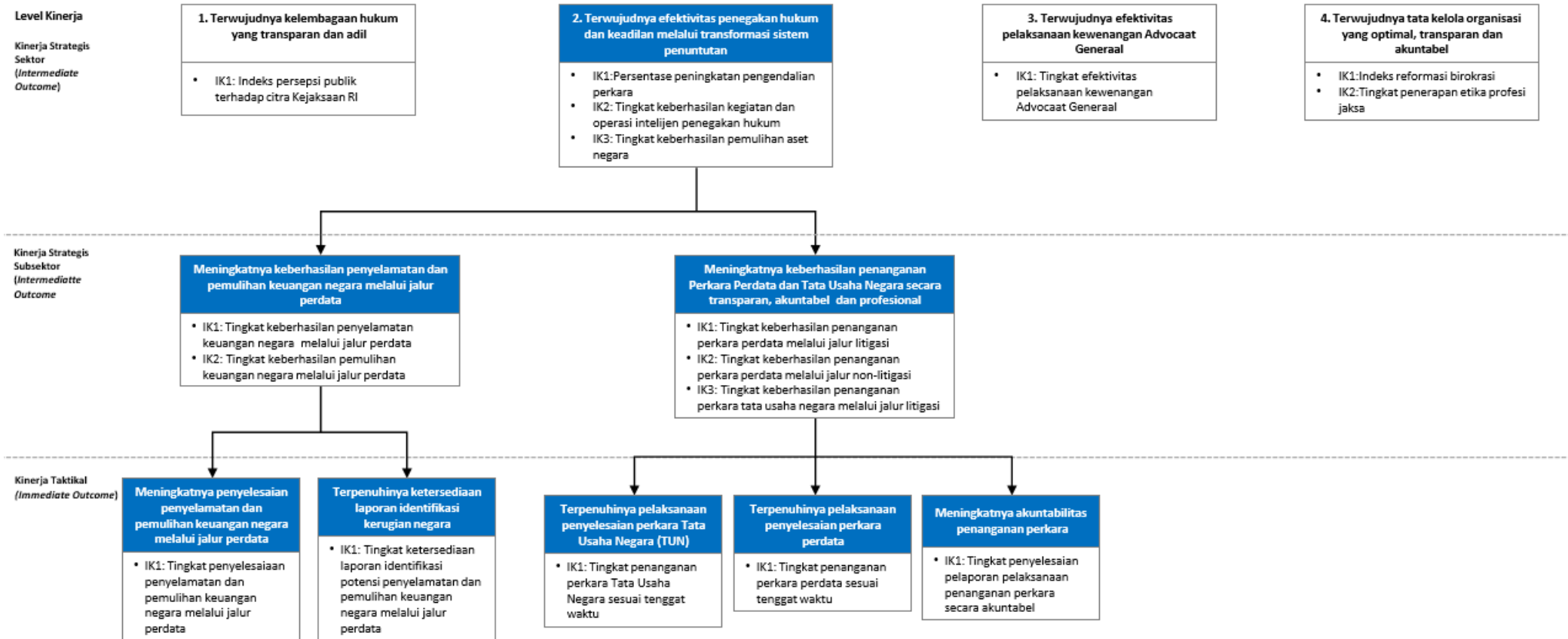
Pohon Kinerja Kejaksaaan Republik Indonesia ⁽³⁷⁾



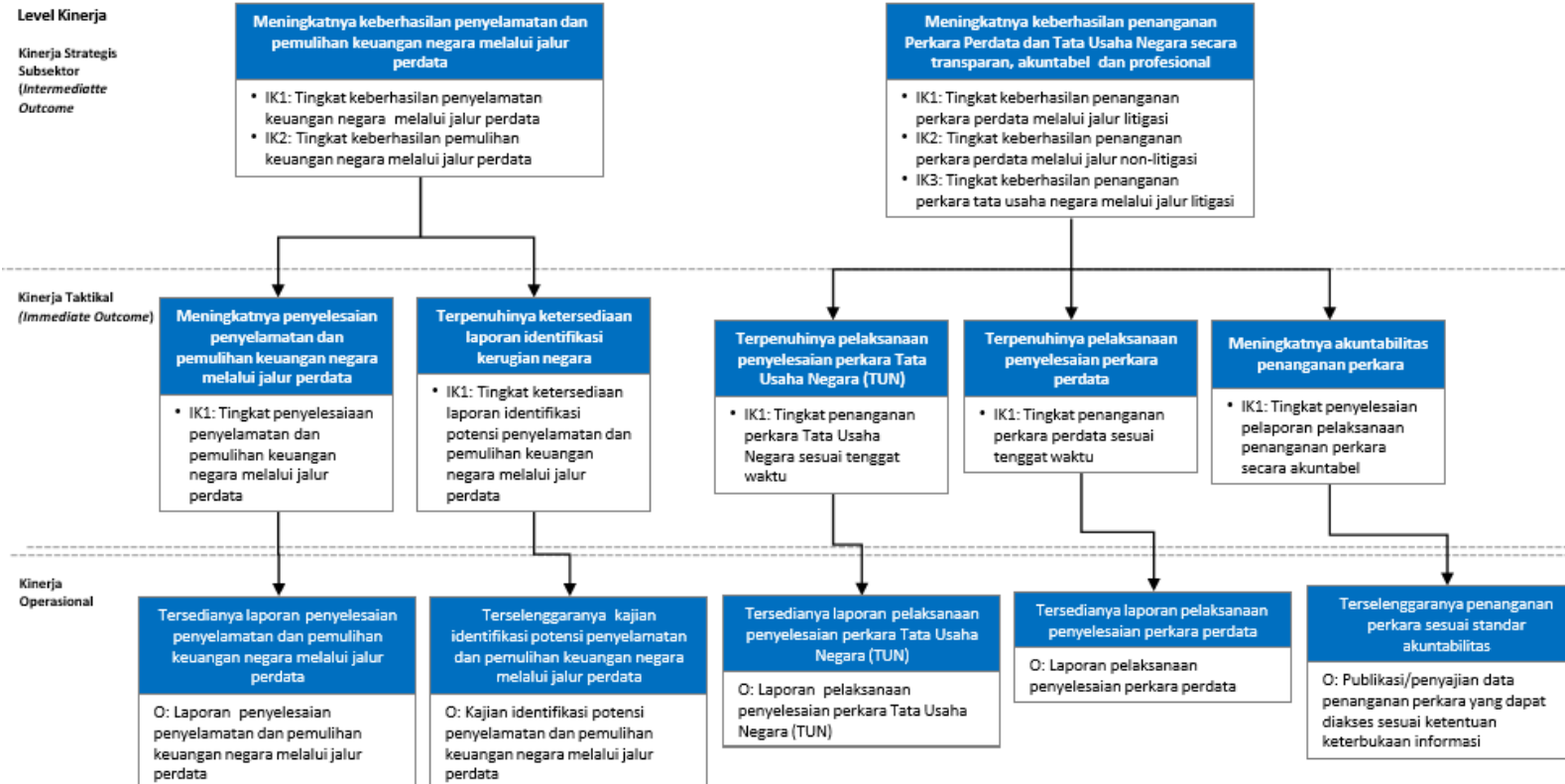
Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽³⁸⁾



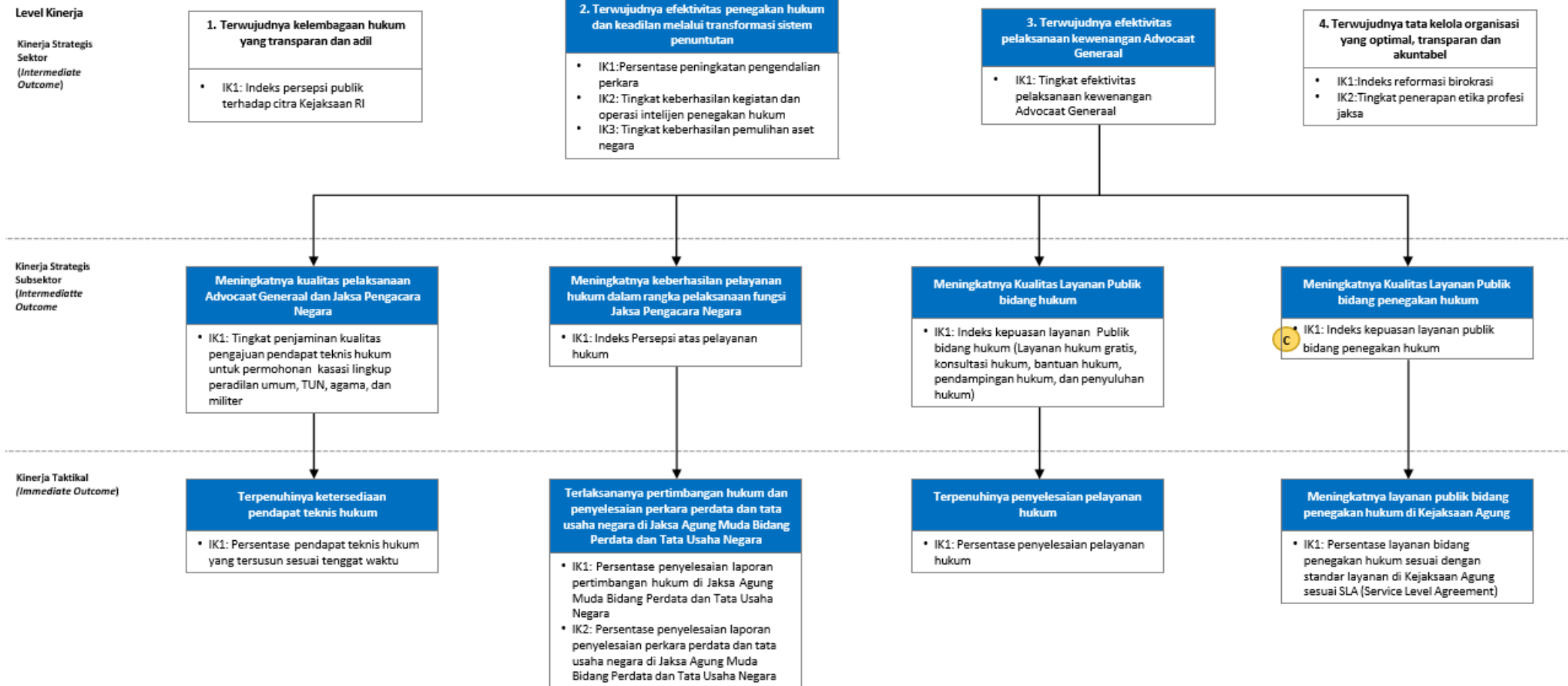
Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽³⁹⁾



Pohon Kinerja Kejaksanaan Republik Indonesia (40)

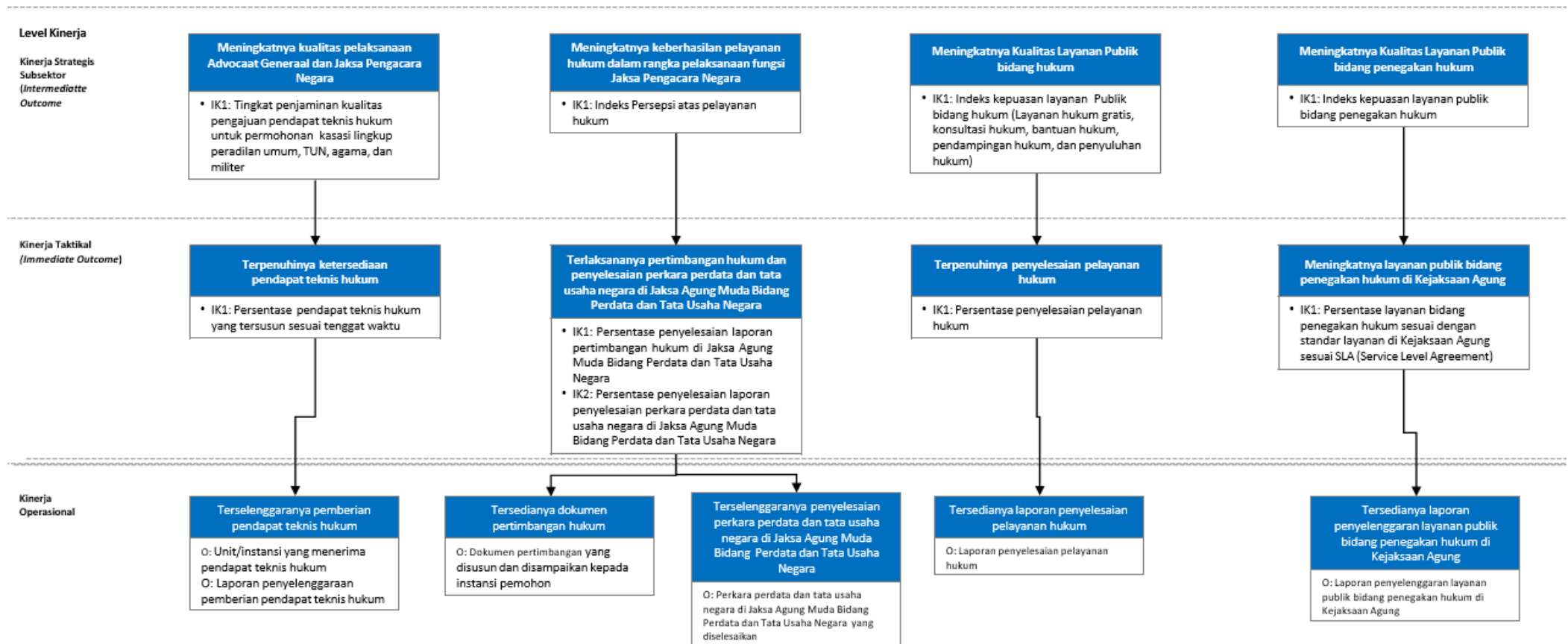


Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽⁴¹⁾

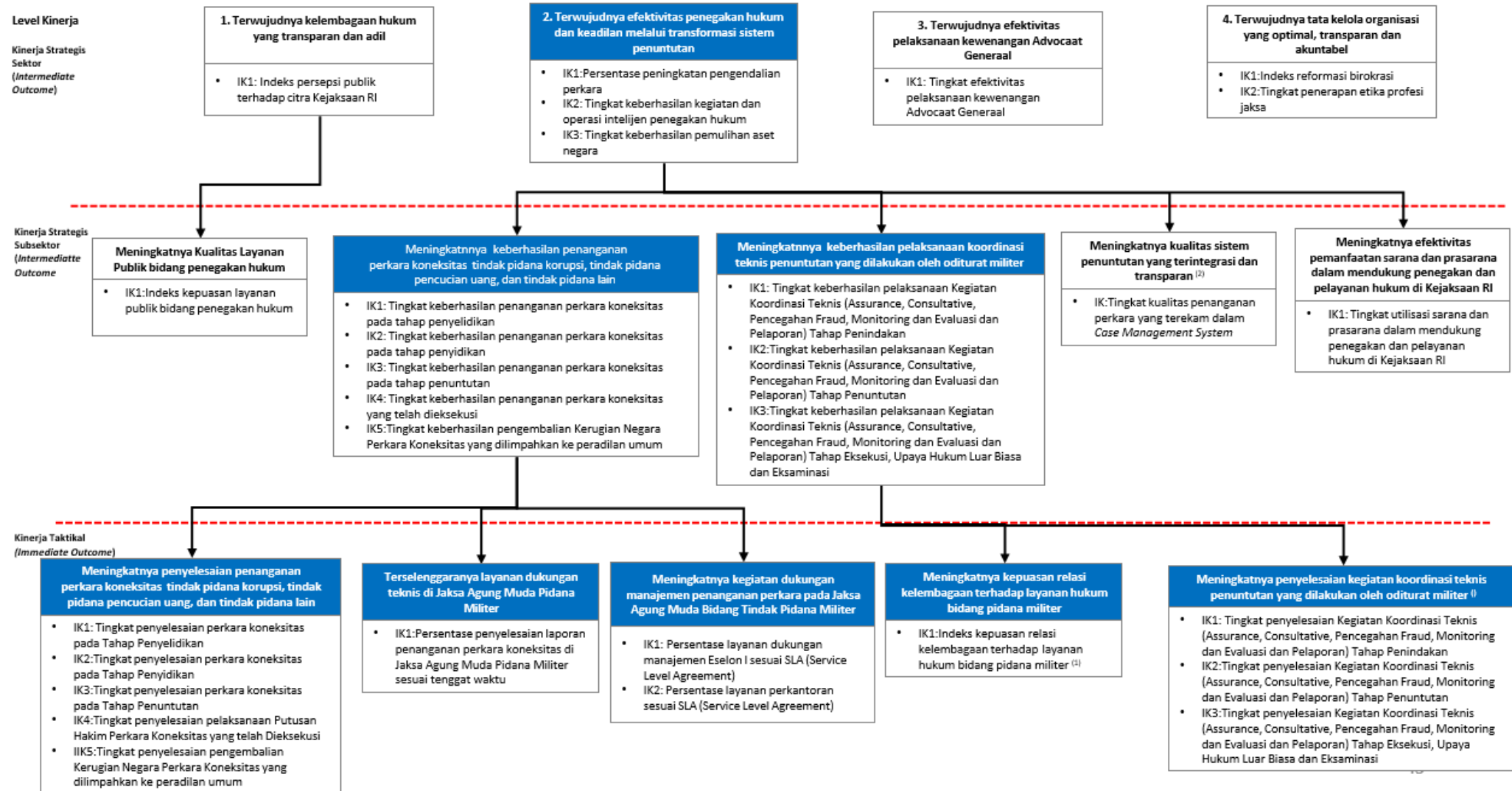


C Cross-cutting

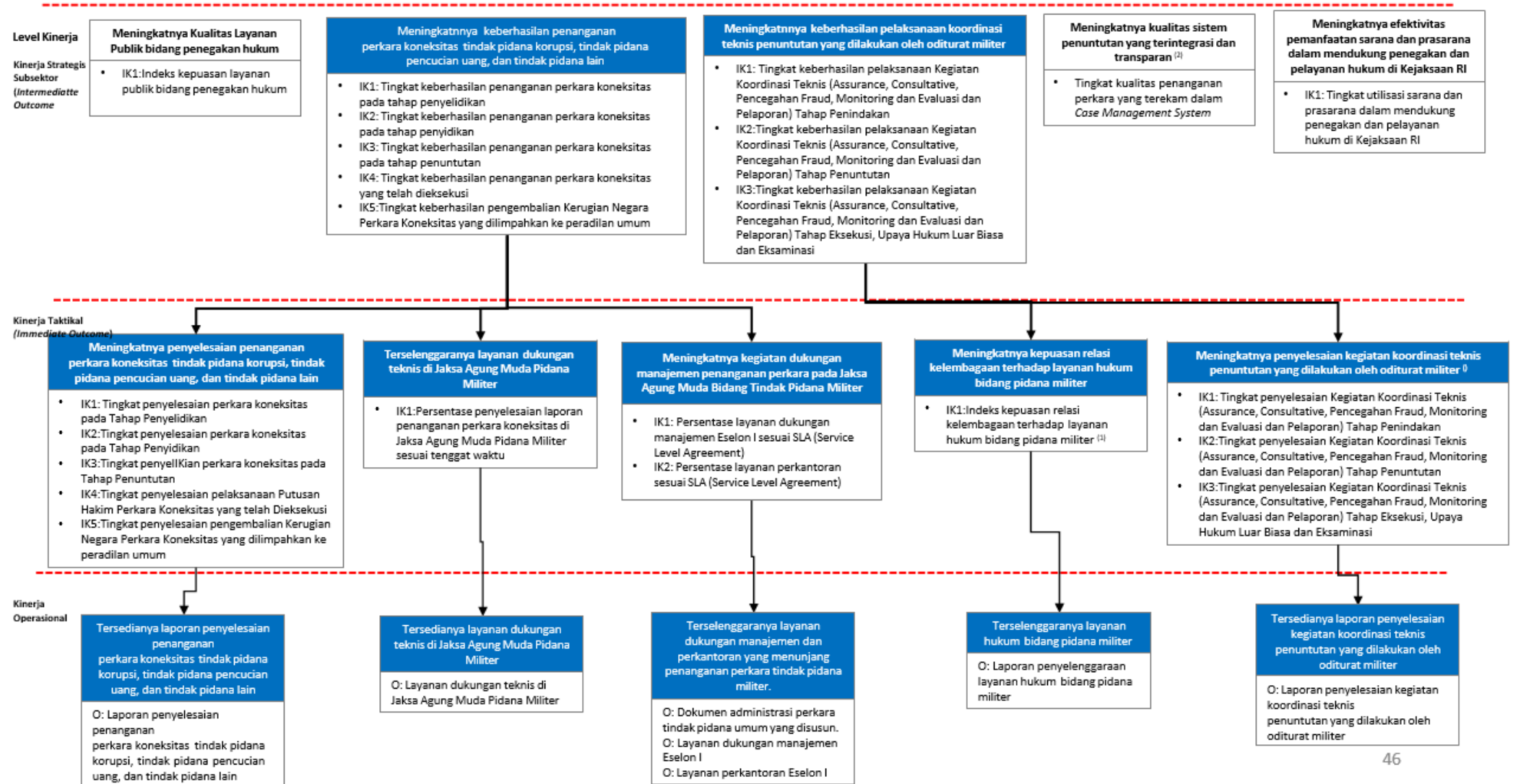
Pohon Kinerja Kejaksanaan Republik Indonesia (42)



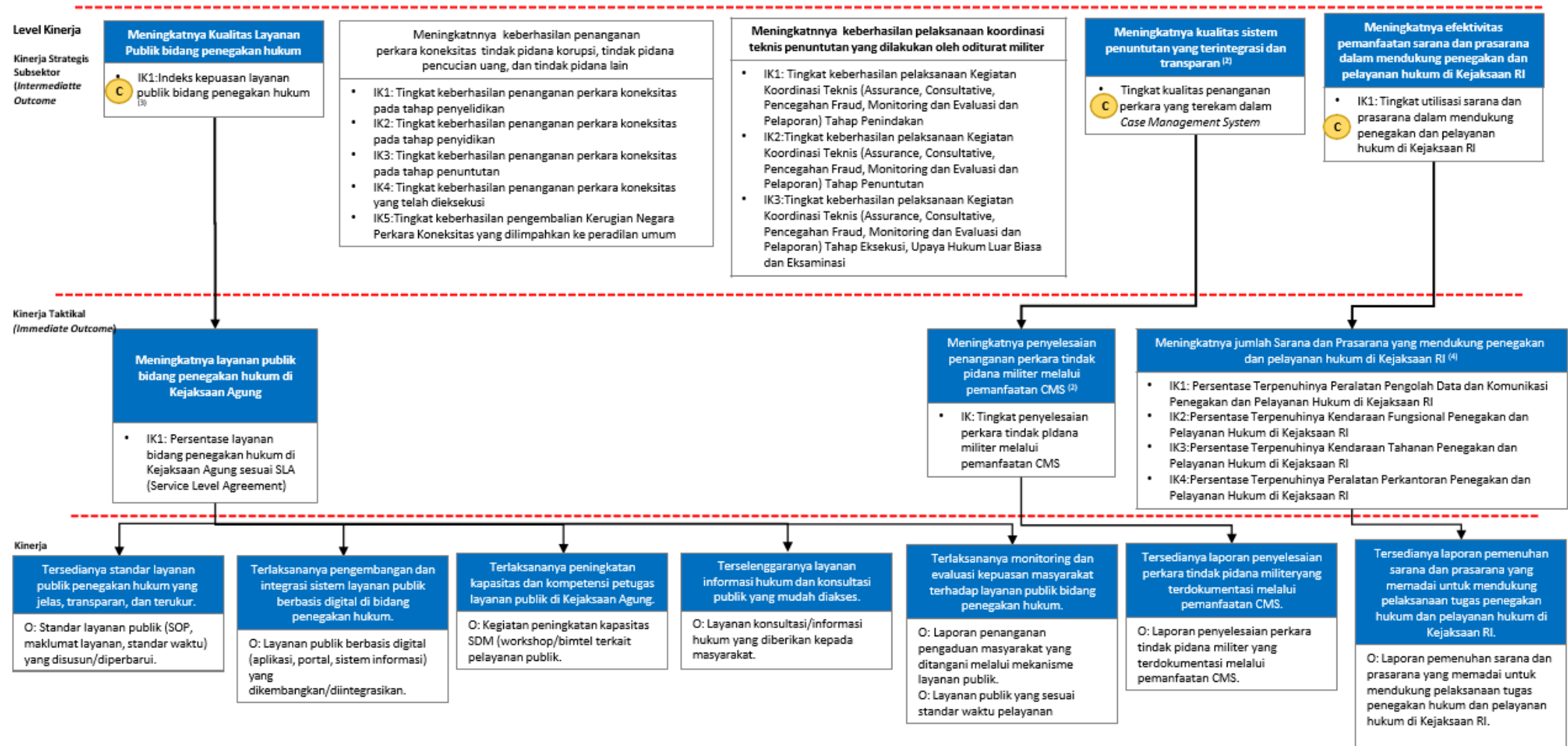
Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽⁴³⁾



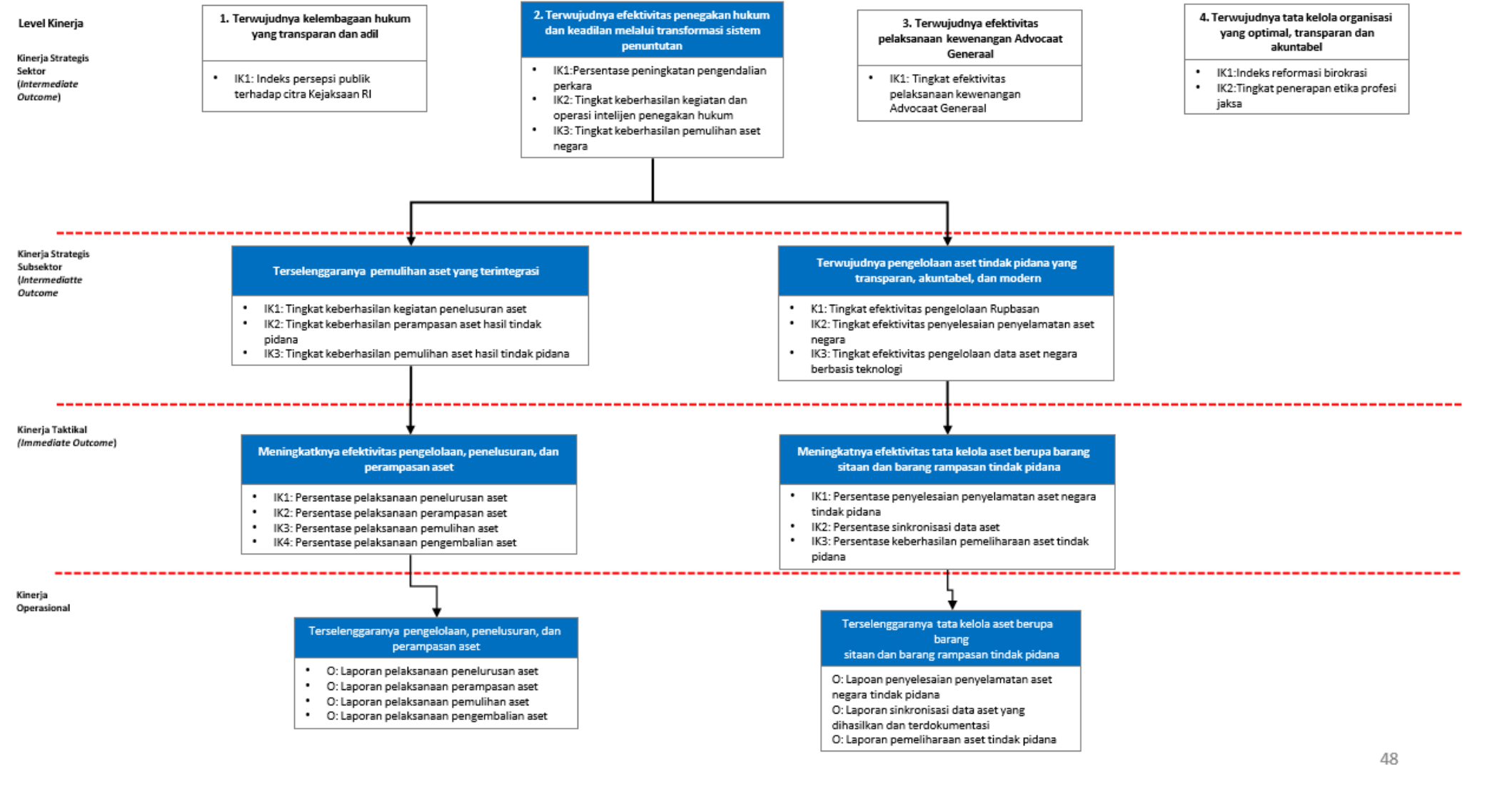
Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽⁴⁴⁾



Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽⁴⁵⁾



Pohon Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ⁽⁴⁶⁾





JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN